



REVOLUSI OKTOBER 1946 DI KALIMANTAN BARAT

RIKAZ PRABOWO

Revolusi Oktober 1946 di Kalimantan Barat

Rikaz Prabowo

Penyunting: Farninda Aditya

Tata Letak: 

Desain sampul: Varli Pay Sandi

Foto Sampul: Sumber: <https://historia.id/politik/articles/barisan-jenggot-berbahaya-DWVzk> reproduksi dari IPPHOS (Indonesia Press Photo Service)

Cetakan Pertama: Juni 2019

Cetakan Kedua: Agustus 2019

x+94 hlm

14x21 cm

Enggang Media

Jalan Ampera Komplek Villa Permata Asri. No. E1

Pontianak - Kalbar

 @enggangmedia

 @bukuenggang

 0895379144553

 Enggang Media

 Buku Enggang

 enggangmedia@gmail.com

Daftar Isi

Bagian I: Kalimantan Barat Pra-Proklamasi Indonesia	1
a. Janji Kemerdekaan Dai Nippon	1
b. Organisasi Nissinkai dan Peristiwa Mandor	5
c. Perang Dayak Desa	9
Bagian II: Kaum Republikan Bergerak	15
a. Perjuangan PPRI di Pontianak	15
b. Pertempuran Kecil atau Insiden?	21
c. Barisan Kuntji Waja	24
d. BPRI Antibar - Mempawah	26
e. Insiden Bendera Sambas	28
f. Perjuangan Rahadi Usman Ketapang	31
Bagian III: Misi Membebaskan Bengkayang	35
a. Bermula di Singkawang	35
b. Tigapuluh Jam Bersama RI	37
c. Rencana Pemberontakan di Sambas	44
Bagian IV: Oktober Merah di Ngabang-Landak	46
a. Kota Perlawanan	46
b. Berdirinya Persatuan Rakyat Indonesia (PRI)	48
c. Dari PRI ke GERAM	49
d. Kisah Bardan Nadi	54
Bagian V: Ondergrondse Acties di Pontianak	57
a. Menusuk dengan Pers dan Seni	57

b. Persekutuan Para Raja	60
c. Api Padam Pemberontakan Juga Padam	63
Bagian VI: Pertempuran di Nanga Pinoh	67
a. Upacara Perpisahan Tuan Kuroda	67
b. Berdirinya Organisasi Pemberontak Merah Putih (OPMP)	69
c. Mempertahankan Nanga Pinoh dan Rencana Merebut Sintang	73
Bagian VII: Revolusi Belum Selesai	
Perjuangan Kaum Republikan Pasca Oktober 1946-1949	77
a. Dari Revolusioner ke Parleментар	77
b. Api (Perlawanan) Belum Padam	81
c. Api (Perlawanan) Belum Padam	85
Daftar Pustaka	88
Tentang Penulis	93

KATA PENGANTAR

*"Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama,
kita masih hidup di masa pancaroba. Jadi tetaplah
bersemangat elang rajawali."*

- Ir. Sukarno -

Pemimpin Besar Revolusi, Presiden Republik Indonesia I

Assalamualaikum, wr. wb.

Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 merupakan suatu momentum penting dimana bangsa ini telah lahir di muka bumi. Kelahiran negara baru bernama Indonesia tersebut merupakan peristiwa revolusioner, Indonesia yang awalnya merupakan negeri koloni berbagai bangsa berhasil menjadi suatu bangsa yang memiliki negaranya sendiri. Semua serba cepat dan mendesak, bahkan saat proklamasi Indonesia masih kekurangan berbagai perangkat layaknya sebuah negara. Belum memiliki Presiden, belum menetapkan konstitusi, bahkan belum memiliki tentara.

Akan tetapi ada hal yang tidak kalah mendesak dan harus segera diperjuangkan, yakni mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Belanda kembali datang, kembali berusaha menancapkan kuku-kuku imperialisme nya di Indonesia. Mengagalkan atau bahkan membunuh bayi

bernama “Indonesia” yang baru saja lahir. Gema pekikan merdeka bersahut-sahutan di seluruh pelosok negeri, termasuk di Kalimantan Barat. Suatu wilayah yang sebenarnya memiliki tradisi perlawanan terhadap kolonialisme sejak lama.

Di Kalimantan Barat, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilaksanakan oleh badan-badan perjuangan baik secara perlawanan bersenjata maupun perjuangan politis. Di sejumlah kota di provinsi ini terjadi pertempuran yang tidak kalah dahsyatnya seperti di Pulau Jawa dan Sumatera dalam mengusir penjajah Belanda. Bahwa sejumlah perlawanan yang hampir serentak terjadi pada Oktober 1946 di Bengkayang, Ngabang, Nanga Pinoh, dan Pontianak. Di kota lain seperti Singkawang dan Sambas juga disiapkan perlawanan serupa meskipun tidak terealisasi. Oleh karena perlawanan tersebut terjadi di sekitar bulan Oktober 1946 – bahkan merupakan suatu pemberontakan umum. Maka tidak salah jika buku ini penulis beri judul Revolusi Oktober 1946 di Kalimantan Barat.

Pembabakan waktu utama dalam buku ini penulis tarik dari tahun 1945-1946, meskipun pada bagian pertamanya penulis juga menggambarkan secara sekilas kondisi Kalimantan Barat pra kemerdekaan – pada masa pendudukan Jepang 1942-1945. Pemilihan waktu 1945 pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga sekitar Oktober 1946 merupakan masa dimana aksi-aksi kaum republiken di Kalimantan Barat sedang berada di puncak semangatnya

sehingga meletuslah Peristiwa Revolusi Oktober 1946 atau pemberontakan umum di hampir seluruh kota di Kalimantan Barat. Dengan sebab umum rakyat yang menolak kembali hadirnya Belanda dalam bentuk NICA, aksi-aksi sepanjang 1945-1946 dari bentuk demonstrasi hingga perebutan kota bergantian meletus dengan tujuan untuk mengambil alih pemerintahan dan menyatakannnya sebagai bagian dari Republik Indonesia. Beberapa peran tokoh-tokoh pahlawan Kalimantan Barat dalam Revolusi Oktober juga dibahas dalam buku ini, seperti dr. Mas Soedarso, Muhammad Ali Anyang, Bardan Nadi, Muzani A. Rani, dan lain sebagainya yang masih banyak lagi.

Buku ini disusun atas latar belakang keprihatinan penulis terhadap kenyataan ahistoris (sebagian) masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Pontianak, yang sama sekali tidak menyadari di tanah tempat mereka tinggal ini ribuan rakyat dan pemuda telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta untuk meraih kemerdekaan abadi. Kenyataan-kenyataan itu bagaimanapun juga harus tersampaikan dalam berbagai cara, salah satunya melalui tulisan di buku ini. Selain itu buku ini juga bisa menjadi sarana edukatif yang dapat digunakan bagi siapa saja yang ingin mempelajari tentang Kalimantan Barat. Lagipula sudah saatnya anak-anak Kalimantan Barat harus diberikan pendidikan kesejarahan yang bersifat lokal seiring dengan sejarah-sejarah yang bersifat nasional.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah hirabbilalamin, dan berkat rahmat Allah SWT, tuhan semesta alam buku

ini telah selesai penulis susun. Terimakasih pula sebesar-besarnya penulis haturkan kepada orang tua dan orang-orang yang penulis cintai. Terimakasih khusus kepada beberapa pihak yang telah membantu kelancaran penulisan buku ini, antara lain: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kalimantan Barat, Laboratorium Sejarah IKIP PGRI Pontianak, Perpustakaan Kota Pontianak, dan Bapak Syafaruddin Usman, mentor penulis yang telah banyak memberikan pandangan dan masukan terkait sejarah lokal di Kalimantan Barat.

Semoga buku ini berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, serta menjadi InsyAllah menjadi Amal Jariyah penulis. Amien....

"Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa, apabila bangsa itu tidak mau (berjuang) merubah nasibnya sendiri"

Pontianak, Oktober 2018

Rikaz Prabowo

BAGIAN I

KALIMANTAN BARAT

PRA-PROKLAMASI INDONESIA

A. Janji Kemerdekaan Dai Nippon

Kisahanya diawali pada siang hari menjelang Sholat Jum'at, tanggal 19 Desember 1941 akan selalu diingat oleh masyarakat Pontianak bagaimana untuk pertamakalinya mereka merasakan bom berjatuh dari langit. Bom-bom tersebut dimuntahkan dari perut pesawat bomber milik Jepang, sasaran awalnya adalah tangsi-tangsi militer KNIL (tentara Hindia-Belanda) di Pontianak. Kala itu Pontianak merupakan ibukota Borneo Westerafdeeling, berbagai kantor pemerintahan dan jawatan Hindia Belanda hingga perumahan londo terdapat di kota ini. Nahas, bom tersebut meleset dan justru menghantam persekolahan, pasar, dan rumah penduduk. Konon akibat salah target, ratusan penduduk Pontianak gugur. Padahal Jepang belum menginjakkan sepatu lars nya di Kalimantan Barat. Peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa Kapal Terbang Sembilan, sebab saat itu ada sembilan pesawat tempur Jepang dalam pemboman Pontianak. Pemboman kembali terjadi pada 22 Desember 1941 dan juga memakan korban rakyat yang tidak berdosa.¹

Meskipun begitu, saat serdadu bermata sipit itu memasuki Pontianak, mereka disambut dengan baik dan penuh suka cita oleh rakyat. Tidak ada perlawanan berarti saat Jepang memasuki Pontianak. Pasukan KNIL yang terkenal garang terhadap kaum pergerakan Indonesia sudah terlebih dahulu kabur sebagai pecundang ke arah pedalaman. Mereka tidak memiliki mental dan keberanian sehebat pasukan Jepang yang sebenarnya berbadan lebih kecil dari mereka. Rakyat Kalimantan Barat yang sebenarnya sudah menyimpan kebencian terhadap Belanda

¹ R.M. Umar dkk, *Melacak Jejak Sejarah Kalimantan Barat*, C.V Derwati, Pontianak, 2017: hlm. 57

akhirnya menerima Jepang dengan tangan terbuka sebagai "pembebas" penjajahan barat.

Dengan menyatakan diri seagai saudara tua, Jepang menebar janji untuk membebaskan negara-negara di Asia dari penjajahan barat. Propaganda ini awalnya berhasil. Jepang memang melarang seluruh aktifitas politik, bahkan membubarkannya. Akan tetapi Jepang memberikan suatu kesempatan luas yang begitu disenangi rakyat. Dalam bidang pendidikan misalnya, dibuka banyak sekolah dan semua anak dapat mengikuti sekolah tersebut tanpa diskriminasi. Sekolah dasar zaman Jepang waktu itu bernama Hsu Ko Gakko. Selain mempelajari Bahasa Jepang (Nippon Go) dan menggunakan Bahasa Indonesia setiap harinya siswa diajarkan nyanyian-nyanyain Jepang (Nippon No Uta), dan olahraga Taisho. Diberikan juga latihan baris berbaris ala militer hingga kegiatan kerja bakti (Kinrohosi). Untuk Sekolah Lanjutan setamat dari Hsu Ko Gakko, pendidikan di pusatkan di Pontianak dan diberikan secara cuma-cuma serta di asramakan.²

Jepang juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk bergabung dalam organisasi militer dengan status sebagai pembantu tentara Angkatan Laut, atau Kaigun Heiho. Tentang Pasukan Heiho, dibentuk pada 22 April 1943 namun baru direalisasikan pada bulan Mei 1943. Dikhususkan untuk pemuda berumur 16-20 tahun, tujuan awalnya dimaksudkan untuk membantu pekerjaan kasar pembangunan instalasi dan pertahanan militer. Akan tetapi dalam perkembangannya diberikan latihan dan persenjataan yang sama dengan tentara Jepang reguler. Heiho bahkan dikirim ikut berperang di garis depan bersama tentara berkebangsaan Jepang.³

Di Kalimantan Barat sendiri hanya ada Kaigun Heiho sebab kekuasaan

² Ya' Ahmad dkk, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Barat*, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 1984: Hlm 67

³ Petrik Matanasi, *Sejarah Tentara: Munculnya Bibit-bibit Militer di Indonesia Masa Hindia Belanda sampai Awal Kemerdekaan Indonesia*, Penerbit Narasi, Yogyakarta, 2011: Hlm. 74

di Pulau Kalimantan di pegang Angkatan Laut (Kaigun) oleh Minseifu (Dinas Administrasi Sipil Angkatan Laut). Selain mendaftar secara sukarela, perekrutan Kaigun Heiho juga diambil dari pelajar-pelajar Husu Ko Gakko (setingkat Sekolah Dasar), Sekolah Lanjutan, dan Sekolah Guru Kyooiin Yoo Seiayo.⁴ Organisasi-organisasi semi militer lain seperti Keibodan juga didirikan, namun dengan nama Borneo Konan Hokokudan yang bertugas untuk membantu tugas kepolisian. Sedangkan Seinendan yang merupakan organisasi barisan pemuda dibentuk dengan merekrut mereka yang berusia 14 hingga 29 tahun.⁵

Pendirian organisasi militer dan semi-militer di atas awalnya digunakan Jepang untuk memperkuat tentara mereka dari kalangan bumiputera. Sehingga segala daya upaya dikerahkan agar Jepang dapat memenangkan Perang Asia Timur Raya. Saat itu posisi tentara Jepang sudah mulai terdesak lewat kemenangan-kemenangan sekutu di berbagai palagan pertempuran. Negara fasis-militeristik tersebut cukup ketat dalam mengontrol kedudukan antara si Jepang dan non-Jepang dalam kedudukan dan kepangkatan. Akan tetapi nilai positif yang bisa diambil dari pembentukan ini ialah timbulnya rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan pemuda Indonesia. Bangsa ini pertama kali dan secara masif mendapatkan pendidikan militer yang modern dimana hal ini sulit didapatkan pada masa penjajahan Belanda.

Lambat laun rakyat mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada pendudukan Jepang. Banyak kewajiban-kewajiban yang ditetapkan pemerintahan militer Jepang yang sangat memberatkan bahkan terkadang bertentangan dengan keimanan umat muslim kala itu. Sebagai contoh masyarakat diharuskan melakukan seikerei yakni memberikan hormat dengan menundukkan kepala dan badan, mirip gerakan dalam ruku' saat sholat. Ketentuan seikerei ini menjadi permasalahan karena selain harus dilakukan ketika bertemu dengan tentara Jepang, juga dilakukan saat

⁴ Ahmad dkk, *op. cit.* Hlm, 72

⁵ Syafaruddin Usman, Isnawati Din, *Peristiwa Mandar Berdarah: Eksekusi Massal 28 Juni 1944 oleh Jepang*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta, 2009: Hlm. 29

pagi hari menghadap matahari yang sedang terbit di ufuk timur. Bahkan dahulunya di tempat yang sekarang bernama Alun-alun Kapuas, di depan Kantor Walikota Pontianak, terdapat sebuah tempat yang bernama Yasukuni Jinja dimana setiap orang yang melewati tempat tersebut wajib berhenti dan melakukan seikerei. Tempat ini dijaga oleh tentara, rakyat yang mengabaikannya akan ditampar hingga dipukuli.⁶

Ada pula ketentuan lain yang cukup memberatkan rakyat yakni kewajiban kinrohosi (kerja bakti). Saban minggu baik pelajar maupun rakyat yang dirasa cukup kuat dikerahkan Jepang untuk melakukan kerja bakti membangun infrastruktur baik keperluan sipil maupun militer. Pendirian sekolah-sekolah bagi bumiputera, kewajiban menyanyikan lagu-lagu Jepang, berbahasa dan menulis dalam tulisan Jepang, pentas kesenian Jepang, dan lain sebagainya mulai disadari rakyat jika hal tersebut semata diberikan sebagai suatu penetrasi kebudayaan agar rakyat memiliki cara berpikir dan bertindak layaknya orang Jepang (Jepangisasi).

Rakyat tidak punya pilihan lain, menolak program yang telah ditetapkan pemerintah pendudukan sama dengan bertemu dengan penyiksaan bahkan kematian. Pemerintah Kaigun tidak memberi ruang sedikit pun agar rakyat memiliki kebebasan berekspresi apalagi kegiatan politik. Hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di Jawa. Jepang kembali berjanji, lewat statement Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada 7 September 1944 mereka meyakinkan pemberian kemerdekaan itu akan segera diwujudkan. Pengawasan terhadap kaum pergerakan kebangsaan mulai diperlonggar, dan kemudian difasilitasi lewat pendirian Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan). Lagu Indonesia Raya sudah boleh dinyanyikan dan bendera merah putih juga diperbolehkan berkibar berdampingan dengan bendera Jepang. Bahkan petinggi Kaigun Laksamana Tadashi Maeda memfasilitasi tokoh nasionalis Indonesia seperti Sukarno dan Hatta dalam perjuangan kemerdekaan. Maeda juga mendirikan Asrama Indonesia atau sekarang bernama Gedung Menteng 31 sebagai aktifitas pemuda Indonesia menyongsong kemerdekaan.

⁶ Ahmad, *op.cit.* Hlm. 67

Sekali lagi hal ini tidak terlalu dirasakan di Kalimantan Barat. Rakyat justru semakin hidup susah baik kehidupan sosial maupun ekonomi. Di bidang sosial banyak penduduk Pontianak, terutama orang-orang Tionghoa menyingkir melarikan diri ke daerah pedalaman. Jalanan sepi dan seperti kota mati, terlebih malam hari. Tidak ada rakyat yang berani keluar rumah. Di bidang ekonomi juga tidak kalah mengkhawatirkan, sembako sangat susah didapatkan dan jika ada pun harganya sangat mahal. Pasar-pasar kehilangan keramaian karena Jepang menutup pengiriman kebutuhan pokok yang sebenarnya didatangkan dari seberang pulau. Singkat kata janji-janji kemerdekaan yang dihembuskan Jepang hanyalah isapan jempol di wilayah Kalimantan Barat dan justru yang tampak hanyalah kesengsaraan rakyat yang bertambah.

B. Organisasi Nissinkai dan Genosida Mandor

Pada tahun 1943 hingga 1944 akan dicatat dalam sejarah Kalimantan Barat menjadi hari tergelap dimana rasa kemanusiaan tidak diindahkan lagi sebagai nilai yang universal. Peristiwa ini dikenal dengan nama Peristiwa Mandor, sebuah genosida yang memusnahkan sekitar 20.000 jiwa dari golongan bangsawan hingga rakyat jelata. Bermula dari sebuah organisasi. Satu-satunya organisasi politik yang diperbolehkan oleh Jepang di Kalimantan Barat adalah Nissinkai. Organisasi ini mendapatkan restu dari pemerintahan pendudukan. Nissinkai dibentuk oleh Noto Soedjono (bergelar Raden Pandji Mohammad Dzubier) dan dr. Roebini. Nissinkai tampak seolah-olah memihak Jepang, oleh karena itu didukung oleh Syuutizityo Minseibu Izumi dan Komandan Teritorial Kaigun Letnan Kolonel Yamakawa serta perwira lain termasuk Tokkeitai.⁷ Arah pergerakan organisasi ini mirip seperti Gerakan 3A di Jawa. Akan tetapi di masa yang akan datang pemerintah pendudukan akhirnya melakukan pembersihan terhadap seluruh anggota organisasi ini yang bermula dari sebuah kecurigaan

⁷ Usman, Din, op.cit. hlm. 72

Pembersihan tersebut berasal dari kecurigaan Tokkeitai (Polisi Militer Khusus-Polisi Rahasia AL Jepang) terhadap adanya suatu gerakan persekongkolan anti Jepang di wilayah Kalimantan Barat. Adanya suatu gerakan ini sebenarnya reaksi atas kekejaman yang dilakukan Jepang dan digerakkan oleh sejumlah kalangan istana dan tokoh pergerakan dimana organisasi sebelumnya pada masa Hindia Belanda telah dibubarkan. Menurut Tokkeitai pergerakan ini bergerak secara bawah tanah (*incognito*) dalam Nissinkai, dengan hendak mendirikan negara Republik Rakyat Borneo Barat. Kaum pergerakan yang tergabung dalam Nissinkai, seringkali mengadakan rapat secara diam-diam agar tidak diketahui tentara Jepang. Pada tahun 1943 berbagai wilayah di Kalimantan Barat mulai terjadi huru-hara kecil sebagai reaksi rakyat atas kesulitan di masa Jepang.

Pada Juli 1943 tentara Jepang di Banjarmasin telah berhasil menghukum mati Dr. Bauke Jan Haga, bekas Gubernur Belanda di Borneo yang memimpin gerakan melawan Jepang dan mengeksekusi ratusan pengikutnya. Kekhawatiran Jepang akan adanya gerakan rakyat yang akan melawan juga dirasakan di Pontianak. Secara bertahap mulai dilakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang dicurigai dari berbagai kalangan. Pada 23 Oktober 1943, gelombang penangkapan dimulai dengan menahan 12 penguasa otonom feodal lokal (2 sultan dan 10 panembahan) di markas Tokkeitai. Beberapa kerabat dan tokoh-tokoh lain juga ditangkap dan tidak pernah kembali. Selanjutnya pada 24 Mei 1944 konferensi Nissinkai di Pontianak berubah menjadi ajang penangkapan akbar. Seluruh peserta yang hadir ditangkap, yang lainnya dituduh di rumah masing-masing pada dini hari.⁸

Pada hari Sabtu 1 Sitigatu 2604 atau 1 Juli 1944 koran Borneo Shinbun dalam halaman depannya mewartakakan dalam judul besarnya "Komplotan Besar yang Mendurhaka untuk Melawan Dai Nippon Sudah Dibongkar Sampai ke Akar-akarnya". Jepang mengumumkan telah melaksanakan aksi penangkapan dan menghukum mati mereka yang diduga berkomplot melawan dari tanggal

⁸ Ibid., hlm. 73

23 Oktober 1943 hingga 28 Juni 1944⁹. Tentang jumlah korban akibat kebiadaban Jepang ini belum ada angka yang pasti, namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara resmi menggunakan angka korban sebanyak 21.037 jiwa. Akan tetapi dalam persidangan Mahkamah Militer Sekutu di Pontianak yang dilaksanakan pasca perang, Soichi Yamamoto yang merupakan salah satu komandan Tokkeitai mengungkapkan target penangkapan yang direncanakan sebenarnya adalah 50.000 rakyat!¹⁰

Belakangan hari penangkapan ini hanyalah suatu isu yang dibuat-buat oleh Jepang. Tuduhan bahwa adanya gerakan yang ingin melakukan perlawanan dan membentuk Republik Rakyat Borneo Barat hanyalah kabar burung yang sengaja dicari-cari Jepang. Pasalnya, sejak zaman penjajahan Belanda pun tidak pernah ada organisasi, partai, ataupun lainnya yang berkeinginan hendak mendirikan suatu Negara Borneo Barat.¹¹

Hal ini juga diamini oleh Tsuneo Iseki seorang Jepang yang telah menetap di Kalimantan Barat pada 1928–1947 dan dapat berbahasa Indonesia. Tsuneo juga bertindak sebagai juru bahasa (penerjemah) dalam Mahkamah Militer Sekutu di Pontianak yang diselenggarakan pada rentang waktu tahun 1946–1947. Menurutny, sepanjang ia tinggal di Kalimantan Barat tidak pernah ada gerakan-gerakan untuk mendirikan Borneo Barat, juga pada masa Jepang tidak ada gerakan-gerakan untuk melawan. Menghubung-hubungkan peristiwa di Banjarmasin pada Juni 1943 dengan keadaan di Pontianak adalah hal yang sengaja dibuat-buat oleh Letnan Satu Yoshiaki Uesugi, komandan Tentara Jepang yang berkedudukan di Pontianak. Ia sendiri tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap rakyat Kalimantan Barat yang tidak tahu apa-apa. Tsuneo menangis saat mengetahui rakyat wilayah yang sudah dianggapnya seperti kampung halaman

⁹ Ibid., hlm. 47

¹⁰ Rikaz Prabowo, *Menolak Lupa: Peristiwa Mandor 1944, Pembantaian Jepang Terbesar di Indonesia*, diunduh dari www.senandika.web.id pada 10 September 2018

¹¹ Ahmad, op. cit. hlm. 82.

kedua ini dibantai dengan bengisnya.¹²

Akibat peristiwa itu, sebanyak dua belas kesultanan Melayu di Kalimantan Barat mengalami kegoncangan bahkan ada juga yang berakhir karena Sultan dan Panembahan mereka telah di pancung Jepang. Kaum terdidik di Kalimantan Barat habis, nyaris tidak tersisa terkena operasi sungkup. Rakyat kecil yang tidak tahu menahu juga harus meregang nyawa diujung bayonet tentara Jepang. Pembantaian tidak hanya terjadi di Mandor, namun juga terjadi di wilayah lain di luar Kalimantan Barat seperti Sambas, Singkawang, termasuk di Pontianak. Akan tetapi jumlah korban terbanyak ditemukan berada di Mandor yang dahulu hanya sebuah desa kecil.

Di Kalimantan Barat sendiri penyiksaan kepada rakyat juga dilakukan oleh para mandor perusahaan Jepang yang tentu saja di back up oleh militer mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Perusahaan Nomura yang bergerak di bidang pertambangan dan Perusahaan Sumitomo di bidang perkayuan. Kedua perusahaan tersebut masuk ke Kalimantan Barat melakukan eksploitasi kekayaan SDA bersamaan dengan masuknya tentara Jepang. Beroperasinya perusahaan itu memunculkan praktik kerja paksa atau romusha. Hal ini menjadi tragedi kelam berikutnya selain Peristiwa Mandor yang menggambarkan betapa menderitanya rakyat Kalimantan Barat di bawah cengkraman Jepang.

Penggerakan romusha untuk kepentingan ekonomi Jepang menyedot tenaga rakyat yang sangat banyak jumlahnya. Sebagai contoh, lokasi pertambangan Petikah yang terletak di sekitar hulu Sungai Bunut, Kapuas Hulu, memperkerjakan sekitar 70.000 pekerja yang sebagian besar adalah orang Dayak¹³. Para pekerja ini tidak diupah dan tidak mendapatkan asupan makanan yang layak. Alih-alih sejahtera, mereka yang terlihat malas bekerja akan dipukuli oleh tentara, sedangkan

¹² Dijolah dari surat kesaksian Tsuneo Iseki yang diterbitkan oleh Harian Sinar Harapan, Jumat, tanggal 23 April 1982, dalam Usman dan Din, op.cit. hlm. 54-66.

¹³ Nanang Sobirin, *Perang Dayak Desa dan Tewasnya Perwira Senior Jepang*, diunduh dari <https://daerah.sindonews.com/read/1167089/29/perang-dayak-desadandan-tewasnya-perwira-senior-jepang-1483099307/> pada 11 September 2018

yang tidak bisa bekerja akan dipukuli sampai mati. Sebenarnya tanpa disiksa oleh tentara Jepang pun para pekerja ini juga banyak yang mati dikarenakan berbagai sebab seperti malnutrisi, wabah penyakit, dan kecelakaan kerja. Tidak ada catatan pasti berapa jumlah pekerja tambang yang gugur di Petikah. Akan tetapi masa kerja pertambangan ini mulai dari awal tahun 1942 hingga tahun 1945 dan diperkirakan lebih dari 1000 pekerja telah menjadi korbannya.¹⁴

C. Perang Dayak Desa

Memasuki tahun 1945 perlawanan terhadap Jepang sebagaimana yang dituduhkan tempo hari ternyata benar-benar menjadi kenyataan. Akan tetapi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Nissinkai maupun Republik Rakyat Borneo Barat. Perlawanan juga bukan dimulai dari kota besar, tidak juga digerakkan oleh golongan feodal kesultanan ataupun kaum pergerakan, melainkan dimulai di Meliau dipimpin oleh pejuang Dayak pemberani, Pang Suma. Perlawanan ini kerap disebut Perang Dayak Desa karena dilakukan oleh Sub-suku Dayak suku Desa. Dinamakan perang sebab memang terjadi pertempuran antara pasukan Dayak Desa melawan tentara Jepang. Suatu pertempuran yang mempertemukan kekuatan tradisional melawan tentara Jepang yang modern.

Peristiwa ini dipicu oleh terbunuhnya Osaki, kepala perusahaan kayu Nitinan, di Kampung Sekucing Labai, Sungai Embuan, Meliau. Terbunuhnya Osaki sebenarnya akibat ulah ia sendiri yang mengancam akan memancung Pang Linggan apabila tidak juga menyetujui maksud kepala perusahaan itu untuk mempersunting anak gadisnya. Keesokan hari pada 13 Mei 1945 Pang Linggan bersama saudaranya (Pang Suma) dan tiga puluh orang berangkat hendak menemui Osaki. Tujuannya untuk bermusyawarah menanyakan maksud ancaman tersebut. Saat berhasil bertemu Osaki, belum juga pembicaraan dimulai serta merta Osaki menyerang Pang Linggan dan Pang Suma dengan popor senapan yang selalu ia bawa. Maka kelanjutannya dapat ditebak, perkelahian pun pecah dan berhasil menewaskan Osaki.

¹⁴ Usman, Din, *op.cit.* hlm. 82-84

Tewasnya Osaki merupakan suatu klimaks dari kondisi romusha yang amat memprihatinkan akibat bekerja di perusahaan kayu Nitinan pimpinan Osaki. Masyarakat Embuan yang direkrut bekerja di perusahaan itu sebenarnya sudah lama diperlakukan dengan kejam sehingga mendendam dengan Osaki namun tidak berani untuk melakukan perlawanan buruh/pekerja. Selanjutnya melalui suatu mufakat yang dilaksanakan dengan khidmat dan dihadiri oleh tetua adat diputuskan untuk terus berjuang mempersiapkan perlawanan lain terhadap Jepang. Untuk itu diedarkan lah Mangkok Merah untuk menggalang persatuan seluruh suku Dayak dan pernyataan akan dilaksanakan perang. Mangkok Merah merupakan sebuah alat konsolidasi dan mobilisasi pasukan lintas sub-suku Dayak yang efektif dan efisien. Mangkok Merah juga merupakan simbol dimulainya peperangan. Mangkok Merah diedarkan dari kampung ke kampung dan tidak boleh berhenti. Kampung yang dilewati Mangkok Merah harus siap sedia untuk perang dan membantu saudara-saudara mereka yang disakiti atau dibunuh.¹⁵

Ribuan suku dayak di seluruh pelosok Kalimantan Barat berkumpul di Balai Keramat Tiang Lima Bambu di Kampung Suak Tiga Belas, kebulatan tekad untuk perang melawan Jepang juga sudah diputuskan. Pasukan-pasukan Dayak ini kemudian lebih dikenal dengan Angkatan Perang Majang Desa (APMD) yang dikomandoi Pang Suma. Perlawanan dimulai dengan menyerang perusahaan-perusahaan milik Jepang yang mendapatkan perlindungan dari tentara Jepang. Setelah Osaki kini giliran Sutsugi yang tewas, ia merupakan pimpinan perusahaan Nichiran di perladangan hutan durian Pampang Sansat.

Kematian dua petinggi perusahaan Jepang yang notabene di back up oleh militer ini mengejutkan petinggi mereka di Pontianak. Mereka tidak menyangka, sekelompok pasukan tradisional dengan bersenjatakan mandau, parang, sumpit, hingga tombak mampu mengalahkan tentara Jepang yang modern dan terlatih. Seakan murka akan hal tersebut, pimpinan Jepang di Pontianak mengirimkan ekspedisi untuk menghabisi pasukan Pang Suma yang terdiri dari tentara Kaigun

¹⁵ Superman, *Peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan Barat Tahun 1967*, Jurnal Historia, Volume 5, Nomor 1, 2017: Hlm. 8

reguler, tentara Kaigun Heiho, dan Keibetai (Polisi Militer) yang dipimpin oleh Letnan Takeo Nakatani.

Ketika ekspedisi sampai di Tayan, Nakatani meminta keterangan kepada Bunken Kanrikan Miyagi agar dapat menuju Meliau, menurutnya hal itu bisa ditempuh dengan menyusuri Sungai Embuan. Nakatani tidak mengetahui bahwa pasukannya sudah ditunggu oleh pasukan Dayak yang memusatkan kekuatan dan pertahanan di Suak Tiga Belas. Pasukan Jepang pimpinan Takeo Nakatani ini terhenti di Desa Kunyil karena mendapatkan perlawanan dari pasukan Pang Suma.¹⁶ Seketika dalam suatu kesempatan terjadi pertempuran yang sebenarnya tidak seimbang, peluru senapan Jepang melawan anak sumpit, pisau bayonet melawan mandau dan parang. Akan tetapi siapa sangka? Lewat taktik gerilya hutan dan menguasai keadaan alam sekitar pasukan Dayak berhasil menghabisi pasukan Jepang. Bahkan Letnan Takeo Nakatani berhasil dipancung kepalanya oleh Pang Suma.

Korban lain dari pertempuran ini adalah Kaisu Nagatani yang merupakan seorang Keibetai pengelola perusahaan ekspedisi Jepang di Meliau. Ia beserta rombongan anak buahnya yang tersisa dihabisi Pang Suma dan Pang Djampi. Perusahaan ekspedisi yang ia kelola habis dibakar oleh pasukan Dayak. Ada satu korban Jepang lagi yang tewas dalam pertempuran ini, yakni Yamamoto alias Tuan Pentong. Diberi gelar sebagai Tuan Pentong karena terkenal dengan sikap buruknya yakni suka "mementung" pekerja di perusahaan Sumitomo Shokusan Kabushiki Kaisha (SSKK) apabila kedapatan malas bekerja, pulang ke rumah tanpa izin, atau melakukan kesalahan kecil. Yamamoto alias Tuan Pentong cukup dikenal seantero Sungai Embuan di Meliau karena perilakunya yang kasar itu. Pernah dalam riwayat ia memukul warga Kampung Suak Garong yang bernama Pang Rontoi, berusia lanjut, hanya karena tidak menemukan pekerja yang ia cari. Pekerja tersebut nekat pulang ke rumah karena terlampaui rindu dengan keluarga dan ingin mencari makanan layak yang ia tidak dapatkan di perusahaan milik Tuan Pentong. Tewasnya Tuan Pentong ini terjadi pada 13 Juni 1945

¹⁶ Herianto, Amanah Hijriah, *Sejarah Kerajaan Sanggau*, Balai Bahasa Kalimantan Barat, Pontianak, 2017: hlm. 9-10

Pada 24 Juni 1945, Pasukan Dayak pimpinan Pang Suma berhasil membebaskan daerah Meliau. Dengan begitu Meliau, yang kini merupakan suatu kota kecil setingkat kecamatan di Kabupaten Sanggau menjadi daerah yang berhasil dibebaskan dari Jepang, setidaknya hingga 30 Juni 1945. Meliau menjadi simbol kemenangan Pasukan Dayak melawan Jepang, suatu pertempuran yang cukup heroik dimana pasukan bersenjatakan tradisional bertarung melawan pasukan yang bersenjata modern. Pada 17 Juli 1945 Meliau kembali berhasil direbut Jepang lewat ekspedisi militer kedua. Ekspedisi kali ini membawa pasukan lebih besar baik lewat sungai maupun darat. Jepang sangat terkejut, Letnan Nakatani yang merupakan perwira senior dan kaya pengalaman tempur dapat dikalahkan oleh pasukan Dayak. Pang Suma sempat memberikan arahan kepada pasukannya agar mempertahankan Meliau mati-matian hingga titik darah penghabisan. Sayangnya Pang Suma, Pang Linggan dan Pang Ape gugur ditembak Jepang dalam pertempuran ini.

Gugurnya Pang Suma, Pang Linggan, dan martir perjuangan lainnya, nyatanya tidak membuat perlawanan terhadap Jepang surut. Memasuki bulan Agustus 1945 perlawanan terhadap Jepang justru makin menjadi, dari perlawanan secara sporadis berkambang menjadi gerilya semesta. Gencarnya perlawanan ini menyebar dari Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, Landak hingga Ketapang. Jepang sebenarnya berhasil mengembalikan kontrol pemerintahan di kota-kota tersebut, namun gagal dalam memadamkan perlawanan secara penuh.¹⁷

Sebagai contoh, pasukan Dayak berhasil memasuki Sanggau Kapuas dimana Sultan Sanggau Ade Muhammad Arief telah gugur dalam peristiwa Mandor dan wilayah itu dikuasai oleh Bunken Kanrikan berkebangsaan Jepang. Di Tayan Bunken Karikan Miyagi berhasil dipancung kepalanya oleh pasukan Dayak. Pasukan Dayak kemudian berhasil sampai ke Pontianak untuk memerangi Jepang, menuntut balas kematian panglima perang mereka di Meliau tempo hari. Waktu itu posisi Jepang di Kalimantan Barat khususnya Pontianak sudah lemah, tentara mereka kehilangan semangat berperang pasca pernyataan menyerah pada sekutu tanggal 14

¹⁷ Taufiq Tanasaldy, *Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia*, KITLV, Leiden, 2014: Hlm. 76-77

Agustus 1945. Tugas mereka kini hanya memelihara wilayah Indonesia dalam status quo sembari menjaga keamanan dan ketertiban.

Rakyat belum mengetahui soal kekalahan Jepang, seperti biasa siaran radio justru masih terus dipenuhi propaganda-propaganda kehebatan Jepang. Suatu hari pesawat bomber sekutu terbang rendah di langit Pontianak yang dikira hendak menumpahkan isi perutnya dengan ratusan kilo bom. Akan tetapi pesawat itu menumpahkan selebaran (pamflet) yang berisi informasi tentang kekalahan Jepang agar rakyat mengetahui perkembangan sebenarnya. Sayang, tentara Jepang langsung memungut atau merebut pamflet itu dari tangan rakyat sebelum sempat dibaca. Di lain hal tetap saja ada banyak pamflet yang tidak berhasil dipungut tentara Jepang dan berhasil dibaca oleh rakyat. Dari situlah rakyat tahu Jepang sudah kalah, namun tidak kuasa melawan karena masih kuatnya tentara mereka di Kalimantan Barat.

Rakyat hanya bersikap "pura-pura" tidak mengetahui kekalahan Jepang. Melawan atau menanyakan soal kekalahan dapat menyebabkan berbagai deraan hingga kematian bagi rakyat. Tanda-tanda kekalahan Jepang sebenarnya sudah dapat terbaca dari beberapa pertanda, yakni mulai jarangnyanya pasukan mereka mengadakan patroli dan hanya mengurungkan diri di tangsi saja. Bahkan saat pasukan Dayak itu datang ke Pontianak, mereka memilih mengurung diri. Rumah-rumah penduduk juga sudah diperbolehkan melepas penutup lampu yang diperintahkan Jepang agar cahayanya tidak menyembul ke atas. Dahulu pemasangan penutup lampu ini diperintahkan Jepang, bertujuan agar pesawat pengebom sekutu kesulitan menjatuhkan bom di malam hari karena gelapnya kota. Kemudian secara tiba-tiba Jepang mulai mengendurkan aktivitas politik kebangsaan Indonesia bahkan bendera merah putih boleh dikibarkan dan lagu Indonesia Raya sudah boleh dinyanyikan¹⁸.

¹⁸ Muzani A. Rani, *Nyala Sejarah di Bumi Kalimantan Barat*, Koleksi Pribadi, Pontianak, 1979: hlm. 44

Gugurnya Sultan Syarif Muhammad dalam Peristiwa Mandor, menyebabkan terjadinya kekosongan tahta di Kesultanan Pontianak. Pangeran Adipati Negara Syarif Usman Al-Qadrie dan adiknya Syarif Abdul Muthalib juga telah ditangkap Jepang bersama ayahnya. Sedangkan Sultan Hamid II tidak berada di Kalimantan Barat karena ia berdinastikan dalam tentara KNIL di Jawa dan masuk interniran Jepang. Ratu Perbu Wijaya dan Ratu Anom Bendahara yang merupakan putri Sultan Syarif Muhammad menolak untuk diangkat menjadi Sultanah. Zichiryo Hyogikai, Dewan Kerajaan yang menjadi semacam lembaga pengawas kesultanan seluruh Kalimantan Barat, berpikir perlu segera menemukan solusi agar permasalahan suksesi ini usai. Kemudian diadakanlah suatu rapat keluarga keraton yang ditengahi Zichiryo Hyogikai. Melalui suatu proses yang cukup alot akhirnya diangkat Sultan Syarif Thaha yang merupakan cucu Sultan Syarif Muhammad yang ketika itu berusia 18 tahun pada 29 Agustus 1945. Pengangkatan Sultan Syarif Thaha sebagai sultan untuk mengisi kekosongan Kesultanan Pontianak juga didukung oleh segenap kelompok pro-republik (termasuk APMD).¹⁹

Jepang kemudian menyerahkan seluruh tugas-tugas administratif dan pemerintahan kepada orang Indonesia. Mereka mengangkat Asjikin Noor menjadi residen yang baru sebagai pemimpin pemerintahan peralihan. Keterlibatan Zichiryo Hyogikai dalam pemilihan Sultan Pontianak yang baru, menjadi terakhir kalinya Jepang menjalankan tugas pemerintahannya. Setelah Jepang angkat kaki dari Kalimantan Barat, urusan keamanan menjadi hal yang darurat. Akan tetapi solusi mendirikan Penjaga Keamanan Oemoem (PKO) oleh Residen Asjikin Noor justru menjadi penyebab memanasnya tensi politik di Pontianak hingga terjadi bentrokan.

¹⁹ Syafaruddin Usman dalam *Kronologi Sejarah Pemerintahan Kesultanan Pontianak*, diunduh dari <http://www.kalbariana.web.id/kronologi-sejarah-pemerintahan-kesultanan-pontianak/> pada 13 September 2018

BAGIAN II

KAUM REPUBLIKEN BERGERAK

1. Perjuangan PPRI di Pontianak

Seperti layaknya di hari-hari awal proklamasi, Jepang melarang rakyat mendengarkan siaran radio. Jepang sengaja menutup-nutupi kabar proklamasi kemerdekaan yang telah dikumandangkan di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Akibatnya banyak penduduk yang mendengarkan radio secara sembunyi-sembunyi, termasuk M. Sukandar. Ia mendengarkan siaran radio di garasi sebuah rumah yang kini terletak di Jalan Merdeka, Pontianak. Sukandar memonitor siaran radio dari San Fransisco, Amerika Serikat yang menyiarkan ulasan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 19 Agustus 1945. Akan tetapi kabar ini tidak disebar luaskan oleh Sukandar karena memperhatikan posisi tentara Jepang. Ia hanya memberi tahu ke teman-teman dekatnya.¹

Berita proklamasi kemerdekaan akhirnya menyebar dari mulut ke mulut, selain juga dari tangkapan siaran radio secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan rakyat. Seperti biasa, proklamasi kemerdekaan disambut dengan suka cita rakyat yang telah lama mengidam-idamkan tanah airnya dapat berdiri sendiri bebas dari pejajahan. Hal ini akhirnya turut memunculkan sekelompok orang-orang yang bersimpati terhadap Republik Indonesia terutama kalangan pemuda. Mereka yang bersimpati terhadap Republik Indonesia secara umum dikenal sebagai kaum republiken.

Kaum republiken memiliki pandangan bahwa kesultanan-kesultanan atau daerah swapraja harus dihapuskan dan melebur ke dalam Republik Indonesia yang

¹ RM. Umar, dkk. *Melacak Jejak Sejarah Kalimantan Barat*, Penerbit C.V Derwati, Pontianak, 2017; hlm. 71

berbentuk negara kesatuan serta untuk mencapai demokrasi yang ideal. Untuk itulah Kesultanan Swapraja harus dihapuskan. Semula kaum republiken tidak ambil pusing terhadap kekosongan tahta Kesultanan Pontianak pasca diculik dan gugurnya Sultan Syarif Muhammad oleh Jepang. Akan tetapi di bulan Agustus 1945, pasukan Dayak-Majang Desa yang dipimpin oleh Panglima Burung telah memasuki Pontianak dan menuntut untuk diangkatnya Sultan Pontianak yang baru.²

Melihat adanya demonstrasi-demonstrasi yang dilancarkan pasukan Dayak untuk mengangkat sultan yang baru, hal ini coba dimanfaatkan oleh keluarga keraton dengan demonstrasi serupa agar dapat mempertahankan statusnya. Gerakan demonstrasi ini secara tersirat memperlihatkan sikap yang tidak sepakat dengan kaum republiken yang ingin menghapuskan kesultanan. Maka akhirnya diambil jalan tengah, lewat perundingan antara Muthalib Rivai dan Abu Hurairah Fattah bersama Panglima Dayak, akhirnya diambil keputusan untuk mengangkat Sultan Syarif Thaha Alkadri sebagai Sultan Pontianak yang baru dengan kesepakatan yakni:³

- a) Sultan Pontianak adalah Sultan Republik
- b) Secara resmi Sang Saka Merah Putih berkibar di Keraton
- c) Bahwa para Panglima Dayak yang datang di kota Pontianak adalah para Panglima yang memimpin pemberontakan terhadap Jepang selama 9 bulan di pedalaman Kalimantan sehingga tidak ada satu tentara Jepang pun yang berani masuk ke pedalaman.

Untuk lebih memantapkan gerakan-gerakan kaum republiken maka pada 15 September 1945 bertempat di rumah Djajadi Saman diadakanlah suatu rapat

² Syarif Abdurrahman Alkadri, *Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak*, Romeo Grafika, Pontianak, 2000: hlm. 184

³ Pasifikus Ahok, dkk. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 Daerah Kalimantan Barat*, Kanwil Depdikbud Kalimantan Barat, Pontianak, 1992, hlm. 51. tentang pemilihan Sultan Syarif Thaha Alkadri telah penulis uraikan di bagian sebelumnya

yang memutuskan untuk mendirikan organisasi Pemuda Penyongsong Republik Indonesia (PPRI). PPRI dipimpin oleh Muzani A. Rani dan wakilnya Djajadi Saman. Adapun susunan kepengurusan PPRI adalah sebagai berikut:⁴

Ketua	: Muzani A. Rani
Wakil Ketua	: Djajadi Saman
Sekretaris	: Ya' Umar Yasin
Wakil Sekretaris	: Ya' Ahmad Dundik
Bendahara	: Abu Hurairah Fattah
Pembantu (Personalia)	: Syukri Nour, H. Usman Amsyah, Hamdi Moursal M. Yusuf Ali

PPRI adalah organisasi yang berisi kaum republiken pertama di Kalimantan Barat. Dalam perjuangannya PPRI menggunakan jalur politik dengan agitasi dan propaganda kepada rakyat untuk menginsyafi bahwa Republik Indonesia telah merdeka dan harus dipertahankan, oleh karena itu Kalimantan Barat harus melebur bersama pemerintahan pusat di Jakarta dan berdiri sendiri menolak kehadiran kekuatan asing yang hendak kembali menjajah Indonesia. Untuk itulah PPRI juga bersikap anti-kooperasi terhadap NICA maupun Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) kedepannya.

Perjuangan PPRI yang lebih menggunakan cara-cara parlementer atau politik nyatanya dianggap sebagian kalangan republiken kurang revolusioner. Hal ini mendapat perhatian dari Uray Bawadi yang datang dari Mempawah. Bagi Bawadi, sikap perjuangan PPRI terlalu lembek menghadapi ancaman di depan mata akan berkuasanya kembali Belanda. Uray Bawadi ingin PPRI bersikap lebih progressif dengan mengorganisir mantan Kaigun Heiho untuk dibina kembali menjadi suatu

⁴ Tim Penyusun Naskah. *Naskah Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908-1950*, Pemerintah Daerah Tk. 1 Kalimantan Barat, Pontianak, 1989: hlm. 199

pasukan bersenjata.⁵ Singkatnya, Uray Bawadi menginginkan PPRI juga memiliki sayap militer yang memiliki pasukan-pasukan bersenjata dan siap digerakkan untuk melawan Belanda yang kembali ingin menjajah.

Akan tetapi usulan Uray Bawadi ini ditentang oleh dr. Soedarso yang sebenarnya memainkan peranan penting dalam pergerakan kaum republikan di Kalimantan Barat. Menurutnya, usulan Bawadi terlalu berisiko. Ia merasa sayang apabila banyak tenaga-tenaga pemuda harus hilang dikorbankan, mengingat bahwa Kalimantan Barat telah banyak kehilangan tenaga-tenaga yang baik (pasca Peristiwa Mandor Berdarah 1944). Selain itu, dr. Soedarso dan pemuka lainnya juga khawatir soal suplai kebutuhan pokok apabila diadakan suatu perlawanan terbuka terhadap Belanda. Hal ini kembali ditimpali oleh Uray Bawadi, menurutnya kekhawatiran itu terlalu berlebihan sebab apabila kekuasaan sudah berada ditangan pemuda, maka akan dilakukan pengumpulan bahan makanan dari daerah-daerah untuk menambah persediaan gudang. Selain itu Uray Bawadi juga menekankan pentingnya mengorganisir badan-badan keamanan bersenjata untuk kelanjutan perjuangan. Perdebatan-perdebatan demikian terus terjadi seakan tiada habisnya.⁶ Akan menjadi hal yang berbahaya apabila perdebatan ini terlalu menyita waktu hingga melupakan langkah-langkah yang akan ditempuh PPRI.

Sebagai langkah awal, PPRI mendesak Residen Asjikin Noor,⁷ dengan sebuah mosi untuk segera menyatakan bahwa wilayah Karasidenan Kalimantan Barat merupakan bagian dari RI. PPRI dan pemuda juga siap dibebani tanggung jawab persoalan keamanan di wilayah ini. Untuk itu diadakanlah pertemuan PPRI dengan Asjikin Noor agar mosi itu dapat diterima. Akan tetapi sikap dan tindak tanduk Asjikin Noor membuat pemimpin PPRI gerah, pasalnya sang residen tidak

⁵ Hassan Basry, *Kisah Gerilya Kalimantan*, Jajasan Lektur Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1961: hlm. 70

⁶ Ibid.

⁷ Asjikin Noor adalah residen yang diangkat oleh Jepang untuk memimpin Pemerintahan Peralihan karena Jepang ditugaskan oleh sekutu untuk menjaga *status quo* di Indonesia.

memperlihatkan sikap yang tegas dan berani. Dalam pertemuan itu Asjikin Noor memutuskan untuk "pikir-pikir dulu" dengan alasan kekuatan balatentara Jepang yang masih kuat di Pontianak dan ia sendiri belum dapat berhubungan langsung dengan pemerintah pusat di Jakarta.

Sikap mengulur-ulur waktu yang diperlihatkan Residen Asjikin Noor. Semakin diperparah dengan kabar segera mendaratnya Pasukan Sekutu di Pontianak dalam hitungan hari. Tentu ini akan menyulitkan perjuangan PPRI kedepannya. Untuk itu dilancarkanlah aksi menduduki kantor karasidenan yang berhasil dijalankan dengan damai dan tenang namun penuh kewaspadaan pada 20 September 1945. Selanjutnya PPRI mengeluarkan pengumuman yakni:⁸ 1) Daerah Kalimantan Barat adalah wilayah RI, 2) Rakyat Kalimantan Barat hanya patuh pada Pemerintah RI, 3) Mulai hari ini kami angkat Asjikin Noor sebagai Residen RI (di Kalimantan Barat) yang pertama.

Pada 14 Oktober 1945 Pasukan Sekutu (Australia) mendarat di Pontianak dibawah komando Letnan Kolonel Bless. Kedatangan sekutu menyebabkan ketegangan dengan kaum republiken seperti PPRI. Pimpinan PPRI yang dipimpin Muzani A. Rani melakukan kontak pada sekutu, menanyakan sampai kapan mereka berada di Kalimantan Barat dan mengingatkannya agar hanya fokus pada tugasnya untuk melucuti serta memulangkan tentara Jepang. PPRI menegaskan bahwa Kalimantan Barat merupakan bagian dari RI. Akan tetapi pimpinan sekutu ragu dan menantang PPRI untuk membuktikan kesetiaan rakyat pada RI. Tantangan itu disanggupi PPRI dengan meminta tempo waktu 24 jam untuk membuktikannya. Keesokannya tantangan itu dijawab PPRI dengan mengerahkan rakyat pada rapat umum di Lapangan Kebun Sayur dengan agenda pengibaran bendera Merah Putih. Ribuan rakyat hadir menyatakan mosi setia di belakang Pemerintah RI.⁹

⁸ Syafaruddin Usman, *Profil Sung Kim Liung: Pejuang Kemerdekaan RI Etnis Tionghoa, Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS)*, Pontianak, tanpa tahun: hlm. 14

⁹ Ahok dkk, *op.cit.* hlm. 48

Kedatangan sekutu ternyata juga memboncengi NICA dan juga Sultan Hamid II yang merupakan pewaris Kesultanan Pontianak. Masyarakat umumnya tidak terlalu mengenalnya, sebab sejak kecil lebih banyak dihabiskan di luar Pontianak. PPRI melancarkan ketidaksetujuan saat Sultan Syarif Thaha yang sudah dinobatkan akan digantikan oleh Sultan Hamid II. Pasalnya Hamid dianggap terlalu pro terhadap Belanda, sedangkan Sultan Syarif Thaha merupakan sultan yang diangkat berdasarkan konsensus antara kaum republiken, keluarga Keraton Kadriyah, dan masyarakat Dayak. Sultan Syarif Thaha adalah sultan yang bersedia berdiri dibawah RI dan dikenal bersimpati terhadap perjuangan kaum republiken.¹⁰ Upacara penobatannya sebagai Sultan Pontianak juga didahului dengan menaikkan bendera Merah Putih dan terus berkibar di halaman Keraton Kadriyah. Meskipun begitu Sultan Syarif Thaha akhirnya melepaskan tahtanya kepada Sultan Hamid II. Hamid dianggap lebih berhak karena keturunan langsung sultan sebelumnya yang dibunuh Jepang. Pada 23 Oktober 1945 ia dinobatkan menjadi Sultan Pontianak, tentu atas persetujuan NICA dan bendera sang saka Merah Putih juga telah berganti dengan Merah Putih Biru (Bendera Kerajaan Belanda).¹¹

Sehari sebelumnya pada 22 Oktober 1945, PPRI sangat terpukul atas penghianatan Residen Asjikin Noor. Sebagai orang yang telah diangkat oleh kaum republiken sebagai residen yang tunduk pada RI, Asjikin Noor malah menyerahkan kursi prestisius tersebut pada Dr. Van Der Zwall (NICA). Asjikin Noor diam-diam telah menjalin hubungan dengan NICA sejak awal tanpa diketahui PPRI. Penghianatan ini menyebabkan kekecewaan mendalam bagi kaum republiken terutama PPRI.¹² Pada 24 Oktober pimpinan PPRI diundang oleh Sultan Hamid II ke Keraton Kadriyah. Inti dari undangan itu ialah mengajak PPRI untuk bekerja sama dengan NICA dan menawarkan pembagian jabatan untuk tokoh PPRI. Terang saja ajakan Sultan Hamid II ini ditolak. Karena dianggap tidak dapat diajak kerjasama dan dinilai

¹⁰ Alkadri, *op.cit.*, hlm. 166

¹¹ Tim Penyusun Naskah, *op.cit.* hlm. 206-207

¹² Dwi Putra Nugraha, *Partai Politik Lokal di Indonesia: Analisis Kedudukan dan Fungsi Partai Politik Lokal 1955-2011*, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012: hlm. 116

akan mengacaukan Pemerintahan dibawah NICA, maka berangsur-angsur sejak 26 Oktober 1945 tokoh-tokoh PPRI dijebloskan ke dalam penjara.¹³

2. **Pertempuran Kecil atau Insiden?**

Dalam perkembangannya, PPRI membentuk Seksi Keamanan atas pertimbangan tidak adanya pasukan keamanan yang kredibel. Sebenarnya Asjikin Noor telah mendirikan Penjaga Keamanan Oemoem (PKO) yang terdiri dari orang-orang Indonesia dan Tionghoa. Banyak pemuda-pemuda Indonesia yang tergabung dalam PKO adalah eks Kaigun Heiho, Seinendan, maupun Keibodan. Sedangkan pemuda Tionghoa yang tergabung sebagian berasal dari Persatuan Anti Djepang (PAD) Gunung Pasi, Singkawang, yang merupakan gerakan bawah tanah Tionghoa yang melakukan perlawanan selama pendudukan Jepang. Dari sinilah gesekan di dalam PKO bermula hingga menyebabkan clash. Oleh karena sudah terdoktrin anti fasis, PKO etnis Tionghoa kurang sreg bekerja sama dengan PKO etnis Melayu yang sebagian besar didikan Jepang.¹⁴

Mereka menyebarkan berita bahwa tentara Republik China akan mendarat di Pontianak. Hal ini terang menyebabkan kegelisihan penduduk. Tersiar isu bahwa tugas pelucutan tentara Jepang di Kalimantan akan diurus oleh tentara China sebagai pemenang Perang Dunia II di Asia. Di setiap sudut Pontianak yang menjadi pusat perekonomian yang dikuasai Tionghoa maupun perkampungan mereka, berkibar bendera Koumintang dan gambar Presiden Chiang Kai Shek. Bahkan mereka berseloroh tentara China akan menjadikan Borneo Barat sebagai (provinsi) Republik China. Isu-isu murahan ini bahkan dibumbui oleh mereka untuk mematahkan semangat kemerdekaan kaum republiken, seperti isu Tentara China telah mendarat di Sungai Kakap.¹⁵

¹³ Tokoh-tokoh PPRI yang ditangkap pada tahap awal diantaranya Rajikin, Firdaus Said, Ya Ahmad Dundik, M. Akip, Abu Hurairah, Siregar Seritonga. Lihat Basry, op.cit. hlm. 72

¹⁴ Ibid., hlm. 71

¹⁵ Sarimin Minhad, Usman Amin, *Setetes Air di Padang Pasir: Sejarah Perjuangan Laskar BPIKB Afdeling Singkawang Tahun 1945-1949*, Penerbit Kalbar Indah, Singkawang, 2000: hlm. 17

Rakyat baru mengetahui, ternyata selama ini orang-orang Tionghoa memiliki senjata api yang disembunyikan saat masa Jepang. Sehingga ketika PKO terbentuk mereka dengan leluasa menenteng senapan maupun pistol berkeliling kota sehingga menimbulkan ketakutan bagi rakyat. Lagipula dalam praktiknya PKO hanya melindungi perkampungan Tionghoa dan pasar-pasar yang ramai pedagang dari kalangan mereka. Dengan mengenakan ban putih di lengan kanan bertuliskan "PKO" berwarna merah, juga dilengkapi dengan senjata tradisional berupa gada (pentungan kayu) dan trisula mereka dikenal memiliki militansi tinggi terhadap komunitasnya.¹⁶ Karena merasa dirinya lebih kuat, PKO Tionghoa sering kali berselisih paham dengan PKO Indonesia hanya karena hal sepele hingga berbuntut pemukulan terhadap PKO Indonesia maupun pemuda republiken.¹⁷ Dikemudian hari PKO malah didominasi oleh etnis Tionghoa dan diketuai oleh Ng Ngiap Liang setelah anggota-anggota PKO bangsa Indonesia mengundurkan diri.¹⁸

Hal lain yang menyebabkan terjadi clash antara PPRI dan PKO adalah karena adanya kabar burung yang terhembus entah darimana asalnya. Saat itu berkembang isu bahwa Pemerintah RI adalah jiplakan Jepang dan tindakannya kelak sama kejamnya dengan tentara Jepang sehingga harus dilawan.¹⁹ Kemudian juga ada isu yang berawal dari hasutan NICA bahwa untuk tidak lagi menggunakan uang Jepang karena tidak ada harganya lagi. Isu ini termakan mentah-mentah oleh orang-orang Tionghoa, maka uang Jepang yang mereka anggap tidak ada nilainya itu dibuang ke jalanan. Penduduk Tionghoa, khususnya yang berprofesi sebagai pedagang juga melakukan blokade ekonomi dengan tujuan agar orang-orang Indonesia (*bumiputera*) kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari-hari.²⁰

¹⁶ M. Yanis, *Kapal Terbang Sembilan: Kisah Pendudukan Jepang di Kalimantan Barat*, Yayasan Perguruan Panca Bhakti, Pontianak, 1983: hlm. 226

¹⁷ Yu' Ahmad dkk, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Barat*, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 1984: hlm. 107

¹⁸ Nugraha, *op.cit.*, hlm. 116

¹⁹ Ahok dkk., *op.cit.* hlm. 51

²⁰ Nawiyanto (Ed.), *Menegakkan Kedaulatan dan Ketahanan Ekonomi: Bank Indonesia Dalam Pusaran Sejarah Kalimantan Barat*, Bank Indonesia Institute, Jakarta, 2019: hlm. 120

Peristiwa yang memantik pecahnya clash diawali dari terbunuhnya seorang anak berusia 14 tahun oleh seorang Tionghoa dengan ditombak di kawasan Pasar Parit Besar. Seorang Tionghoa kemudian juga terbunuh sebagai aksi balas dendam di tempat itu. Tidak disangka perkelahian ini ternyata meluas dan membawa dampak negatif bagi keamanan kota. Jalanan menjadi sepi dan toko-toko Tionghoa tutup, tiada rakyat yang berani keluar rumah karena takut. Pemerintah akhirnya menugaskan PPRI untuk mengamankan kota dan langsung menjalankan tugas. PPRI dianggap pas mengambil peran pengamanan kota sebab banyak beranggotakan pemuda eks-Kaigun Heiho. Rupanya hal ini dianggap sebagai tantangan, alhasil PKO Pontianak memutuskan mencari bantuan ke PKO Singkawang lengkap dengan senjatanya.²¹

Dalam waktu singkat ketegangan pecah di awal Oktober 1945, disebabkan adanya suatu upaya penyerangan dengan senjata api maupun senjata tajam terhadap Usmanyar dan A. Hamid Zainuddin yang merupakan eks-Kaigun Heiho di depan Bioskop Abadi yang masih di kawasan Parit Besar. Pelakunya adalah orang-orang Tionghoa yang memang menguasai pasar itu, diduga anggota PKO. Sedangkan kedua pemuda eks-Kaigun Heiho tersebut merupakan simpatisan PPRI.²² Berita ini cepat tersebar dan akhirnya meletupkan pertempuran antara PKO dengan PPRI. Akibatnya tiga orang anggota PKO gugur, pasar-pasar yang merupakan pusat ekonomi orang Tionghoa dihancurkan serta banyak juga penduduk mereka yang mengungsi. Pola seperti demikian ternyata juga terjadi di Singkawang dimana PKO di kota itu juga berselisih paham dengan kaum republiken.²³

Keduanya pihak akhirnya sadar bahwa tindakan mereka sebenarnya hanya membawa kerugian bagi diri sendiri. Ketegangan baru dapat diredakan

²¹ Ahok, dkk, *op.cit.* hlm. 52.

²² Minhad, Amin, *op.cit.* hlm. 18

²³ Nugraha, *op.cit.* hlm. 117

setelah kedua pemimpin tokoh ini bernegosiasi,²⁴ dan didapatkan suatu keputusan yakni, 1) Bahwa saling bunuh membunuh segera dihentikan, 2) Supaya PKO ditarik mundur, 3) Pembukaan kembali pasar-pasar. Negosiasi ini dilakukan saat pasukan Sekutu (Australia) telah mendarat sejak tanggal 14 Oktober 1945. Pengumuman hasil negosiasi ini akhirnya disosialisasikan berkeliling oleh kedua belah pihak dengan diawasi oleh seorang perwira tentara Australia. Kondisi keamanan akhirnya kembali kondusif.²⁵

3. Barisan Kuntji Waja

Penangkapan petinggi PPRI secara bertahap di Pontianak sejak 26 Oktober 1945 nyatanya tidak membuat sejumlah pemuda-pemuda republikan yang telah sadar akan kemerdekaan Indonesia menyerah dan mempasifkan gerakan mereka. Sekuat apapun NICA menangkap para petinggi PPRI, masih banyak puluhan anggota PPRI yang berhasil menyelamatkan diri. Justru malah berhasil menciptakan kader-kader baru yang jauh lebih militan. Pada 17 November 1945 para pemuda yang militan itu, mendirikan kesatuan Barisan Kuntji Waja (BKW) di Pontianak dengan susunan pengurus sebagai berikut:²⁶

Penasihat	: dr. M. Soedarso, Rd. Soekotjo Katim
Pimpinan	: Syarif Alwi AMS
Penghubung	: AS Djampi
Staf	: A. Bakar Salman, Mardjuan Somandipa, Rahmad Omar, Tarmidji Ramlan, Muhammad Sairin, A. Karim SM, M. Ali Budjang, Chaerul A. Rasjid, dan A. Rachmad Zakaria

²⁴ Dalam negosiasi/perundingan tersebut PPRI diwakili oleh Abu Hurairah dan Syukri Nour, sedangkan dari pihak Tionghoa dan PKO diwakili Ng Nyiap Liang dan Mr. Lee Tang Kuang. Lihat Tim Penyusun Naskah, *op.cit.* hlm. 204

²⁵ Ahok, *loc.cit.*

²⁶ Syafaruddin Usman, *Dari Koubou ke Kubu Raya*, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pontianak, 2010: hlm. 29

BKW menolak bekerja sama dengan NICA atau dalam hal ini nonkooperatif, konsep perjuangan yang dianut pimpinannya antara lain:²⁷

- a. Menyatukan eks-Kaigun Heiho yang ada di Pontianak dan sekitarnya
- b. Menyatukan langkah perjuangan dalam kelaskaran dengan latihan kemiliteran
- c. Mengadakan kontak dengan tentara KNIL dan Polisi Belanda yang berasal dari Bangsa Indonesia yang jelas memihak perjuangan BKW dan Republik
- d. Mengirim beberapa orang delegasi ke Jakarta untuk menentukan sikap rakyat Kalimantan Barat terhadap Pemerintah RI.

Sebagai badan perjuangan BKW mencoba menjalin hubungan dengan badan perjuangan pro Republik Indonesia lain di seluruh Kalimantan Barat agar tercipta kesatuan visi dan gerakan. Pimpinan BKW mengirim M. Ali Budjang ke Sambas, A. Rachman Zakaria ke Landak ke Landak, dan Muhammad Sairin ke Sintang. Awal tahun 1946 BKW telah memiliki hubungan kontak yang luas dengan pejuang lain di luar Pontianak. Pejuang dari sekitar Singkawang seperti A. Hamid Hasan (BPIKB) juga bergabung dengan BKW setelah meloloskan diri dari upaya penangkapan aparat NICA. Pada 17 Agustus 1946, untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, BKW merencanakan pemberontakan bersenjata. Akan tetapi belum juga pemberontakan itu meletus, aparat NICA telah melakukan pengejaran pada anggotanya.²⁸ Diduga rencana pemberontakan ini telah dibocorkan oleh orang-orang telik sendi yang banyak disebarkan NICA. Penangkapan ini membuat keorganisasian BKW berantakan hingga akhirnya memindahkan pusat aktivitasnya di Sungai Kakap.

²⁷ Tim Penyusun Naskah, *op.cit.* hlm. 233

²⁸ Usman, *op.cit.* hlm. 30

4. BPRI Antibar – Mempawah

Perlawanan terhadap posisi-posisi NICA dan aparatnya juga terjadi di Mempawah. Meskipun berjarak sekitar tujuh puluh lima kilometer dari Pontianak, namun Mempawah masih masuk dalam Afdeling Pontianak. Kabar kemerdekaan Indonesia telah didengar para pemuda di Mempawah pada akhir Agustus 1945 dari utusan-utusan PPRI Pontianak. Seiring dengan kabar kemerdekaan tersebut, pemuda-pemuda yang dulunya aktif di kepanduan Surya Wirawan maupun eks Kaigun Heiho mulai mengadakan pertemuan. Pertemuan itu membahas langkah-langkah konkrit soal perlunya dibentuk suatu organisasi untuk menjaga semangat revolusi kemerdekaan Indonesia. Termasuk persoalan akan kembali berkuasanya Belanda (NICA) yang akan menjajah Mempawah.

Pada Oktober 1945, NICA dan seluruh perangkat pemerintahannya termasuk aparat militernya telah kembali berkuasa di bawah pimpinan Controleur Y. van Apvel. Maka dengan demikian usaha-usaha untuk melawan Belanda harus segera diwujudkan demi kembali menegakkan panji-panji kemerdekaan. Pada 30 Oktober 1945 pemuda-pemuda republiken di Mempawah membentuk Badan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI). Organisasi ini lebih dikenal dengan BPRI Antibar (BPRIA), merujuk pada suatu desa sebagai tempat didirikan dan bermarkasnya organisasi, yakni Desa Antibar di sebelah timur Mempawah. BPRI bergerak secara bawah tanah dengan tujuan utama untuk menyebarkan dan menanamkan kesadaran untuk mewujudkan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Adapun susunan kepengurusan BPRIA adalah sebagai berikut:²⁹

Penasehat : 1) H. Daiman Hamad, 2) Gusti Mustaan, 3) H. Thalib HD, 4) H. Bujang Saleh 5) Sulaiman Said, 6) Nanong Usman, 7) H. Djamil H. Jahja

²⁹ Keterangan Ilyas Suryani, eksponen BPRIA, dalam Tim Penyusun Sejarah Lisan, *Transkrip Wawancara Sejarah Lisan Tentang Pembakaran Jembatan Wilhelmina Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak*, Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, 2003: hlm. 9

Pimpinan	: M. Zainal Abidin
Wakil Pimpinan	: R.M. Mahmud
Pimpinan Pasukan	: Abdul Kadir Mahmud
Anggota	: Kurang lebih 150 orang

Melihat susunan kepengurusan di atas, keberadaan BPRIA mendapat dukungan kuat dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat dan dari golongan kesultanan. Seperti dilihat dari susunan penasehat, terdapat nama Gusti Mustaan yang tidak lain adalah Wakil Panembahan Kesultanan Mempawah. Gusti Mustaan menggantikan Gusti Muhammad Taufik Accamuddin yang gugur dibantai Jepang pada 1944. Gusti Mustaan menggantikan sementara Gusti Jimmi Muhammad Ibrahim yang seharusnya menjadi sultan menggantikan ayahnya karena belum cukup umur. Dengan demikian pihak Kesultanan Mempawah di balik layar mendukung pergerakan kaum republikan namun juga menjaga hubungan baik dengan NICA a la kadarnya agar tidak mengundang kecurigaan.

Perjuangan BPRIA memang tidak memusatkan pada perlawanan fisik atau bersenjata karena kurangnya personil dan persenjataan. Akan tetapi badan perjuangan ini menggunakan usaha-usaha yang lebih bertujuan menyulitkan NICA di Mempawah. Untuk meningkatkan kesadaran membela kemerdekaan, kader-kader BPRIA memasang plakat-plakat anti NICA di berbagai penjuru kota. Isi plakat yang penuh propaganda itu cukup membuat muka pemerintah NICA memerah dan kemudian mencopotnya. Menurut Ilyas Suryani, eksponen BPRIA, organisasi itu juga melakukan beberapa sabotase seperti sabotase ruas jalan yang biasa dilalui konvoi tentara NICA dan sabotase Pasar Cina. Sabotase yang paling fenomenal ialah ketika BPRIA melakukan sabotase Jembatan Wilhelmina di Kuala Sungai Mempawah pada 14 September 1946³⁰. Hal ini akan dibahas lebih lanjut di bagian selanjutnya.

³⁰ Ibid.

5. Insiden Bendera di Sambas

Penolakan demi penolakan terhadap kedudukan NICA terus dilancarkan kaum republikan dengan berbagai aksi rakyat, termasuk di Sambas. Pada 15 Oktober 1945 di Sambas berdiri organisasi Persatuan Bangsa Indonesia (PERBIS) pimpinan Haji Siradj Sood. Secara umum PERBIS memiliki tujuan dan pergerakan yang tidak jauh berbeda dari PPRI di Pontianak. Pada 20 Oktober 1945, Pasukan NICA yang terdiri dari KNIL dan Korps Speciale Tropen memasuki Sambas untuk kembali membangun pemerintahan dan tugas-tugas keamanan. Pasukan ini dipimpin oleh Kapten Van Der Schoore serta Sersan Mayor Blok.³¹

NICA mencoba menjalin komunikasi dengan PERBIS agar dapat bekerjasama, namun ditolak oleh H. Siradj Sood yang dalam sanubarinya teguh dibelakang RI. NICA juga membagi-bagikan beras dan sembako kepada rakyat dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan serta melunturkan jiwa kemerdekaan yang sebelumnya ditanamkan oleh PERBIS. Pada 26 Oktober 1945 rombongan PERBIS yang dipimpin Siradj Sood mendatangi kantor Controleur Sambas untuk menanyakan tindakan NICA yang kembali mengibarkan bendera Belanda dengan menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka. Pertemuan ini menemui jalan buntu dan membuat para pemimpin PERBIS kesal.³²

Pada malam harinya, PERBIS melakukan rapat kilat dengan keputusan untuk melakukan demonstrasi di kantor Controleur Sambas pada 27 Oktober 1945. Pagi hari di tanggal 27 Oktober 1945, para pemimpin PERBIS dan seluruh simpatisannya termasuk rakyat berkumpul di depan Gedung Bioskop Indonesia Theater, jumlahnya sekitar 300 orang. Dengan melakukan pidato terlebih

³¹ Aan, *Peran Haji Siradj Sood Pada Peristiwa Pengibaran Bendera Merah Putih 27 Oktober 1945 di Sambas*, Skripsi, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak, Pontianak, 2014: hlm. 60. Salah satu unit Pasukan NICA-Belanda yang datang ke Sambas ialah pasukan *Korps Special Tropen* (KST) yang dikenal sebagai pasukan khusus Tentara Kerajaan (*Koninklijk Leger*). Pasukan ini dikenal dengan menggunakan Baret Merah dan seragam loreng.

³² Ibid. hlm. 69

dahulu, Siradj Sood coba membakar semangat kaum-kaum republikan untuk tetap yakin bergerak mengusir NICA dari Sambas. Massa aksi bertambah setelah siswa Vervolkschool dari kelas empat sampai enam digerakkan untuk mengikuti demonstrasi. Sementara anggota PERBIS eks Kaigun Heiho lebih dulu turun untuk memastikan keamanan di jalur yang akan dilalui menuju kantor Controleur.

Setibanya di kantor Contoleur, ternyata hanya terdapat seorang pejabatnya yang bernama Rudolf Van Der Lief (Komandan PKO). Ia juga dikenal sebagai Tuan Dolop (penyebutan dari nama Rudolf). Pasukan PKO di Sambas juga mirip seperti di Pontianak yang didominasi oleh etnis Tionghoa, sehingga tidak terlalu mendapatkan simpati dari rakyat karena terkenal sombong. Sementara itu pejabat-pejabat NICA di Sambas lainnya telah pergi ke Singkawang pada malam tanggal 26 Oktober 1945 untuk menghadap Asisten Residen. Semula aksi demonstrasi PERBIS dan rakyat Sambas ini berjalan lancar. Akan tetapi pertumpahan darah justru terjadi pertama kali karena tindakan Van Der Lief yang tiba-tiba keluar dari kantor Controleur sambil mengacungkan pistol. Beruntung pistol tersebut tidak meletus, dan ia pun langsung menjadi bulan-bulanan para anggota eks Kaigun Heiho. Van Der Lief tewas di tempat dan mayatnya dibuang di dekat kantor.

Setelah tewasnya komandan PKO tersebut, bendera Belanda segera diturunkan dan diganti dengan bendera Merah Putih. Aksi massa PERBIS kemudian dilanjutkan dengan menuju ke Istana Kesultanan Sambas Alwatziekubillah. Tujuannya masih sama, yakni mengibarkan sang Merah Putih di halaman Istana Sambas. Sayangnya aksi di Istana Sambas ini tidak berjalan lancar, Tentara NICA datang di Istana Sambas sebelum bendera berhasil dikibarkan. Saat massa bergerak ke Istana sekitar pukul sebelas siang dan melewati Jembatan Pendawan, H.M Basiuni Imran tampak bergegas mengendarai sepeda berteriak mengabarkan bahwa tentara NICA telah datang dan menyusul di belakang mereka.³³

³³ Tim Editor, Bayu Prakoso, *Peristiwa Pengibaran Bendera Merah Putih di Istana Sambas*, Bunga Rampai Karya Tulis Ilmiah Sejarah/Budaya Kalimantan Barat, Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kota Pontianak, Pontianak, 2012: hlm. 98.

Kedatangan NICA di Istana Sambas ini memang di luar prediksi PERBIS, sebab di kantor Controleur saja tidak didapati pejabat lainnya selain Van Der Lief. Rupanya di dalam kaum republiken itu sendiri terdapat penghianat yang telah membocorkan aksi demonstrasi di kantor Controleur kepada NICA. Menurut keterangan Haji Zulkifli, salah satu anggota PERBIS sebagaimana dikutip dari Aan, orang itu diidentifikasi bernama Raden Sirad.³⁴ Di sisi lain massa sudah menyemut di halaman Istana mendengar siraman semangat (pidato) Siradj Sood yang tajam. Setelah itu bendera merah putih pun diperintahkan untuk segera dikibarkan. Sayang, Pasukan NICA keburu datang dan menutup akses gerbang masuk halaman istana.

Ketegangan segera menyelimuti seisi halaman Istana Sambas, Komandan Tentara NICA Van Der Schoors meminta massa membubarkan diri dan segera menyerahkan bendera Merah Putih. Dibawah bidikan senjata pasukan NICA, massa aksi tetap teguh pada pendiriannya untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Tidak tampak sedikit pun raut muka dan keciutan nyali di wajah pemuda-pemuda republiken maupun PERBIS. Kesabaran habis, pasukan NICA menembak Siradj Sood dan Tabrani Ahmad yang dengan segala risikonya, berjalan terkulai, meringis kesakitan tetap berusaha mengibarkan bendera Merah Putih di Istana Sambas.

Tabrani Ahmad gugur seketika setelah menerima tembakan dan lehernya ditusuk bayonet. Sementara Siradj Sood mengalami luka parah karena tertembak punggungkannya hingga menembus dada kanan. Melihat arah tembakan ini, maka dengan pengecutnya Siradj Sood ditembak dari belakang oleh NICA. Aksi menembak tersebut membuat suasana di Istana Sambas kacau, dan dengan sendirinya para massa aksi berlarian menyelamatkan diri.³⁵ Tabrani Ahmad dimakamkan tidak lama setelah itu, sedangkan Siradj Sood berhasil pulih dari lukanya. Anggota PERBIS yang lain, Sapali, juga gugur setelah Tentara NICA menembaknya saat melarikan diri dari insiden itu. Keesokan harinya tanggal 28 Oktober 1945 Tentara NICA yang terdiri

³⁴ Aan, *op.cit.*, hlm. 77.

³⁵ Ibid. hlm. 82.

dari unsur Korps Speciale Troopen, KNIL, dan dibantu Polisi Belanda melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang tergabung dalam PERBIS. Di antaranya Uray Abdul Hamid Mahmud, Uray Saidi, Hamidi A. Rahman, Daeng Zayadi, dan Naim A. Razak. Jam malam juga diberlakukan oleh Pemerintah NICA, pelanggarnya akan ditangkap apabila tetap nekat melanggar peraturan ini.³⁶

6. Perjuangan Rahadi Usman di Ketapang

Terhitung kurang lebih sejak dua bulan proklamasi Indonesia dikumandangkan, berita akan kemerdekaan belum juga sampai hingga ke pelosok negeri. Di Kalimantan Barat sendiri saja hingga bulan Oktober 1945 belum seluruh rakyat mengetahui akan kabar kemerdekaan Indonesia. Kalau pun rakyat sudah tahu, mereka juga belum sepenuhnya paham apa buah manis dari kemerdekaan tersebut. Hal ini akhirnya mendorong pemerintah untuk mengirim misi ekspedisi pembawa kabar kemerdekaan ke pelosok negeri, termasuk dengan tujuan ke Kalimantan Barat oleh rombongan Rahadi Usman.

Rahadi Usman bukanlah orang sembarangan. Ia mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta asal Pontianak. Pendidikannya ia tempuh mulai dari ELS di Pontianak dan HBS Koning Willem III di Jakarta (1937). Ayahnya, Ismail Osman memiliki status sosial tinggi kala itu, selain sebagai pengusaha ternama juga duduk sebagai sekretaris dalam organisasi Persatuan Anak Borneo (PAB). Oleh sebab itu tidak heran ia bisa disekolahkan di institusi yang sebenarnya hanya untuk kalangan ningrat dan Belanda. Sebenarnya tanpa ikut serta atau bersusah payah, ia tidak perlu ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia karena status sosial dan karirnya yang cemerlang kelak. Akan tetapi sebagai orang yang terpelajar dan paham akan nilai-nilai kemanusiaan dan kebebasan, rasa nasionalismenya kian tumbuh.

³⁶ Syafaruddin Usman, *Sambas Merajut Kisah Menenun Sejarah*, Pemerintah Kabupaten Sambas, Sambas, 2010: hlm 184-185

Posisinya di Jakarta membawa ia terikut arus pergerakan kemerdekaan Indonesia, antara lain Kepanduan Bangsa Indonesia. Asramanya di Jalan Prapatan 10 Jakarta menjadi markas rahasia yang sering digunakan oleh pemuda pelajar-mahasiswa sebagai pusat kegiatan dan perjuangan kemerdekaan menjelang proklamasi Indonesia. Hal ini menjadikan tempat itu sebagai lokasi yang menjadi pantauan Kempeitai. Ia juga akhirnya tergabung dalam organisasi Angkatan Pemuda Indonesia (API) pimpinan Chairul Saleh. Setelah proklamasi kemerdekaan di proklamirkan, ia diperintahkan oleh Chairul Saleh menyusup ke Stasiun Radio Hosokyoku yang dijaga ketat Jepang dan menyiarkan berita proklamasi bersama Des Alwi dan Ridwan.³⁷ Sayang, ia tertangkap pasukan Jepang ketika hendak menyelip masuk stasiun dan hampir dibedil. Untunglah lewat negosiasi ia bersama kedua rekannya itu dibebaskan.

Dengan bergabung dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Rahadi Usman memutuskan untuk melanjutkan perjuangan membela kemerdekaan di Kalimantan Barat. Rahadi dan rombongan menjadi misi ekspedisi resmi pertama pemerintah Republik Indonesia yang telah mendapatkan dukungan dari Gubernur Ir. Pangeran Mohammad Noor dan Menteri Pertahanan Mr. Amir Syarifuddin. Rahadi Usman dan Machrus Effendi juga mendapat mandat untuk boleh menggunakan senjata dan membentuk TKR serta pemerintahan setempat.³⁸ Pada 23 November 1945 berangkatlah rombongan ekspedisi yang dipimpin Rahadi Usman dengan berjumlah 43 orang, dari pelabuhan Tegal bertolak menuju Ketapang dengan menggunakan kapal KM Sri Kayong. Sebenarnya masih ada satu rombongan lagi dengan kapal K.M Osaka pimpinan H.A Kadir yang direncanakan mendarat di utara Ketapang.

Pada 30 November 1945 rombongan ekspedisi mendarat di Sungai Besar, sekitar 20 kilometer dari kota Ketapang. Karena misi utama rombongan bukan untuk bertempur, Rahadi Usman sempat mengadakan hubungan dengan penduduk

³⁷ Gusti Eka, *Gugur Membela Sang Saka*, Pontianak Post Online tanggal 17 Agustus 2017, diunduh dari <https://www.pontianakpost.co.id/gugur-membela-sang-saka/page/0/1> pada 21 Oktober 2018

³⁸ *ibid.*

dan mengabarkan bahwa Indonesia telah merdeka. Akan tetapi Ketapang sudah dikuasai NICA. Meskipun begitu rakyat yang bersimpatik akhirnya ikut berjuang dalam kelompok Rahadi Usman. Dengan persenjataan yang minim dan seadanya, namun dengan kebulatan tekad untuk menegakkan panji-panji kemerdekaan, kelompok Rahadi Usman berencana untuk bergerak menuju kota Ketapang dan mendudukinya. Sayang, rencana ini diketahui Pasukan NICA dan terjadilah pertempuran yang tidak seimbang pada 7 Desember 1945. Dua serdadu NICA tewas dan tiga orang kelompoknya gugur. Sisa-sisa kelompok terus melakukan perlawanan bertahan hingga akhirnya turut menggugurkan Rahadi Usman.³⁹

Akibat peristiwa ini rombongan menjadi kacau dan terpecah. Ada yang tetap di Ketapang dengan menyingsing ke hutan dan melakukan gerilya, ada yang melarikan diri ke tempat persembunyian, namun tidak sedikit juga yang memilih kembali ke Jawa.⁴⁰ Rahadi Usman pernah berpesan sebelum ia gugur, agar menguburkan dirinya di tempat jatuhnya tetes darahnya yang terakhir. Wasiat ini dilaksanakan oleh sisa kelompoknya, ia dimakamkan di daerah Sungai Besar. Di kemudian hari pemerintah memindahkan kerangka jenazahnya bersemayam dengan layak dan tenang di Taman Makan Pahlawan Ketapang.

Gugurnya Rahadi Usman dan anggotanya nyatanya tidak menghentikan upaya-upaya untuk membebaskan Ketapang dari cengkraman NICA. Di wilayah Kendawangan pada 12 Desember 1945 sejumlah laskar pimpinan Abdul Rahim Galeng melakukan serangan ke markas Tentara NICA. Mereka menyerang layaknya banteng yang mengamuk, dengan semangat baja menerjang masuk ke markas NICA meski mengetahui kalah dari persenjataan dan personil. Alhasil banyak anggota laskar yang gugur dan seakan tidak mau ambil pusing dengan penguburannya, tentara NICA membuang jasad 'kesuma negara' itu ke laut.⁴¹

³⁹ Umar dkk, *op.cit.* hlm. 75

⁴⁰ Basry, *op.cit.* hlm. 44

⁴¹ Tim Penyusun Naskah, *op.cit.* hlm. 244

Pasukan atau kelaskaran dari Jawa juga kembali datang ke Ketapang dalam sebuah ekspedisi, sekitar Januari 1946 datang pasukan bersenjata lengkap pimpinan Letnan Mazwar dan Letnan Hindun. Kedatangan mereka membawa misi untuk memobilisasi rakyat agar dapat mendukung perjuangan. Pada 2 Februari 1946 ekspedisi dari Jawa kembali akan mendarat tepatnya di Kuala Jelai, Sukamara, Ketapang dipimpin Husein Hamzah dan Firmansyah dari Laskar Sabilillah. Sayangnya belum juga perahu ditambatkan, di sepanjang pesisir pantai itu pasukan Sabilillah harus menghadapi perlawanan sengit dari NICA yang berpatroli menggunakan kapal perang. Peristiwa ini menggugurkan Husein Hamzah, namun Firmansyah dan anggota laskar lainnya selamat, mendarat dan kemudian mulai masuk hutan untuk bergerilya.⁴²

⁴² Ibid., hlm 245

BAGIAN III

MISI MEMBEBAKAN BENGKAYANG

1. Bermula di Singkawang

Kota Bengkayang terletak sekitar 212 kilometer sebelah utara Kota Pontianak yang kini dapat ditempuh kurang lebih lima jam perjalanan darat. Dahulunya, Bengkayang hanyalah setingkat Onderafdeling yang dipimpin seorang berpangkat Controleur atau Wedana. Bengkayang masuk dalam Afdeling Sambas yang berpusat di Singkawang. Mengingat Sambas, maka tidak akan bisa dilupakan peristiwa yang terjadi sekitar bulan Oktober 1945 dimana pemuda-pemuda PERBIS mencoba mengibarkan bendera Merah Putih yang mengakibatkan ditembaknya Siradj Sood dan Tabrani Ahmad (gugur).

Di Singkawang sendiri, bentrokan demi bentrokan terus terjadi, kadang sesama orang Indonesia, kadang antara orang Indonesia dengan NICA dan anteknya. Bentrokan paling awal misalnya, terjadi di dalam tubuh PKO (Penjaga Keamanan Oemoem) yang motifnya sangat mirip seperti di kasus PKO di Pontianak. Dalam praktiknya PKO golongan Tionghoa sulit bekerjasama dengan PKO golongan Indonesia, salah satunya soal penggunaan senjata. PKO Tionghoa memiliki senjata api secara pribadi, namun enggan meminjamkannya kepada PKO Indonesia untuk patroli keamanan. Hal ini semakin didorong karena ulah orang Tionghoa yang menghembuskan kabar bahwa Kalimantan Barat akan kedatangan Tentara Tiongkok-Koumintang. Merasa di atas angin, orang-orang Tionghoa telah berani menyerang polisi seperti Kasim di Bengkayang, dan Kanang di Sungai Duri. Hal ini akhirnya mendorong kemarahan rakyat, para pendekar Indonesia turun memperingati orang Tionghoa dan PKO. Hal ini akhirnya membuat nyali mereka ciut, terlebih isu kedatangan tentara Tiongkok ternyata hanya isapan jempol.¹

¹ Sarimin Minhad, Usman Amin, *Setetes Air di Padang Pasir: Sejarah Perjuangan Laskar BPIKB Afdeling Singkawang Tahun 1945-1949*, Penerbit Kalbar Indah, Singkawang, 2000: hlm. 15-18

Sementara itu di Kampung Sekip Lama Singkawang, NICA telah menetapkan bahwa kampung tersebut sebagai sarang ekstrimis. Akibatnya pada 29 Oktober 1945 markas Kesatuan Aksi Pemuda (KAP) yang berada di kampung itu diserang, dua pemuda republiken gugur dan sisanya terluka atau ditawan. Kemudian terjadi pula aksi penyerangan terhadap markas kaum republiken oleh NICA di daerah Sungai Kunyit yang menggugurkan Musalim dan Salamah serta menawan 20 orang lainnya. Menurut NICA, penyerangan dan penangkapan di sekitar daerah Singkawang merupakan bagian dari perlawanan di Sambas dan Pemangkat.²

Aksi-aksi represif yang dilakukan NICA akhirnya mengilhami kaum republiken untuk mengadakan pemberontakan dimana-mana. Pada 13 November 1945 berdiri suatu badan perjuangan di Singkawang dengan nama Badan Pejuang Indonesia Kalimantan Barat (BPIKB). Badan Pejuang dalam tahap pertama ini didirikan di rumah dr. Salekan yang beralamat di Jl. Pemuda No. E1 Singkawang. Adapun susunan organisasi ini sebagai berikut:³

Ketua Penasehat	: Wan Abbas Mansyur
Wakil Penasehat	: Bero Mertosutikno
Sekretaris	: Kartini alias Zainal Arifin
Seksi Propaganda	: Uray Asman
Seksi Keuangan:	: Sangsang Sudiadi
Seksi Perlengkapan	: R. Sudiono
Seksi Perbekalan	: M. Idris, M. Gapi dan obat-obatan
Seksi Kepemudaan	: Sarimin Minhad
Seksi Polisi	: Nasran Kadirun
Seksi Penghubung	: Usmansyr dan Nasruddin
Pembantu Umum	: R. Noor, B. Suwinta, dan Abubakar Hasan
Seksi Obat-obatan	: R. Sudiono (merangkap Seksi Perlengkapan)

² Ibid., hlm. 26

³ Ibid., hlm. 27

Dalam bulan November 1945 itu juga Badan Pejuang telah menetapkan untuk melakukan pemberontakan di Bengkayang namun pusat komando dan persiapan tetap di Singkawang. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari menghubungi pimpinan pejuang di sekitar Singkawang, hingga pengumpulan senjata. Sebagian besar Badan Pejuang beranggotakan pasukan eks-Kaigun Heiho dan Seinendan. Akan tetapi usaha-usaha untuk mengumpulkan senjata berjalan tidak terlalu mulus hingga pemberontakan di Bengkayang tidak juga terlaksana hingga akhir 1945.

2. Tiga Puluh Jam Bersama RI

Memasuki tahun 1946, upaya untuk melakukan pemberontakan terus dipersiapkan. Berbagai pejuang sudah berkumpul di Singkawang untuk selanjutnya menuju Bengkayang. Selain dari sekitar Kalimantan Barat, datang juga pejuang republikan dari Jawa yakni Kapten Bambang Ismoyo dan Adi Japar. Adi Japar merupakan eks Letnan I PETA, ia membawa beberapa karung gula yang sedianya akan ditukar dengan persenjataan di Sarawak. Ia juga membawa berbagai majalah dan pamflet perjuangan serta buku-buku strategi militer yang dapat digunakan untuk menambah ilmu bertempur.⁴ Sedangkan Bambang Ismoyo adalah anggota mantan Laskar Hizbullah,⁵ pasukan paramiliter yang dibentuk Jepang atas permintaan tokoh-tokoh Islam dan dilatih oleh Perwira PETA bumiputera pada 8 Desember 1944.⁶

Pada 29 Februari 1946 Pusat Komando Badan Pejuang di Singkawang kembali kedatangan tenaga dari Pontianak yang diutus langsung oleh dr. Soedarso, tokoh republikan yang sangat dihormati dan berpengaruh di Pontianak. Orang tersebut yakni Muhammad Ali Anyang, Syarif Muhammad, dan Zainuddin Effendi. Ketiga

⁴ Ahok, dkk, *op.cit.* hlm. 67

⁵ Ibid., hlm. 68

⁶ Muhammad Zidni Nafi, *Rekam Jejak Laskar (Kiai-Santri) Hizbullah*, diunduh dari <http://www.nu.or.id/post/read/63108/rekam-jejak-laskar-kiai-santri-hizbullah> pada 30 September 2018

orang ini ditugaskan dr. Soedarso untuk mengkoordinir pejuang-pejuang guna mengadakan pemberontakan mengingat di Pontianak sulit dilakukan karena semakin ketatnya penjagaan NICA. Ketiga orang tersebut pun sebenarnya sudah menjadi buronan petugas keamanan NICA, untuk mengelabui Ali Anyang misalnya memiliki nama samaran yakni Indra. Pada 1 April 1946 Badan Pejuang pada toponim BPIKB diganti dengan Barisan Pemberontak, yang masih berafiliasi dengan Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI) bentukan Bung Tomo di Surabaya.⁷

Keroganisasian BPIKB makin bergerak ke arah positif sehingga memiliki wilayah operasi yang cukup luas. Saat badan ini dibentuk seketika pejuang-pejuang atau pimpinan seksi organisasi perjuangan di wilayah pesisir pantai barat mulai dari Mempawah hingga Jawai menyatakan terikat satu komando dengan BPIKB di Singkawang. Bahkan di Bengkayang BPIKB juga memiliki sektor komando hingga ke Sanggau Ledo dan Seluas. Adapun susunan komando lengkap BPIKB sebagai berikut:⁸

I. Pimpinan Seksi Komando Utara: di Jawai

- a. Pimpinan/Komandan : M. Yusuf Harun
- b. Wakil Pimpinan : Maksum Bakri
- c. Bendahara : Mustafa Ma'ruf
- d. Perbekalan : H. Basuni
- e. Perlengkapan : Tajudin H. Junit
- f. Seksi Pembantu

- 1) M. Zain H. Sidik
- 2) Minhad Bujang
- 3) Hasan Da'am
- 4) M. Insan
- 5) Kang Timon
- 6) M. Saleh

⁷ Iswara N Raditya, *Ali Anyang Putra Dayak Penegak NKRI*, diunduh dari <https://tirto.id/ali-anyang-putra-dayak-penegak-nkri-cmg1> tanggal 30 September 2018

⁸ Minhad, Amin, *op.cit.* hlm. XVI-XVIII

- 7) Rabudin
- 8) Mustafa H. Junit
- 9) Bahid Noor
- 10) Ahmad Saleh

II. Pimpinan Seksi Komando Timur: di Bengkayang

- a. Pimpinan/Komandan : Ali Barudin
- b. Wakil Pimpinan : Fadli Zabir
- c. Propaganda : Dahlan Saleh
- d. Seksi Pemerintahan : Karlan Kartodimejo
- e. Seksi Perhubungan : Yacob Ahmad
- f. Pimpinan Sanggau dan Seluas : Syahri Rasib
- g. Pemerintahan Sanggau/Seluas: Asmu'i Mursal
- h. Pengerahan Tenaga di Seluas : U. Abdurrahman
- i. Wakil I : A. Karim
- j. Wakil II : Ngadinun

III. Pimpinan Seksi Komando Selatan: di Sungai Kunyit

- a. Penasehat : A. Razak Abubakar
- b. Pimpinan/Komandan : A. Murad A. Razak
- c. Wakil Pimpinan : Zawawi Ao'od
- d. Komandan Sektor I : Usman Amin
- e. Komandan Sektor II : Saleh Ahmad
- f. Pasukan Sei. Pangkalan : Musni
- g. Pasukan Sei. Duri : Bagong Tahak
- h. Pasukan Sei. Bundung : Tayib Baksid
- i. Pasukan Sei. Kunyit : Munzir Abdullah
- j. Pasukan Sei. Limau : Hamdan Ahmad
- k. Pasukan Sei. Semudun : Mat Adi Sasak
- l. Pasukan Mempawah : Abdul Muhammad
- m. Pasukan Antibar : M. Zainal Abidin
- n. Bagian Dokumen : Minin Sa'id
- o. Keuangan : Ahmad Kadir

- p. Perlengkapan : Samad Yusuf
 q. Perbekalan : Haris Kadir
 r. Perhubungan : Fauzi So'od, Ali Usman, Sudin Pattah, Masdok, Akil Mamad, Ribud Mamad, Bakar Talib, A. Rahman Ja'far

Sebagai langkah awal untuk merebut Kota Bengkayang, Ali Anyang, Syarif Muhammad, Zainuddin Effendi, A. Hamid Z, dan Amad Jasimin dikirim ke kota itu, menyusup dan mematai-matai keadaan kota serta memberi tanda-tanda apabila telah siap dilancarkan aksi pemberontakan. Persiapan lain juga dilaksanakan di Mempawah untuk mendukung pemberontakan di Bengkayang. Badan Pemberontak Republik Indonesia Antibar (BPRIA) Antibar Mempawah, yang telah melebur ke dalam rantai komando BPIKB sering melakukan pertemuan diam-diam untuk saling bertukar informasi dan maupun konsolidasi komando. Memasuki tahun 1946, BPIKB memandang perlu diadakan suatu hambatan pada gerak tentara NICA yang dilihat semakin gencar berpatroli dan menekan pihak pejuang di Singkawang maupun Sambas. Caranya yakni dengan melakukan sabotase pada Jembatan Mempawah.⁹

Di Mempawah sendiri jembatan itu lebih dikenal dengan nama Jembatan Wilhelmina. Aksi sabotase juga bertujuan untuk menghambat gerak maju tentara NICA agar kesulitan menumpas aksi BPIKB yang akan melakukan pemberontakan di Bengkayang dan Singkawang. Pada 14 September 1946 malam sebanyak delapan orang anggota BPRIA yang terdiri dari Abdul Kadir Mahmud (pemimpin aksi), Jamaludin A. Hamid, Abdul Aziz H. Kasim, Raki'i H. Ibrahim, H. Muhammad Murni, Kaliri bin Saleh, Kadri Abu Hasan, dan Muhammad Zainal Abidin, sukses membakar Jembatan Wilhelmina yang terletak di kuala Sungai Mempawah. Aksi ini membuat geram NICA dengan melakukan penyisiran dan mencoba mencari pelakunya sambil melakukan pengumuman sekeliling kota "Awat Anjing Hitam, Sukarno Hitam ada di Mempawah ini!".¹⁰ Demikianlah julukan aparat NICA pada kaum republiken.

⁹ Tim Penyusun Naskah, *Naskah Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908-1950*, Pemerintah Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat, Pontianak, 1989: hlm. 231

¹⁰ Tim Penyusun Sejarah Lisan, *ibid.*, hlm. 6-7

Sekitar akhir bulan September 1946, persiapan untuk merebut Bengkayang semakin matang. Pusat Komando di Singkawang kembali mengirimkan pejuangnya untuk bersiap di Bengkayang yakni Bambang Ismoyo, Arifin Tarip, Bujang Pin, dan Pak Amat. BPIKB merencanakan agar pemberontakan itu dilaksanakan serentak di Bengkayang, Pemangkat, Singkawang, dan Landak agar kekuatan pasukan NICA terbagi-bagi memadamkan masing-masing kota. Untuk itulah Ahmad Djajadi dan beberapa pejuang BPIKB dikirim ke Ngabang-Landak untuk berkoordinasi dengan pejuang GERAM (Gerakan Rakyat Merdeka).

Di Bengkayang, rencana-rencana dan rapat pemberontakan dilakukan di Kampung Kendaik, termasuk menjadi titik berkumpulnya pasukan bantuan dari Singkawang. Tanggal dimulainya perlawanan pun sudah ditetapkan pada pagi hari 8 Oktober 1946 dan harus terlaksana. Agar perebutan Kota Bengkayang berhasil, maka pergerakan laskar dilaksanakan dari dua arah, pertama dari sekitar Bengkayang pimpinan Ali Barudin, kedua bergerak dari arah Sebalau (Sebalo) pimpinan Bambang Ismoyo sekaligus sebagai pencetus/pembuka tembakan. Pejuang juga dibantu oleh Panglima Busu, seorang laskar suku Dayak dengan delapan belas anak buahnya yang juga siap bertempur merebut Bengkayang.

Ada dua titik yang harus berhasil ditaklukkan lebih dulu saat memasuki Bengkayang, yakni tangsi militer NICA/KNIL dan Kantor Controleur. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, pada pukul 10.00 pagi tanggal 8 Agustus 1946, Bambang Ismoyo bersama Ali Anyang, Sukiman, dan Uray Abdul Hamid memulai tembakan tanda dimulainya pemberontakan. Dengan cepat beberapa pos penjagaan berhasil dilumpuhkan karena ketidaksiapan penjaganya. Unsur dadakan pasukan BPIKB benar-benar tidak disangka-sangka oleh kekuatan NICA di Bengkayang. Beberapa tentara Belanda berhasil ditewaskan. Terlebih sehari sebelumnya pada 7 Oktober 1946 tangsi militer itu telah ditinggalkan oleh banyak tentaranya ke Singkawang dan hanya dijaga oleh 20 Polisi NICA.¹¹ Militer NICA salah prediksi, mengira pemberontakan kaum republiken akan pecah di Singkawang. Sehingga dalam sekejap Bengkayang telah direbut.

¹¹ Ibid.hlm. 36

Pasukan BPIKB menawan seluruh polisi yang menjaga tempat itu dan menyita 18 pucuk senjata api berbagai jenis. Kemudian Controleur NICA di Bengkayang Loez Kardoza berhasil ditahan beserta anak buahnya. Keberhasilan merebut Kota Bengkayang ditutup dengan upacara menaikkan bendera Merah Putih diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera itu sendiri merupakan bendera Belanda yang telah dikoyakkan warna birunya oleh Dahlan Saleh. Segera setelah upacara yang khidmat itu, dari Bengkayang disiapkan satu regu untuk berangkat ke Sanggau Ledo dengan sebuah truk yang dipimpin oleh Karlan, Yacob Ahmad, dan Ngadinun bertugas untuk mengambil alih pemerintahan di sana. Upaya ini pun berhasil tanpa perlawanan berarti.¹²

Pimpinan komando di Bengkayang segera menghubungi Singkawang dan Ngabang agar pemberontakan yang juga telah disiapkan disana segera dilaksanakan supaya memecah konsentrasi kekuatan Pasukan NICA. Laskar BPIKB di Singkawang tidak dapat berbuat banyak terhadap seruan ini, kode balasan lewat telepon kepada pemimpin di Bengkayang "telur kami belum menetas" mengisyaratkan bahwa pemberontakan belum bisa dilaksanakan karena berbagai hambatan.¹³ Salah satunya adalah penjagaan pasukan NICA/KNIL yang teramat kuat. Di Ngabang sendiri pemberontakan itu akhirnya baru terlaksana pada 10/11 Oktober 1946.

Agar Kota Bengkayang dapat terus dipertahankan maka Pimpinan Komando Bengkayang segera membangun pos pertahanan di Desa Teriak dekat Gunung Pendereng. Tugas itu diserahkan ke Panglima Busu, dan dibantu oleh masyarakat Dayak di sekitarnya dengan membuat rintangan kayu. Pimpinan Komando Bengkayang juga memerintahkan Uray Dahlan bersama pasukannya dari Sanggau Ledo datang memperkuat kota itu. Keesokan harinya tanggal 9 Oktober

¹² Ibid., hlm. 39

¹³ Ahok, dkk, op.cit.hlm. 70

¹⁴ Dalam buku Tim Penyusun Naskah, *Naskah Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908-1950*, Pemerintah Daerah Tk. 1 Kalimantan Barat, Pontianak, 1989: hlm. 220, disebutkan bahwa kalimat yang digunakan sebagai kode untuk memberitahukan kabar situasi dari operasi di Bengkayang ke pusat komando Singkawang ialah "Aminah Telah Melahirkan Bayi Laki-laki".

1945 pos pertahanan yang belum selesai dibangun itu, telah menerima serangan dari pasukan bantuan NICA yang tanpa diduga bergerak dari Singkawang. Akibatnya 26 pejuang BPIKB termasuk Bambang Ismoyo yang juga sedang berada di sana gugur. Dengan begitu pasukan NICA dengan mudah melenggang masuk ke Bengkayang.¹⁵

Di sisi lain, pasukan bantuan dari Sanggau Ledo pimpinan Uray Dahlan sudah tiba di tepian Bengkayang dimana titik itu telah kembali direbut NICA. Hal ini tidak diketahui oleh Uray Dahlan, sebab sebelum berangkat ke Bengkayang ia terlebih dahulu menelepon Pusat Komando di Bengkayang dan menanyakan apakah kondisi di kota itu aman sehingga pasukannya dapat masuk dengan aman pula. Noerdin yang menjadi juru telepon di Bengkayang nampaknya sengaja menjebak pasukan Uray Dahlan dengan menjawab bahwa Bengkayang berstatus aman, sehingga pasukan itu dapat segera menuju kota tersebut. Akibatnya bus yang berisikan 27 pejuang dari Sanggau Ledo dihabisi oleh senapan mesin Pasukan NICA/KNIL di jembatan patok. Peluru-peluru melubangi badan bus yang dikemudikan republiken Tionghoa Phang Nyon Pho, terus menembus penumpang di dalamnya dan mengugurkan 25 dari mereka. Hanya ada 2 penumpang pejuang BPIKB dalam pembantaian tersebut yang selamat, yakni Amat dan Dabot yang duduk di kursi paling belakang dan sempat terjun ke sungai melarikan diri. Belakangan hari diketahui Noerdin sang juru telepon ternyata kaki tangan Belanda.¹⁶

Sebanyak 38 pejuang BPIKB gugur mempertahankan Kota Bengkayang yang hanya berhasil dibawah Pemerintah Republik Indonesia selama 30 jam dari pukul 10.00 tanggal 8 Oktober 1945 hingga pukul 16.00 tanggal 9 Oktober 1945.¹⁷ Bengkayang dapat direbut kembali oleh NICA dengan mudah karena persenjataan yang lebih kuat. Sedangkan di Singkawang, pemberontakan tidak berhasil terlaksana karena ketatnya penjagaan NICA. Sisa pasukan BPIKB akhirnya memilih mundur bergerilya di hutan dan bergabung dengan pasukan GERAM di Ngabang.

¹⁵ *ibid.* hlm. 221

¹⁶ Hassan Basry, *Kisah Gerilya Kalimantan*, Jajasan Lektur Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1961: hlm. 76

¹⁷ Ahok, dkk, *op.cit.* hlm. 70.

3. Rencana Pemberontakan di Sambas

Di Sambas yang juga termasuk dalam satu Afdeling bersama Bengkayang dan Singkawang, tindakan revolusioner lebih dulu terjadi pada Insiden Bendera 27 Oktober 1945 yang merenggut nyawa Tabrani Ahmad dan tertembaknya H. Siradj Sood. Pasca insiden tersebut seakan tidak ada kapoknya, perlawanan terhadap NICA nyatanya terus dikobarkan oleh rakyat. Sekitar bulan Januari 1946, sebanyak sebelas anggota eks-PERBIS mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia Merdeka (GERINDOM) yang dipimpin oleh M. Arief Satok dan dibantu oleh M. Ali Saleh. GERINDOM merupakan organisasi perlawanan yang bergerak secara bawah tanah untuk melawan NICA. Sebuah upaya untuk melancarkan pemberontakan terhadap posisi-posisi NICA di sekitar Sambas juga telah disusun. Sayangnya, belum juga rencana itu dieksekusi sekitar bulan April-Mei 1946 beberapa anggota GERINDOM ditangkap NICA karena adanya pengkhianatan di dalam tubuh organisasi itu. Sisanya anggota GERINDOM yang lain melakukan aksi gerilya di sekitar Sambas hingga Sanggau Ledo dan Seluas termasuk bergabung dengan BPIKB.¹⁸

Di Pemangkat, sekitar tahun 1946 itu juga telah ditangkap beberapa tokoh republikan yang cukup vokal dan telah lama menjadi target penangkapan NICA. Orang tersebut antara lain Uray Bawadi, Mustafa, Munzili, Muin Junus, dan masih banyak lagi.¹⁹ Sementara itu masih dalam suasana Revolusi Oktober, di Sambas pada 11 November 1946 Siradj Sood yang telah pulih pasca pengobatan luka tembaknya di Sarawak mendirikan organisasi Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI). Bagaimanapun juga Siradj Sood adalah seorang republikan sejati yang tidak akan pernah berdiam diri melihat tanah airnya coba kembali dijajah Belanda. Sadar pasca Insiden Bendera 27 Oktober 1945 dirinya masuk dalam pengawasan NICA, ia memilih menggunakan jalur perjuangan lain. Untuk itulah ia mendirikan PERMI. Selain berjuang secara politik-parlementer, PERMI juga bergerak di bidang dakwah, badan amal, kebudayaan, kepanduan, dan emansipasi kesadaran wanita.

¹⁸ Ahok, dkk, *op.cit.* hlm. 64

¹⁹ Basry, *op.cit.* hlm. 76

Adapun saat didirikan susunan kepengurusan PERMI sebagai berikut:²⁰

- | | | |
|----|------------|----------------------|
| a) | Penasehat | : H.M Siradj Sood |
| b) | Ketua | : Izzudin Zubir |
| c) | Sekretaris | : M. Arief Satok |
| d) | Bendahara | : D. Miradj Musyaffa |

Sayangnya pada 1948 H.Siradj Sood kembali ditangkap oleh aparat pemerintah NICA dan mendapatkan vonis penjara dua tahun.²¹ Ia dituduhkan dengan tuduhan klasik yang seakan dibuat-buat, termasuk proses pengadilannya, yakni merancang aksi pemberontakan.

²⁰ Ibid., hlm. 65

²¹ Syafaruddin Usman, *Di Bawah Lambaian Sang Merah Putih: Kisah Revolusi Kalimantan Barat 1945-1950*, Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Perjuangan 45 Kalimantan Barat, Pontianak, 2018: hlm. 58

BAGIAN IV

OKTOBER MERAH DI NGABANG - LANDAK

1. Kota Perlawanan

Kabupaten Landak yang beribukota di Ngabang dahulunya masuk dalam Afdeling Pontianak dengan status Onderafdeling dibawah pimpinan seorang Controleur atau Wedana. Selama berpuluh-puluh tahun bahkan sebelum masuknya tentara Jepang, Ngabang dikenal sebagai pusat aktivitas aktivis-aktivis pergerakan nasional. Beberapa organisasi pergerakan nasional di Kalimantan Barat lahir pertama kali di Landak atau Ngabang secara khusus. Pasca berhasil ditumpasnya perlawanan yang dipimpin oleh Gusti Abdurrani Pangeran Natakusuma, pada 1914, kemudian berdiri Sarekat Islam (SI) cabang Ngabang. Setelah itu Gusti Sulung Lelanang mendirikan Serikat Rakyat (SR) pada 1922. Selanjutnya pada awal 1937 berdiri juga cabang Partai Indonesia Raya (PARINDRA), meskipun pimpinan wilayahnya berada di Pontianak namun Ngabang dianggap sebagai pusat pergerakan partai tersebut. Oleh sebab itulah saat pemerintah Hindia Belanda melakukan penangkapan terhadap aktivis-aktivis pergerakan nasional pada tahun 1926, tokoh politik dari Ngabang lah yang paling banyak diasingkan ke Boven Digul (Digulis).¹

Semasa pendudukan Jepang, pemuda-pemuda Ngabang meskipun hidup dibawah tekanan negara fasis itu justru mendapat gembleran semangat nasionalisme dan patriotisme lewat ketergabungan mereka dalam Kaigun Heiho, dan Seinendan. Salah satu tentara Jepang yang bernama Norio Tsucimochi yang menjabat sebagai kepala pusat pelatihan kemiliteran Seinendan (Kyoren) dikenal

¹ Umar, dkk, *op.cit.* Ilm. 53. Ada sebelas tokoh yang ditangkap pemerintah Hindia Belanda dan dibuang ke Boven Digul, Papua, mereka semuanya ditetapkan sebagai Perintis Kemerdekaan RI. Untuk lebih memahami tentang tokoh-tokoh Digulis ini baca lebih lanjut di literatur lain terutama tentang sejarah Tugu Digulis.

cukup simpatik pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada 8 Juli 1945 pukul 08.00 pagi di halaman kantor Bunken Kanrikan Landak diadakan upacara pengibaran bendera kedua bangsa Hinomaru dan sang dwiwarna merah putih serta dihadiri oleh anggota Seinendan, pejabat militer Jepang, dan pegawai Minseifu. Tsucimochi bahkan pada 15 Juni 1945 hendak membagikan senjata kepada anak didiknya di Seinendan sebagai modal perjuangan kelak ketika merdeka, namun hal itu ditolak oleh Wedana Landak, Tuan Sato².

Setelah kemerdekaan Indonesia di proklamirkan pada 17-08-1945 di Jakarta, sebagian besar dari mereka akhirnya menjadi kader badan-badan perjuangan. Berita kemerdekaan RI sampai di Ngabang pertama kali sekitar bulan September 1945 lewat beberapa kader PPRI asal Ngabang yang juga terlibat dalam pendirian dan rapat umum di Pontianak pada 15 Oktober 1945. Kader PPRI tersebut yakni Ya' Umar Yasin, Ya' Achmad Dundik, Ya' Seman Yasin, dan Gusti Abdulhamid Saun. Keempat tokoh tersebut kemudian melakukan sambungan telepon ke kaum republiken di Ngabang, kepada Kadaruddin B. Mundit agar bersiap-siap membidani pembentukan organisasi yang serupa seperti PPRI dalam mempertahankan kemerdekaan RI di Landak.

Kaum republiken di Ngabang tidak langsung membentuk organisasi sebagaimana yang diusulkan oleh Gusti Abdulhamid Saun kepada Kadaruddin B. Mundit. Terlebih dahulu mereka melakukan upaya-upaya membangkitkan rasa nasionalisme dan keinsyafan pada rakyat bahwa Indonesia telah merdeka dan menolak untuk dijajah kembali. Kaum republiken menyebarluaskan salinan teks proklamasi kepada rakyat atau tokoh masyarakat dan pamflet-pamflet tentang kemerdekaan Indonesia. Pada Oktober 1945 usaha-usaha kaum republiken itu menyebabkan mereka dipanggil oleh Ajun Jaksa M. Saleh, mereka yang diinterogasi antara lain A. Rachman Zakaria, A. Fattah, Idris Abdurrachman, Daeng Saleh, Mahmud Amin, dan Ya'Basuni Budjang. Di hadapan Controleur Ngabang AB. Faber, Ajun Jaksa M. Saleh memperingatkan mereka untuk tidak lagi melakukan usaha-

² Syafaruddin Usman, *Landak Dibalik Nukilan Sejarah*, Pustaka Dinosaurs (Koleksi Pribadi), Pontianak, tanpa tahun, hlm. 39-40

usaha penyiaran berita kemerdekaan atau akan dipenjar.³

2. Berdirinya Persatuan Rakyat Indonesia (PRI)

Setelah rakyat Ngabang-Landak memiliki semangat nasionalisme dan telah sadar akan kemerdekaan Indonesia, selanjutnya pada 29 Maret 1946 didirikanlah organisasi Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) yang bertujuan untuk menyatukan segenap lapisan masyarakat Landak untuk mewujudkan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. PRI berjuang secara politis dengan struktur kepengurusan yang cukup lengkap baik dari tokoh masyarakat, pembesar keraton, hingga rakyat biasa. Antara lain⁴:

Kepala Penanggungjawab	: Gusti Muhammad Affandi Rani Pangeran Mangkubumi Setia Negara (Panembahan)
Wakil Penanggungjawab	: Bardan Nadi Sutrisno
Penasehat	: Ya' Abdulhamid Daham Noor Umar Digul A. Hamid Zakaria
Ketua	: Gusti Abdulhamid Aun (Ketua I) Abdul Fattah (Ketua II)
Bagian Propaganda	: Gusti Muhammad Said dan Hamzah Sebon
Bagian Kelaskaran	: Gusti Abdulhamid Aun (Komandan) Ya' Nasri Usman (Komandan di Ngabang) Sardiman Nadi (Komandan di Sengah Temila) Bun Yamin (Komandan di Menyuke)
Bagian Penghubung	: Kadaruddin B. Mundit
Pengurus Umum	: Gusti Basuni, Ya' Basri Usman, Ya' A. Hamid Hasan, Gusti Lagum, Amin A. Rachman Zakaria, Gusti Lagum, Jim Kadaruddin.

³ Ibid, hlm. 46

⁴ Ibid., hlm. 47

Hal yang menarik dari susunan di atas ialah keterlibatan Panembahan (Raja) Kesultanan Landak Gusti Muhammad Affandi Rani sebagai kepala penanggung jawab. Hal ini semakin menegaskan sikap revolusioner Kesultanan Landak yang tetap konsisten anti penjajahan. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan diawal, Landak atau di Kota Ngabang perlawanan terhadap kolonialisme tidak pernah surut baik dilakukan oleh organisasi pergerakan nasional maupun golongan bangsawan-kesultanan. Gusti Muhammad Affandi Rani adalah putra dari Gusti Abdurrani Pangeran Natakusuma, saudara laki-laki Panembahan Gusti Abdul Aziz Akamuddin bertahta pada 1895-1899 yang memimpin perlawanan bersenjata terhadap Belanda pada 1912-1914.

Sekitar bulan Mei hingga September 1946 PRI secara rutin kedatangan utusan BPIKB pimpinan Mayor Aliyang dari Singkawang. Tujuan dari kedatangan pejuang BPIKB ini ialah untuk menjalin hubungan antar sesama badan perjuangan sekaligus untuk meminta dukungan dalam operasi perebutan Kota Bengkayang. Utusan-utusan BPIKB itu antara lain Hamid Hasan, Yusuf, Ahmad Djajadi, dan Sukimin. Dalam operasi perebutan Bengkayang, PRI memutuskan mengirim 38 laskarnya lengkap dengan persenjataan. Pada 8 Oktober 1946, melalui suatu serangan umum Kota Bengkayang berhasil direbut. Maka dengan ini PRI juga ikut andil dalam merebut Bengkayang selain daripada pasukan BPIKB. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak, dan 4 laskar PRI yang ikut menyerang Bengkayang ditangkap NICA, antara lain Abdul Sani, Slamet, Abdul Hamid, dan Rumi yang semuanya kemudian ditahan di Penjara Cipinang Jakarta.⁵

3. Dari PRI ke GERAM

Pada bulan September-Oktober 1946 sebenarnya BPIKB telah mempersiapkan akan diadakan perlawanan serentak di beberapa kota di Afdeling Sambas seperti di Bengkayang dan Singkawang. Akan tetapi seperti yang telah penulis bahas hanya berhasil dilaksanakan di Bengkayang, sedangkan di Singkawang rencana ini telah bocor dan NICA segera menangkap pimpinan gerakan. Di sisi lain

⁵ *Ibid.*, hlm. 49

pimpinan PRI di Landak juga memiliki rencana serupa untuk membebaskan Kota Ngabang dari cengkaman NICA. Kemudian daripada itu pimpinan PRI juga semakin yakin aksi itu harus segera dilaksanakan karena melihat keberhasilan BPIKB yang dibantu laskar PRI dalam merebut Bengkayang.

PRI akhirnya membubarkan diri dan diganti dengan sebuah organisasi yang perjuangannya lebih revolusioner, dari sekedar perjuangan politis ke perjuangan bersenjata. Pada 9 Oktober 1946 PRI dibubarkan untuk dibentuk organisasi baru Gerakan Rakyat Merdeka (GERAM). Secara umum GERAM tidak mengalami banyak perubahan kepengurusan. Pada hari itu juga dilaksanakan rapat di kediaman Panembahan Gusti Muhammad Affandi Rani yang juga dihadiri Gusti Sani Organ, Gusti Abdulhamid Aun, A. Hamid Merseb, Gusti Lagum Amin, Gusti Muhammad Said, Ya' Nasri Usman, Ngadimin Nadi, dan Hamdan Budjang. Dalam pertemuan tersebut akhirnya diputuskan bahwa akan dilaksanakan pemberontakan pada malam tanggal 10 Oktober 1946 dengan sasaran merebut Kota Ngabang.⁶

Gusti Muhammad Affandi Rani selaku Komandan GERAM sekaligus tokoh masyarakat yang dihormati rakyat Landak juga memberikan siraman semangat yang membuat para pejuang maupun laskar tersihir seolah siap bertempur hingga titik darah penghabisan demi ibu pertiwi. Kata-kata dari mulut sang Raja laksana suatu titah bagi rakyat yang harus dijalankan. Dalam pidatonya di pertemuan tersebut, ia berkata: "Berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini ketegasan. Bukan pilihan, tapi kewajiban. Indonesia milik kita, maka bela Indonesia hingga hembus napas terakhir. Aku paling depan memimpin rakyat Landak, majulah berjuang dan berperang. Harus menang. Sekalipun kita mati, untuk Indonesia kita rela. Dan tahtaku adalah untuk Indonesia". Tegas sang Raja Landak yang pada hari pelaksanaan benar-benar memimpin serangan hingga keluar masuk hutan.⁷

⁶ Ibid., hlm. 50

⁷ Anonim, *Sosok Gusti Afandi Ranie Jadi Sang Mahaputra Indonesia*, tribun-pontianak.co.id 25 April 2019, diunduh dari <https://pontianak.tribunnews.com/2019/04/25/sosok-gusti-afandi-ranie-jadi-sang-mahaputra-indonesia> pada 23 Juli 2019

Sebagai tindak lanjut dari perjuangan membebaskan Ngabang, maka dalam pergerakannya pasukan GERAM dibagi beroperasi dalam dua daerah. Daerah Ngabang dan sekitarnya seperti Distrik Air Besar dan Menyuke dipimpin oleh Gusti Lagum, sedangkan daerah Sengah Temila dipimpin oleh Bardan Nadi. Beberapa pasukan BPIKB dari Singkawang juga ikut serta dalam operasi ini salah satunya Sukiman sekaligus penghubung antara dua badan perjuangan ini. Setelah operasi dilancarkan pasukan yang dipimpin Bardan Nadi berhasil menduduki Kantor Demang di Desa Sepatah, kemudian ia melanjutkan pergerakan bergabung dengan pasukan GERAM di Air Besar dan Menyuke. Dari sana, GERAM melancarkan serangan umum ke Ngabang dengan menyasar tangsi militer KNIL, Pos Polisi, dan Kantor Controleur.⁸

Pasukan penyerang kemudian kembali dibagi dua, dari arah Air Besar, Sengah Temila, dan Darit dipimpin oleh Djoko Walujo dan Gusti Sani dengan menyasar tangsi KNIL. Kemudian Ya' Nasri Usman dan Gusti Said ditugaskan untuk menduduki Kantor Polisi dan Kantor Controleur. Pejabat-pejabat dan pegawai Controleur sempat ditawan.⁹ Akan tetapi pertempuran berlangsung sangat sengit, dari jam 02.00 hingga 06.00 pagi itu belum juga menunjukkan kemajuan-kemajuan penguasaan Kota Ngabang oleh Pasukan Geram. Sementara itu bendera Merah Putih sempat dikibarkan di Kantor Pemerintahan Ngabang oleh Ya' Nasri Usman. Korban berjatuhan dikedua belah pihak, namun tidak tercatat dengan baik. Akan tetapi Ya' Nasri Usman diketahui tertangkap NICA, ia tertembak di pangkal kakinya dan bersembunyi di lubang perlindungan di sekitar rumah kediaman Controleur. Ya' Nasri Usman pun ditangkap dengan mudah tanpa perlawanan.¹⁰

Matahari pagi di tengah pertempuran itu sudah semakin tinggi, sementara amunisi dan perbekalan sudah semakin menipis, pasukan GERAM akhirnya memutuskan untuk mundur bergerilya di luar Ngabang. Serangan umum

⁸ Ahok, dkk, op.cit. hlm. 76.

⁹ Tim Penyusun Naskah, *Naskah Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat*, Pemerintah Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat, Pontianak, 1989: hlm. 228.

¹⁰ Usman, op.cit. hlm. 51

ini dapat dikatakan kurang berhasil, karena adanya penghianatan oleh pasukan GERAM yang membocorkan rencana serangan kepada Uray Djohan (pegawai NICA) maupun langsung pada Contoroleur AB. Faber.¹¹ Mulai keesokan harinya atau tanggal 12 Oktober 1946 NICA dengan KNIL nya gencar melakukan serangan terhadap posisi-posisi laskar GERAM. Akan tetapi hal ini sia-sia belaka sebab laskar GERAM sudah menghindari perkampungan menyingkir bergerilya di hutan. Hal ini membuat NICA kesal, akibatnya beberapa kampung dibakar karena tidak berhasil menemukan anggota GERAM.¹² Sementara itu ditempat lain di Landak, pasukan BPIKB dari Bengkayang yang melakukan gerak mundur, dengan kekuatan 60 pasukan berhasil menguasai daerah Darit. Serangan dilakukan dari Kampung Jatak dibawah pimpinan Saudara Ali Badaruddin dan Saudara Bunjamin. Penyerangan ke Darit itu dilaksanakan sekitar pertengahan bulan Oktober 1946.¹³

Dari Darit, pasukan kemudian bergerak ke arah Air Besar (Kuala Behe) yang merupakan tempat berkumpulnya pasukan GERAM yang mundur dari penyerangan di Ngabang pada 11 Oktober 1946. Sesampainya disana pasukan BPIKB dan GERAM akhirnya diputuskan untuk dilebur menjadi satu dengan dipimpin oleh Sukini yang berkekuatan sekitar 350 orang dengan tujuan menyerang kembali tangsi militer KNIL di Ngabang. Akan tetapi pasukan yang seharusnya menyerang Ngabang ini, saat beristirahat di Kampung Ambarang secara tiba-tiba disergap oleh Pasukan NICA. Pasukan republiken memberikan perlawanan yang sengit hingga menyebabkan 7 tentara NICA tewas. Meskipun pasukan republiken tidak terdapat korban jiwa satupun, pertempuran di Kampung Ambarang membuat koalisi gabungan pasukan BPIKB dan GERAM ini terpecah karena perbekalan yang menyusut. Praktis karena hal tersebut penyerangan ke Ngabang kembali gagal.¹⁴

¹¹ Ibid., hlm. 77

¹² R.M Umar, op.cit. hlm. 77

¹³ Sarimin Minhad, Usman Amin, *Setetes Air di Padang Pasir: Sejarah Perjuangan Laskar BPIKB Afdeling Singkawang Tahun 1945-1949*, Penerbit Kalbar Indah, Singkawang, 2000. hlm 43

¹⁴ Ibid., hlm. 44

Secara sporadis perlawanan kaum republiken terhadap kedudukan NICA tetap dilakukan secara gerilya. Perang urat syaraf ini cukup membuat NICA kesal dan frustasi. Hal ini ditambah dengan pandainya para petinggi GERAM membaca situasi yang mampu secara cepat melihat keadaan membahayakan agar pasukan dapat dipindahkan ke tempat lain. Akibatnya salah satu komandan KNIL berpangkat sersan yang ditugaskan untuk menghabisi pejuang di daerah Air Besar nekat menghabisi nyawanya sendiri akibat frustasi. Akan tetapi, pembersihan yang dilakukan NICA untuk meredakan perlawanan juga tidak kalah keji-nya. Selain membakar desa-desa yang sebenarnya merugikan penduduk, NICA juga membakar lumbung beras yang menjadi sumber perbekalan gerilyawan.¹⁵

Beberapa kekejaman NICA terhadap gerilyawan republik misalnya terjadi pada pimpinan GERAM di Menyuke, yakni Bunjamin, M Kasim, dan Abdur Rani Darwin tertangkap di simpang Jata dan langsung dieksekusi. Abdur Rani gugur seketika, sedangkan M Kasim dan Bunjamin yang terluka parah sempat melarikan diri ke kampungnya. Berkat laporan mata-mata NICA, Bunjamin dan M. Kasim kembali ditangkap dan dibawa ketempat eksekusi semula di simpang Jata. Keduanya mengalami penyiksaan cukup berat dan sengaja dibunuh dengan perlahan, dipaksa menelan cabikan bendera Merah Putih dan akhirnya ditusuk bayonet.

Selain pejuang gerilyawan GERAM, Pasukan NICA juga melakukan aksi keji dan di luar batas perikemanusiaan terhadap rakyat biasa. KNIL mendatangi Kampung Anyang yang disinyalir sebagai tempat persembunyian GERAM, rumah kepala kampung diobrak-abrik. Akibatnya tertangkaplah Muhammad Umar sebab ditemukan dokumen-dokumen GERAM di rumahnya. Ditangkap juga dikampung itu seorang Khatib yang bernama Ismail dan tokoh masyarakat bernama Husein. Entah apa alasannya mereka ditangkap, barangkali KNIL menganggap mereka membantu pejuang GERAM. Ketiga orang tersebut akhirnya dieksekusi setelah diseret dari rumahnya masing-masing. Tentu eksekusi ini dilihat oleh rakyat seisi kampung, hal ini memang sengaja dilakukan NICA agar menjadi shock therapy agar rakyat takut dan tidak melakukan perlawanan.¹⁶

¹⁵ Tim Penyusun Naskah, *op.cit.* hlm. 229

¹⁶ Usman, *op.cit.* hlm. 56-58

4. Kisah Bardan Nadi

Kisah tentang seorang pejuang bernama Bardan Nadi sengaja penulis sajikan dalam bagian tersendiri, karena siapa saja yang membacanya, selagi ia memiliki rasa kemanusiaan yang dalam, tentulah akan membuat air mata berurai. Memiliki nama asli Sutrisno Sastrokusumo, ia lahir sekitar tahun 1912 di Magelang, Jawa Tengah. Sebagai orang Jawa, Sutrisno memiliki status sosial yang cukup tinggi kala itu karena dapat tinggal di lingkungan Keraton Surakarta (Solo). Ayah Sutrisno, Raden Suratman Nadi Sastrosasmito adalah komandan KNIL yang sering ditempatkan berpindah-pindah dari Magelang, Semarang, Aceh, Bogor, Jakarta, hingga akhirnya ditempatkan di Ngabang. Dari sinilah awal ia berkenalan-interaksi dengan alam dan penduduk di Kalimantan Barat. Oleh ayahnya ia disekolahkan di HIS (Hollandsch Indische Schoole). Meskipun ia termasuk anak orang yang terpendang, ia dikenal ramah dan memiliki toto kromo yang sangat baik. Oleh karena itu ia diberi nama Bardan oleh teman-temannya yang dalam bahasa Arab artinya sejuk. Sesuai dengan pembawaannya yang selalu menghadirkan kesejukan suasana.¹⁷

Akan tetapi, seolah berlawanan dengan pekerjaan ayahnya Bardan Nadi justru aktif di pergerakan kebangsaan Indonesia selama masa Hindia Belanda. Rasa ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda telah tumbuh di sanubarinya. Ia salah satu pengurus PARINDRA di Ngabang pimpinan Gusti Sulung Lelanang. Pada masa Jepang ia bergabung dengan Seinendan yang semakin menempa karakternya memiliki sikap cinta tanah air dan nasionalisme. Di Desa Sepatah, Sengah Temila, bersama Gusti Muhammad Saleh Aliuddin dan Gusti Mahmud Aliuddin ia memimpin upacara pengibaran bendera merah putih pada 8 Juli 1945. Saat masa kemerdekaan dan berdirinya PRI 29 Maret 1946 ia dipercaya menjadi Wakil Penanggungjawab organisasi itu. Selanjutnya saat PRI berubah menjadi GERAM, Bardan Nadi juga memimpin pasukannya menyerang tentara NICA¹⁸

¹⁷ Anonim. Artikel, *Profil: Bardan Nadi*, Wikipedia Ensiklopedia Daring, diunduh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Bardan_Nadi pada 28 September 2018

¹⁸ Usman, op.cit. dirangkum dari halaman 39, 46, dan 47

Apa yang dilakukan oleh Bardan Nadi merupakan suatu sikap yang revolusioner, sebagai seorang yang memiliki status sosial yang cukup bagus sebenarnya ia tidak perlu bersusah payah dan kelaparan dalam perjuangan menegakkan panji-panji kemerdekaan. Jika ia mau, Bardan Nadi bisa saja mengikuti jejak ayahnya menjadi tentara KNIL. Akan tetapi hati kecilnya berbicara lain, ia rela meninggalkan status kebangsawanan Jawa nya demi berjuang bersama pemuda-pemuda republikan di belantara Kalimantan Barat demi mewujudkan Indonesia yang merdeka.

Pada 29 Oktober 1946 agenda inspeksi pimpinan GERAM di Sidas berubah menjadi suatu malapetaka. Agenda itu ternyata telah bocor ke tangan NICA, sehingga markas GERAM di Sidas yang semestinya berlangsung agenda inspeksi pimpinan berubah menjadi ajang tembak menembak sengit. Akibatnya 23 laskar GERAM gugur termasuk sang wakil pimpinan Mane Pak Kasih, seorang Panglima Adat Dayak. Akan tetapi Pasukan NICA kembali gagal menangkap Bardan Nadi yang telah menjadi target operasi utama mereka. Pengejaran pun terus dilakukan terhadap Bardan Nadi, ia harus tertangkap hidup atau mati.¹⁹

Pada 5 Desember 1946, persembunyian Bardan Nadi telah dikepung oleh Pasukan NICA dan diperintahkan untuk segera menyerah. Ia menolak ultimatum NICA. Ia kemudian terpaksa menelan bulan-bulat secarik kertas dokumen yang berisi informasi perjuangan GERAM daripada jatuh ke tangan musuh. Bardan Nadi bersembunyi membawa anaknya yang masih kecil berusia 2 tahun, bernama Paini Trisnowati. NICA kembali mengultimatum Bardan agar segera menyerah, namun ia menolak sembari menembakkan senapan lantak nya yang ia pegang di tangan sebelah kanan, sedangkan tangan kirinya menggendong putri manisnya Paini Trisnowati. Oleh karena tidak juga menyerah akhirnya Pasukan NICA melepaskan tembakan gencar mengarah ke tempat persembunyian Bardan. Saat itulah timah panas dari senapan KNIL mengenai Paini Trisnowati, gadis manis nan mungil itu gugur seketika dipelukkan tangan kiri ayahnya. Darah anak kecil tanpa dosa itu akhirnya membasahi seujur tubuh Bardan Nadi.

¹⁹ Ibid., hlm. 58

Tidak ada perasaan yang tepat untuk menggambarkan betapa sedih dan terpukulnya seorang ayah yang kehilangan putri semata wayangnya di pelukan sendiri, yang jelas hal ini menyebabkan Bardan Nadi tidak berdaya kehilangan semangat. Dengan mudah Pasukan NICA segera menangkap Bardan Nadi. Sebelum ia dibawa untuk ditahan di tangsi KNIL di Ngabang, atas seizin pasukan yang menangkapnya, Bardan Nadi diberikan kesempatan untuk menguburkan putri manisnya itu. Pains Trisnowati akhirnya beristirahat dengan tenang menghadap Allah SWT dan atas seizinnya pula akan dianugerahi Surga yang kekal kelak.

Bardan Nadi akhirnya dibawa ke tangsi KNIL di Ngabang kemudian dipindahkan ke Penjara Sungai Jawi, Pontianak. Setelah diinterogasi dan mendapatkan siksaan yang berat, oleh pengadilan "rekayasa" NICA ia divonis mati. Pada 17 April 1947 hari eksekusi itu tiba. Ia diberi kesempatan untuk menyampaikan keinginannya sebelum ditembak. Pertama, ia meminta seluruh tahanan dibebaskan dan berkumpul menyanyikan Indonesia Raya sebelum ditembak mati. Permintaan ini dikabulkan oleh pimpinan penjara, setelah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ia meneriakkan "merdeka" sebanyak tiga kali dan diikuti oleh seluruh tahanan. Sedangkan permintaan yang kedua ia menolak menggunakan penutup mata saat menjalani hukuman tembak. Dengan tabah sambil bermunajat pada Allah SWT, Bardan Nadi tetap tenang menjalani saat-saat terakhirnya di dunia. Tidak ada raut kesedihan dan ketakutan di wajahnya saat diikat di tiang kayu dan dihadapkan pada regu tembak. Seketika setelah komandan regu memberikan aba-aba, peluru tajam langsung menghujami tubuhnya dan gugur seketika.²⁰

Bardan Nadi gugur, ia menghadap Allah SWT menyusul putri kesayangannya Pains Trisnowati. Mati satu tumbuh seribu, demikian kata pepatah. Gugurnya Bardan Nadi yang cukup tragis itu tidak menciutkan kaum republikan, bahkan tetap melakukan sejumlah perlawanan. Apa yang diperjuangkan oleh Bardan Nadi hendaknya menjadi suatu inspirasi bagi generasi saat ini bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang luhur itu telah mengorbankan banyak sekali harta maupun jiwa. Sehingga sudah semestinya tindakan-tindakan positif dilakukan untuk mengisi kemerdekaan.

²⁰ R.M Umar, *op.cit.* hlm. 77-78.

BAGIAN V

ONDERGRONDSE ACTIES DI PONTIANAK

A. **Menusuk Dengan Pers dan Seni**

Pontianak merupakan ibukota Borneo Westerafdeling, setingkat karasidenan di bawah Pemerintahan NICA. Pontianak juga merupakan kota terbesar di belahan barat Pulau Kalimantan dan memang telah menjadi ibukota kolonial Hindia Belanda di wilayah ini sejak lama. Sehingga baik kehidupan sosial-ekonomi, Pontianak menjadi parameternya. Pasca proklamasi, Pontianak menjadi pusat pergerakan politik dari berbagai paham dan kepentingan. Umumnya pergerakan politik itu diwadahi dalam sebuah organisasi.

Salah satu organisasi yang aktif ambil bagian dalam pusaran arus kemerdekaan Indonesia ialah PPRI. Organisasi yang dipimpin Muzani A. Rani ini menggunakan jalur perjuangan politik-parlementer daripada perjuangan fisik layaknya badan-badan perjuangan yang menjadi wadah berhimpunnya milisi republiken. Misi PPRI tegas, mengintegrasikan Kalimantan Barat menjadi salah satu bagian Republik Indonesia. PPRI menganut prinsip anti-kooperatif dengan pihak NICA dan juga anti-feodalistik, terutama pada kesultanan-kesultanan yang menolak atau ragu-ragu mengakui menjadi bagian dari Republik Indonesia. Akan tetapi usia PPRI tidak begitu lama meskipun telah cukup melaksanakan aksi-aksi revolusioner, salah satunya dengan menduduki Kantor Residen Kalimantan Barat pada 14 Oktober 1945 dan menyatakan wilayah ini menjadi bagian dari RI.

Usia PPRI belum genap dua bulan (didirikan pada 5 September 1945) saat polisi-polisi NICA melaksanakan gelombang penangkapan petinggi-petinggi PPRI dan kaum republiken lainnya sejak akhir bulan Oktober 1945. Praktis penangkapan

ini membuat PPRI mengalami kemacetan secara organisasi, sisanya yang tidak tertangkap menyingkir ke luar kota bergabung bersama badan perjuangan (gerilyawan), atau memilih berjuang secara bawah tanah. Walaupun secara organisasi lumpuh, kehadiran PPRI telah memberikan sumbangan yang sangat berharga. Pengaruhnya menjalar dan mendapat tempat di hati para pejuang yang sadar, lebih hebat dan lebih militan dari sebelumnya dijiwai semangat proklamasi.¹

Perjuangan secara diam-diam atau bawah tanah ini dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pers (media massa) dan seni. Perjuangan melalui media massa baik melalui koran atau surat kabar, dan siaran radio memang menjadi satu-satunya cara yang dapat digunakan untuk perjuangan di Pontianak. Sebab perjuangan secara parlementer seperti yang dilakukan PPRI silam akan langsung diberangus Polisi Belanda. Perlawanan bersenjata juga sulit dilakukan sebab posisi tentara NICA/KNIL terkonsentrasi sangat kuat di kota ini dan bersenjata lengkap. Melalui membaca media massa atau mendengar siaran radio, diusahakan agar rakyat timbul keinsyafan bahwa Indonesia telah merdeka dan bangkit melawan. Tidak lupa pula dalam isinya, dapat ditambahkan dengan "bumbu-bumbu" propaganda dan agitasi.

Di wilayah lain Indonesia di masa itu, perjuangan melalui media massa dan seni memang sudah menjadi taktik yang dilancarkan oleh Intelejen TNI pimpinan Letnan Kolonel (Inf.) Zulkifli Lubis. Beliau menyusupkan personil TNI terpilih dalam sejumlah media massa baik surat kabar maupun stasiun radio, serta grup kesenian di seluruh Indonesia melalui apa yang disebut Prajurit Perang Fikiran (PPF). Secara umum, operasi-operasi gerakan di bawah tanah ini sangat membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melalui muatan propaganda dan penerangan, ribuan pemuda patriotik dan militan berhasil dibina melalui operasi ini sehingga terciptalah kader penerus perjuangan bangsa.²

¹ Syafaruddin Usman, *Di Bawah Lambaian Sang Merah Putih: Kisah Revolusi Kalimantan Barat 1945-1950*, Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Perjuangan '45 Kalimantan Barat, 2018: hlm. 40

² Aju, *Kalimantan Barat Lintasan Sejarah dan Pembangunan dari Era Kolonial Belanda – Tahun 2013*, Derwati Press, Pontianak, 2017: hlm. 65

Sebelum tahun 1946, perjuangan melalui media massa dan seni ini sebenarnya sudah lebih dahulu dilakukan di Pontianak. Adalah orang-orang dari Radio Nippon Hosiokyoku seperti Abdul Rahman Oembri yang pasca proklamasi tetap melakukan tugasnya sebagai penyiar, namun materi siarannya kini berubah seputar info-info perjuangan melalui radio milik Jepang itu. Dengan suaranya yang berat dan tanpa lelah, setiap hari-saban waktu ia terus mengobarkan semangat kemerdekaan. Oembri juga lah termasuk orang awal di Pontianak, yang berkat siarannya menyebarkan berita kemerdekaan kepada seluruh pendengar di kota ini. Selain daripada itu ia bersama kawannya dalam Eiga Haikyusha (Badan Distribusi Film di Zaman Jepang), aktif pula dalam pertunjukan-pertunjukan sandiwaras bersama A Syukri Nour, Ismail Sitohang, Zainudin H Nawawi (dan istrinya Djamilah), serta Bujang Salong. Setelah petinggi PPRI ditangkap oleh Polisi Belanda dan bubar secara organisasi, dikabarkan Abdul Rahman Oembri juga bernasib sama. Malah ditahan di Pulau Onrust Kepulauan Seribu, Jakarta.³ Jelas, penangkapan ini masih ada hubungannya dengan siaran-siaran Oembri yang membuat merah telinga Pemerintah NICA.

Sementara itu NICA juga mulai melakukan pengawasan gerak-gerik para "kuli tinta" yang bekerja di surat kabar seluruh Kalimantan Barat. Ibrahim Saleh yang merupakan redaktur harian Suasana ditangkap Polisi NICA dengan tuduhan menyebarkan tulisan-tulisan yang menghasut agar terjadi perlawanan terhadap Pemerintah NICA. Tulisan-tulisan Harian Suasana yang ia asuh memang cukup tajam mengkritik NICA dan membuat naik darah. Begitupula Tan Zahri Abdullah juga ditangkap dan dijatuhi 6 bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. Ia bekerja di harian Terompet dan juga agen surat kabar Inzicht terbitan Kementerian Penerangan RI. Juga Maizir Ahmaddyn, tulisan-tulisan di pojok Si Maro dalam harian Suara Rakyat yang dipimpinnya begitu keras mengecam Belanda.⁴ Surat kabar harian yang dianggap NICA memprovokasi itu akhirnya terkena sanksi pelarangan terbit (pembredelan) seiring dengan pimpinannya yang meringkuk di penjara.

³ Usman, *op.cit.*, Hlm. 18 dan 40

⁴ *Ibid.*, hlm. 46

Sekuat-kuatnya NICA melakukan pembredelan terhadap media massa di atas, tetap saja selalu ada cara agar dapat menyalurkan tekanan dan ancaman Pemerintah NICA itu dalam suatu perjuangan. Maka berkat seniman-seniman pro republik, banyak didirikan grup sandiwara atau tonil. Orang menyebutnya Komidi Stambul kala itu. Menurut aparat keamanan NICA, grup tonil seperti grup Terang Bulan pimpinan Alamsyahrum sebenarnya tidak lebih dan tidak kurang dari propaganda terselubung tentang Kemerdekaan Indonesia.⁵ Pementasan-pementasan grup sandiwara ini selalu penuh sesak oleh rakyat yang haus akan hiburan. Setelah sandiwara selesai, pemeran sandiwara tinggal menikmati hasilnya, dimana akan tumbuh kesadaran kemerdekaan di dalam sanubari rakyat.

B. Persekutuan Para Raja

Wilayah Kalimantan Barat sejak akhir Oktober tahun 1945 praktis dikuasai oleh Pemerintahan NICA oleh Residennya Dr. Van Der Zwall. Sedangkan Sultan Hamid II diangkat menjadi sultan Pontianak menggantikan Sultan Syarif Taha Al-Qadrie yang masih keponakannya. Selanjutnya, Sultan Hamid II yang juga merupakan tokoh sentral kubu federalis dan Perwira KNIL kedepannya cukup kooperatif dan bersedia bekerja sama dengan NICA dimana Gubernur Letnan Jenderal Hubertus Johannes van Mook juga menginginkan Indonesia dibentuk dalam sebuah negara serikat-federasi.

Hamid memang berpandangan Indonesia akan lebih baik jika berbentuk negara federasi. Hamid percaya bahwa Kepulauan Melayu, Indonesia saat ini, akan lebih tepat mempergunakan sistem federal dalam ketatanegaraanya. Di forum-forum perundingan Hamid selalu maju terdepan memperjuangkan negara federalis.⁶ Pada 17-18 Juli 1946, Sultan Hamid II bersama beberapa tokoh Kalimantan Barat

⁵ Ibid., hlm. 46 dan 47

⁶ Hendri F. Isnaeni, *Akrobat Gagal Sultan Ketujuh*, diunduh dari Historia Media Sejarah Populer, pada <https://historia.id/modern/articles/akrobat-gagal-sultan-ketujuh-vXWwY> tanggal 15 September 2018.

mengikuti Konferensi Malino yang diadakan di wilayah Lompobatang, sekitar 70 kilometer dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ia datang mewakili negara Borneo Barat (Kalimantan Barat). Konferensi yang digagas oleh Gubernur Jenderal NICA Dr. H.J van Mook itu, dituding oleh kaum republiken sebagai akal-akalan Belanda untuk melanggengkan rencana pembentukan negara Indonesia berbentuk serikat (federasi) bersama Kerajaan Belanda. Dengan cara berusaha untuk mendapatkan dukungan-dukungan dari wakil-wakil daerah di luar wilayah yang dikontrol Republik Indonesia. Wakil Presiden Muhammad Hatta berpendapat konferensi itu diadakan atas paksaan dan tekanan ujung sangkur oleh Belanda dan peserta-pesertanya juga telah ditunjuk oleh van Mook sendiri.⁷

Dapat dikatakan pertemuan ini adalah pertemuan untuk mengkonsolidasikan pihak-pihak yang pro terhadap bentuk negara federal. Toh, mereka yang hadir pada konferensi nyatanya memang menjabat sebagai pemimpin ataupun wakil dari negara-negara bentukan Belanda, antara lain: Negara Indonesia Timur, Borneo Barat, Negara Kalimantan Timur, Negara Sumatera Timur, dan lain sebagainya yang pada puncaknya pernah mencapai 15 negara dan daerah otonom. Tokoh yang mewakili ini sebagian besar berlatar belakang pemimpin suatu keswaprajaan yang sebelum masuknya Jepang memang sudah menjalin hubungan khusus dengan Hindia Belanda.

Konferensi Malino menyepakati perlunya suatu masa peralihan selama lima sampai sepuluh tahun bagi bangsa Indonesia dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Van Mook berencana untuk menanamkan sendi-sendi cita-cita Persemakmuran Belanda bagi Indonesia. Ia mendesain bentuk kenegaraan dalam suatu negara federasi, dan kemudian dipersilahkan bagi Republik Indonesia yang menguasai Jawa dan Sumatera untuk turut serta atau tidak. Bagi kaum republiken pusat, rencana Van Mook ini adalah rencana yang jahat dengan ingin kembali menerapkan politik divide et impera secara terselubung. Harijan Inzicht menyebut usaha Belanda ini dengan

⁷ Syafaruddin Usman, *J.C Oevaang Oeray: Harkat Martabat Kalimantan Barat*, Enggang Media, Pontianak, 2018: Hlm. 41

Langkah kooperatif tokoh-tokoh Konferensi Malino dengan Belanda itu jelas mendapatkan pertentangan dari kaum republiken yang anti kooperasi. Di tengah panasnya pertentangan tersebut, sebagai kelanjutan Konferensi Malino maka pada 22 Oktober 1946 pemerintah NICA di Kalimantan Barat membentuk Dewan Kalimantan Barat (DKB). Perlunya badan ini sebenarnya telah dirintis sejak 27 Mei 1946 dengan mengundang para sultan seluruh Kalimantan Barat dalam rapat yang difasilitasi oleh NICA. Dalam rapat diputuskan untuk membentuk suatu badan perwakilan dengan melepaskan kewajiban dan kekuasaan kerajaan kepada badan perwakilan.

Anggota DKB sebanyak 40 orang yang dikepalai oleh Sultan Hamid II dan wakilnya W.N Nieuwenhuysen yang berkebangsaan Belanda..DKB didirikan untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Asisten Residen. Dalam susunan keanggotaan, DKB sebenarnya cukup akomodatif dengan menyertakan perwakilan dari berbagai suku dan golongan termasuk anggota dari keturunan Arab dan Belanda. Organisasi politik seperti Persatuan Dayak bahkan berhasil menempatkan delapan wakilnya dalam DKB.⁹ Sedangkan PPRI sama sekali tidak terdapat wakilnya dalam DKB karena tokoh-tokoh utamanya telah ditangkap oleh NICA tidak lama setelah pelantikan Sultan Hamid II pada 23 Oktober 1945.¹⁰

⁸ Rosihan Anwar, *Sejarah Kecil Indonesia: Kisah-kisah Zaman Revolusi Kemerdekaan*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2015: hlm. 132-133

⁹ Tanasaldy, op.cit. Hlm. 81-82, selanjutnya daftar lengkap anggota DKB dapat dilihat di lampiran pada buku ini.

¹⁰ Nugraha, op. cit. Hlm. 132 dan 140

C. Api Padam Pemberontakan Juga Padam

Gelora aksi pemberontakan di beberapa kota di Kalimantan Barat yang rentang waktunya dilaksanakan sekitar bulan Oktober 1946 juga terjadi di Pontianak. Akan tetapi pemberontakan ini gagal terlaksana dengan baik meskipun skenarionya sudah berjalan. Rencana aksi pemberontakan di Pontianak memiliki perbedaan dengan yang terjadi semisal di Bengkayang, Ngabang, dan Nangapinoh. Apabila di kota-kota itu pemberontakan di jalankan oleh badan perjuangan yang menghimpun milisi/gerilyawan dan berupaya merebut kotanya, maka di Pontianak pemberontakan ini bertujuan menciptakan sabotase-sabotase yang menyulitkan NICA.

Pemberontakan dijalankan oleh pemuda-pemuda pro Republik yang telah terkaderisasi lewat pembinaan-pembinaan secara bawah tanah sejak PPRI masih ada. Pemberontakan ini sebenarnya telah lama direncanakan, namun karena alasan kesiapan baru dapat dilaksanakan pada 18 Oktober 1946. Ada beberapa aksi yang akan dilakukan pada pemberontakan itu, yakni membakar Gedung Copra Fonds di daerah Gertak I, penyerangan Penjara Sungai Jawi, penyerangan tangsi militer NICA dan yang paling fenomenal ialah merebut Kapal Perang Djampea DO 12.¹¹

Pemberontakan ini dipimpin oleh Hamdi Moursal yang juga aktif di organisasi Angkatan Pemuda Indonesia (API) dan dibantu oleh pemuda-pemuda eks-Kaigun Heiho. Khusus untuk merebut Djampea, maka gerakan ini juga dibantu oleh dua awak kapalnya dari kalangan pribumi yakni Laidjo bin Laidi Oetoe dan Tahir bin Oemar yang bersimpati pada perjuangan pemuda. Sementara itu setelah dilakukan

¹¹ Syafaruddin Usman, *Untaian Kisah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat: Pada Zaman Pendudukan Jepang Hingga Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia*, Pustaka Dinoman (Koleksi Pribadi), Pontianak, tanpa tahun: hlm. 130. Catatan: Pada buku ini sang penulis menyebutkan pemberontakan dilaksanakan pada bulan Desember 1946, sedangkan buku lainnya (masih penulis yang sama) berjudul *Di Bawah Lambaian Sang Merah Putih: Kisah Revolusi Kalimantan Barat 1945-1950*, Dewan Harian Daerah Badan Kebudayaan Perjuangan '45 Kalimantan Barat, 2018: hlm. 44, menyebutkan pemberontakan dilaksanakan pada 18 Oktober 1946.

berbagai persiapan oleh pemuda, maka di skenarioikan pemberontakan dijalankan dalam beberapa tahap. Pertama, membakar Gedung Copra Fonds di Gertak I sebagai pengalih perhatian pasukan NICA. Dengan demikian diharapkan seluruh tentara NICA akan memusatkan perhatiannya ke tempat ini. Pembakaran dilaksanakan pada malam hari. Bila berhasil, listrik akan dipadamkan untuk keseluruhan kota dan api yang membesar terlihat dari kejauhan menjadi pertanda aksi pemberontakan telah di mulai. Tugas pembakaran ini dijalankan oleh AM. Damhar, A.S Djampi, Achmad Noor, Yacob Mahmud, Hamdy Moursal, dan sejumlah pemuda lain.¹²

Kedua, setelah kebakaran besar terjadi di Copra Fonds maka Omar Saidi, Syarif Muhammad Kesuma Yudha, Yusuf Yatim, dan Arwi akan menaiki sekoci menuju ke Kapal Djampea. Di kapal itu sendiri telah menunggu Laidjo bin Laidi Oetoe dan Tahir bin Oemar, awak kapal Djampea yang sedianya akan membongkar kamar senjata dan dibagi-bagikan ke pemuda sebagai modal perjuangan. Ketiga, setelah kapal Djampea berhasil dikuasai maka dengan kapal itu pula pemuda yang terpilih memberangkatkan kapal itu mendekati tangsi militer NICA melalui Sungai Kapuas. Sesampainya di dekat tangsi militer NICA dan masuk dalam jarak tembak, maka segera Djampea akan memuntahkan isi meriamnya. Apabila rencana ini berhasil hancurlah tangsi militer NICA tersebut. Keempat, kelompok lain yang tidak ikut penyerangan tangsi militer NICA akan menyerang Penjara Sungai Jawi untuk membebaskan tahanan politik atau kaum republiken yang di tahan tanpa alasan jelas dan tanpa proses pengadilan.

Sementara itu dari arah Sungai Ambawang telah bersiap Kasan Gendon dan pengikutnya dari padepokan silat yang ia pimpin untuk bergerak ke Pontianak pada 18 Oktober 1946. Kasan Gendon diperintahkan untuk segera bergerak apabila mendengar suara tembakan (atau kebakaran besar) dari arah Pontianak. Sosok Kasan Gendon sendiri sudah tidak asing di telinga para pejuang di Pontianak. Lelaki asal Ambal, Kebumen, Jawa Tengah tersebut telah masuk di Kalimantan Barat sebelum kedatangan Jepang. Ia telah menciptakan banyak pemuda-pemuda

¹² Ibid.

yang sadar kemerdekaan Indonesia melalui rumah padepokan silatnya. Sehingga melalui ilmu silat yang ia ajarkan dapat digunakan untuk berjuang melawan penjajah. Pasca kemerdekaan, rumah padepokannya menjadi semacam markas tempat berkumpulnya kaum republiken untuk melakukan diskusi dan melakukan perlawanan terhadap NICA.¹³

Hari yang ditunggu-tunggu tiba dan rencana yang matang ini telah disusun, maka segera untuk tahap pertama Gedung Copra Fonds akan dibakar habis sebagai pertanda dimulainya pemberontakan. Akan tetapi rencana tahap pertama ini justru berbuah kegagalan, sehingga menyebabkan rencana pemberontakan ini secara keseluruhan juga mengalami kegagalan. Pasalnya pembakaran Copra Fonds tidak sesuai dengan harapan, api tidak sempat membesar, asapnya yang membumbung tinggi dan menerangi kota menjadi tanda dimulainya pemberontakan tidak tercipta. Musababnya seorang pedagang Tionghoa yang kebetulan berada di sekitar Copra Fonds langsung berteriak-teriak meminta bantuan menyatakan ada kebakaran sebelum api membesar. Dalam waktu singkat dikirim pasukan NICA untuk memadamkan api tersebut. Api berhasil dipadamkan, sedangkan pemberontakan itu padamlah juga dengan sendirinya.¹⁴

Pemberontakan dan aksi-aksi sabotase ini terus dilakukan dengan kekuatan kecil oleh sejumlah pemuda republiken. Kegagalan aksi di bulan Oktober silam tidak memadamkan semangat mereka. Pada pertengahan Desember 1946 sejumlah pemuda seperti AM Damhar, Jacob Mahmud, dan Sai melempari Gudang Mesiu NICA di Jeruju dengan granat tangan. Harapannya gudang tersebut meledak hebat dan sejumlah suplai persenjataan serta amunisi Militer NICA hancur. Sayangnya, aksi ini juga mengalami kegagalan karena gudang itu dijaga amat ketat oleh Tentara NICA dan granat yang digunakan juga tidak sebanding dengan yang

¹³ Tim Redaksi, *Rumah Bersejarah Kasan Gendon Akan Diperbaiki Pemkab*, Kantor Berita Antara Kalimantan Barat, diunduh dari <https://kalbar.antaranews.com/berita/308129/rumah-bersejarah-kasan-gendon-akan-diperbaiki-pemkab> pada 30 Oktober 2018

¹⁴ Usman, *op.cit.* hlm. 130

dibutuhkan untuk meledakkan gudang mesiu tersebut.¹⁵

Setelah sejumlah aksi pemberontakan-sabotase yang dilancarkan para pemuda dan kaum republiken, NICA mulai melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai. Mesin intelejen Politieke Inlichtingen Dienst (PID) berjalan dengan efektif mengumpulkan informasi dan menyebarkan mata-mata untuk mengungkap aksi ini. Dalam tempo waktu tahun 1946 itu juga, sejumlah pemuda berhasil ditangkap. Kasan Gendon dan pengikutnya berhasil ditangkap. Bersama Rebut bin Sehak, Soeradi bin Martosudiro dan Memen bin Semita, mereka divonis 3 hingga 8 tahun penjara oleh pengadilan pada 24 Desember 1946. Sementara yang lain juga belakangan hari tertangkap. Pemerintah NICA menyebut aksi pemberontakan ini sesuai judul bagian ini, *Ondergrondse Acties dan Brontakaffairs*

Kegagalan aksi Revolusi Oktober di Pontianak hanyalah salah satu bumbu atau suka duka dalam perjuangan. Apabila cara-cara fisik dan revolusioner menuai kegagalan, itu bukan berarti kaum pemuda dan republiken mati kutu atau patah arang dalam berjuang. Bagaimanapun juga, kegagalan ini akhirnya mendorong untuk didirikannya Gabungan Persatuan Indonesia (GAPI) pada 18 Desember 1946. GAPI berjuang secara parlementer (politik) yang dipimpin oleh dr. Soedarso. GAPI berisikan orang-orang yang sadar politik secara individual, anggota dari suatu organisasi atau organisasi/perkumpulan itu sendiri, baik dari organisasi buruh, kepanduan, guru, bahkan persatuan olahraga.¹⁶ Kedepannya GAPI akan memainkan peran penting dalam perjuangan politik pro republik dan mengawal pengembalian kedaulatan Belanda ke Indonesia pasca KMB 27 Desember 1949.

¹⁵ Ibid., hlm. 131

¹⁶ Usman, *op.cit.*, 2018: hlm. 47-48

BAGIAN VI

PERTEMPURAN DI NANGA PINOH

1. Upacara Perpisahan Tuan Kuroda

Perlawanan terhadap NICA juga berkobar di wilayah yang jauh dari pesisir Kalimantan Barat, di Kota Nanga Pinoh. Nanga Pinoh merupakan ibukota onderafdeling Melawi yang masuk dalam afdeling Sintang. Pada 15 Agustus 1945, pesawat radio yang dimiliki orang Tionghoa secara sembunyi-sembunyi menangkap siaran radio yang menginformasikan tentang kekalahan Jepang. Kabar ini mulai tersebar di kalangan penduduk Nanga Pinoh, namun sebagian besar belum yakin dengan kekalahan Jepang. Pada 18 Agustus 1945 Bunken Kanrikan Nanga Pinoh, Tuan Kuroda mengumpulkan seluruh pegawai instansi kantornya dan segera diadakan upacara bendera pada jam 08.00 pagi dengan agenda yang sangat spesial, yakni menaikkan bendera Indonesia di sebelah tiang bendera Jepang. Anak-anak sekolah, rakyat, dan pemuka masyarakat dikerahkan dalam peristiwa ini.

Pagi itu selain menaikkan kedua bendera, Hinomaru dan sang saka dwiwarna Merah Putih juga dinyanyikan pula lagu kebangsaan kedua negara, Kimigayo dan Indonesia Raya. Dalam sambutannya pada upacara tersebut, Tuan Kuroda mengatakan ia harus segera berangkat ke Sintang atas panggilan komandannya disana untuk menyerah pada sekutu. Untuk itulah ia menyerahkan kursi pemerintahan Melawi kepada pegawai orang Indonesia, Abdulkadir Djailani. Setelah selesai memberikan sambutan, Tuan Kuroda langsung menuju tiang bendera Hinomaru, menurunkan dan melepaskan kemudian melipat bendera kebangsaan Jepang tersebut.

Hal yang tidak terduga ialah Tuan Kuroda kemudian melangkah ke depan barisan anak-anak sekolah. Ia mengatakan "Peliharalah semangat perjuangan pemuda-pemudi Nanga Pinoh, kalian akan merdeka!". Ia kemudian meminta agar anak-anak sekolah meneriakkan pekikan "Merdeka" sekencang mungkin. Secara spontanitas anak-anak sekolah itu dan seluruh hadirin dalam upacara memekikkan "Merdeka...merdeka...merdeka!". Tanggal 18 Agustus 1945 itulah menjadi hari terakhir kekuasaan Jepang di Melawi. Dimana Jepang telah berhasil mendidik puluhan pemuda Nanga Pinoh memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme selama ia tergabung dalam Kaigun Heiho maupun Seinendan.¹ Demikianlah pergantian kekuasaan di Melawi yang berlangsung damai.

Pasca kepergian Tuan Kuroda, kondisi di Nanga Pinoh juga gegap gempita menyambut kemerdekaan. Dimana-mana setiap rakyat saling bertemu pekik merdeka sudah seperti salam wajib. Akan tetapi rakyat di Nanga Pinoh tidak sepenuhnya merasa tenang, sebabnya masyarakat Tionghoa yang saat masa Jepang mengungsi, kembali lagi ke kota ini dan membuka toko-tokonya. Hal yang jadi permasalahan ialah orang-orang Tionghoa itu kini banyak yang memiliki senjata, menyandang karabin atau pistol yang mereka sembunyikan selama pendudukan Jepang. Bendera Koumintang juga dinaikkan di depan toko atau rumah mereka sambil mengeluarkan kabar jika Pasukan Tiongkok akan datang ke Nanga Pinoh untuk menangkap tentara Jepang. Kondisi ini mirip seperti di Pontianak yang telah penulis bahas di bagian lain.

Ketegangan itu semakin diperparah tentang tersiarnya kabar terjadinya insiden baku hantam di Nanga Serawai antara orang Tionghoa dan pemuda keamanan eks-Keibodan. Untunglah perselisihan ini dapat diselesaikan secara baik dan tidak menjalar hingga ke Nanga Pinoh. Pada 9 September 1945 sepulang rakyat Nanga Pinoh melaksanakan Sholat Idul Fitri, tiba-tiba dikagetkan dengan deru pesawat sekutu yang terbang rendah menyebarkan pamflet yang berisi pemberitahuan akan segera datang sekutu. Maka di tengah suasana lebaran itu,

¹ Aspar, *Sejarah Perjuangan: Rakyat Melawi, Sintang Kalimantan Barat*, Penerbit Fahrana Bahagia, Pontianak, 2005: hlm. 116

yang seharusnya menjadi hari kemenangan nan damai justru dihadapkan dengan suasana khawatir akan kedatangan sekutu yang hendak kembali menjajah Melawi.

Kepastian akan kemerdekaan akhirnya sampai di Nanga Pinoh ketika pada tanggal 15 Oktober 1945, ketika Ade Muhammad Johan mendengar siaran radio tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Berita ini segera menyebar dalam tempo singkat yang akhirnya menggerakkan pemuda-pemuda yang sadar untuk mempertahankan kemerdekaan. Mereka berpacu dengan waktu dengan NICA yang akan segera masuk ke Nanga Pinoh.² Cepat atau lambat, perlu dibentuk badan perjuangan untuk menjaga keamanan dan sebagai sarana menjaga semangat kemerdekaan, bahkan kalau perlu dengan bertempur.

2. Berdirinya Organisasi Pemberontak Merah Putih (OPMP)

Apa yang ditakuti oleh Abdulkadir Djailani sebagai Wedana Melawi di Nanga Pinoh akhirnya terbukti. Pada bulan Oktober 1945 datang satu pleton Polisi Perintis di bawah pimpinan Hoofd Agent Sanndakila yang merupakan petugas keamanan pemerintah NICA. Hal ini segera diwaspadai oleh para pemuda kaum republiken. Untuk memperkuat pasukan, Polisi Perintis itu menawarkan kepada eks-Kaigun Heiho mendaftarkan diri menjadi polisi. Pada akhir Desember 1945 NICA telah masuk ke Nanga Pinoh dan langsung membentuk kantor Controleur di bawah L. Hermans Josef. Pejabat setingkat wedana itu dibantu beberapa Demang dan Asisten Demang, serta Polisi dan tentara NICA yang jumlahnya kurang lebih 60 orang lengkap dengan persenjataan.³

Memasuki tahun 1946 di Sintang, Residen Kalimantan Barat melantik Raden Syamsudin sebagai Panembahan Sintang yang baru. Akan tetapi NICA

² Tim Penyusun Naskah, *Naskah Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908-1950*, Pemerintah Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat, Pontianak, 1989: hlm. 235

³ Syahzaman, Hasanuddin, *Sintang Dalam Lintasan Sejarah*, Romeo Grafika, Pontianak, 2002: hlm. 154

mengetahui jika Raden Syamsudin adalah eks-Kaigun Heiho yang dalam dirinya bersimpati terhadap perjuangan rakyat Sintang dan Melawi dalam menjaga kemerdekaan Indonesia. Untuk itulah dalam tempo enam bulan ia diturunkan dari kursinya, sementara pengendalian pemerintahan diambil alih langsung oleh Asisten Residen Beuwkes.⁴

Sementara di Nanga Pinoh telah berdiri badan perjuangan yang bernama Organisasi Pemberontak Merah Putih (OPMP) sekitar bulan April 1946. OPMP awalnya didirikan oleh Ade Muhammad Djohan, seorang tokoh yang cukup dihormati di Nanga Pinoh. Ade Muhammad Djohan sebenarnya orang yang bekerja dengan NICA, ia pernah menjabat Kepala Kantor Netherlands Indische Gouvernement Import & Export Organisatie (NIGEO), kemudian naik pangkat menjadi kepala untuk se-Afdeling Sintang. Akan tetapi ia diam-diam mendirikan OPMP karena kecintaannya terhadap Indonesia. OPMP jadi wadah diskusi terkait cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia, hampir setiap hari rumahnya kedatangan pemuda untuk sekedar berdiskusi.

Adapun susunan kepengurusan OPMP ialah sebagai berikut:⁵

Ketua	: Bagindo Djalaludin Chatim
Seksi Penerangan	: M. Nawawi Hasan
Seksi Pasukan Penggempur	: Mohammad Saat Aim
Badan Penghubung	: Abang Patol
Staf Administrasi	: Abang Tahir, A. Yusman Badwi
Badan Perlengkapan	: Usman Ando

Ade Muhammad Djohan tidak dimasukkan ke dalam kepengurusan OPMP karena telah pindah ke Sintang. OPMP akhirnya dipimpin oleh Bagindo Djalaludin Chatim yang merupakan seorang guru agama di Nanga Pinoh. Dalam perkembangannya OPMP akhirnya berusaha melaksanakan tindakan-tindakan yang

⁴ Ibid., hlm. 153

⁵ Aspar, *op.cit.* hlm 131

lebih nyata dan revolusioner daripada sekedar perjuangan politis. Untuk itu Bagindo Djalaludin Chatim dan Abang Patol berangkat ke Kotawaringin di Kalimantan Selatan untuk bertemu pemimpin Pasukan MN 1001, Tjilik Riwut. Tujuan keberangkatan ini untuk mendapatkan masukan dan arahan tentang usaha perlawanan terhadap NICA yang telah berkuasa di Nanga Pinoh.⁶

Pasca peninjauan hubungan dengan Tjilik Riwut, secara intensif OPMP terus menerima kedatangan utusan-utusan dari Pasukan MN 1001 yang dalam hal ini banyak membantu pengembangan organisasi OPMP sekaligus melatih laskar-laskarnya. Agar memantapkan upaya perjuangan fisik melawan NICA, maka pada Oktober 1946 OPMP kembali mengalami perubahan kepengurusan dengan menempatkan A. Yusman Badwi dan Usman Ando sebagai Seketaris I dan II. Sementara dibentuk seksi baru yakni Seksi Keuangan yang dijabat oleh Syahid Syarifalah, serta Bagian Penggempur yang dipecah dengan membentuk Bagian Pasukan. Bagian Pasukan dipegang oleh 6 orang yang masing-masing menjadi komandan pasukannya antara lain; Itot Haji Razak, Unut, Abu Bakar Larab, Halet Taha, Umar Tahir, dan Basri Cantik.⁷

Untuk semakin memperhebat usaha-usaha revolusi, OPMP akhirnya dipecah memiliki dua bagian selain di Nanga Pinoh, juga di Tanjung Lay yang letaknya sekitar 12 kilometer dari kota tersebut. Wilayah Tanjung Lay dipilih sebagai basis Bagian Kelaskaran OPMP dalam melatih dan memberikan pelajaran terhadap para pemuda dalam taktik militer untuk melawan NICA. Sehingga sayap militer OPMP ini dinamakan Laskar Merah Putih (LMP) dengan susunan personalia sebagai berikut.⁸

Bagindo Djalaludin Chatim	: Komandan Pasukan
Markasan	: Berpangkat Kapten
Mohammad Saat Aim	: Berpangkat Letnan Satu

⁶ Tim Penyusun Naskah, *op.cit.* hlm. 237

⁷ Aspar, *op.cit.* hlm. 131

⁸ *Ibid.* hlm. 134

Abdul Syukur	: Berpangkat Letnan (Tugas Penggempur)
Idar	: Berpangkat Sersan (Tugas Pengawasan)
Dombek	: Berpangkat Kopral (Tugas Pengawasan)

Sementara di Nanga Pinoh perlawanan terhadap NICA belum teralisasi, maka Gerilyawan Badan Pemberontak Indonesia Kalimantan Barat (BPIKB) telah melancarkan pemberontakan pada 8 Oktober 1946 di Bengkayang. Sejumlah pos polisi dan tangsi militer KNIL-NICA berhasil diduki dan menawan Controleur, meskipun pada 9 Oktober 1946 para pejuang republik itu melakukan gerak mundur ke hutan. Pemberontakan ternyata juga terjadi di Ngabang pada 11 Oktober 1946. Akan tetapi rencana aksi serupa di Singkawang dan di Pontianak tidak teralisasi dengan baik. Salah satu sebabnya karena ketatnya penjagaan NICA-KNIL. Aksi-aksi pemberontakan para pejuang republik itu semakin meyakinkan OPMP-LMP untuk segera melaksanakan aksi serupa di Nanga Pinoh.

Sejak 5 November 1946 Badan Kelaskaran OPMP telah kedatangan rombongan utusan Tjilik Riwut dari Pasukan M.N 1001, rombongan ini dipimpin oleh Kapten Markasan dan lima anak buahnya. Kedatangan mereka membawa dampak positif terhadap Laskar Merah Putih. Selain kesediaan rombongan Kapten Markasan untuk berjuang bersama, mereka juga siap melatih para anggota LMP karena sudah kenyang pengalaman tempur di Kalimantan Selatan. Jumlah LMP aktif sekitar 32 laskar dengan Bagindo Djafaluddin sendiri menjadi kepala pasukan dan wakilnya Kapten Markasan.

Pada 8 November 1946, LMP melakukan pertemuan dengan OPMP untuk membicarakan soal langkah selanjutnya yang dapat dilakukan untuk melawan NICA. Walhasil diputuskanlah untuk merebut Kota Nanga Pinoh dan menangkap semua pejabat penting NICA. Keesokan harinya pada 9 November 1946 kembali diadakan rapat untuk memantapkan rencana penyerangan Kota Nanga Pinoh. Sehingga akhirnya diambil lah keputusan untuk melakukan serangan ke Nanga Pinoh pada 10 November 1946 pukul 12 malam. Dalam rapat itu diputuskan untuk membagi

pasukan dalam beberapa penjuru dan merebut beberapa tempat penting, antara lain: Sebuah Tangsi di Nanga Pinoh, kediaman rumah mantri polisi di Kampung Tanjung, rumah kediaman Controleur, Kantor Pos Nanga Pinoh, menyerang rumah kediaman Hoofd Agent Polisi, dan menyerbu rumah Demang Nanga Pinoh.⁹

3. Mempertahankan Nanga Pinoh dan Rencana Merebut Sintang

Tepat pada tanggal 10 November 1946 pukul 12 malam, aksi untuk merebut Nanga Pinoh dimulai dengan sasaran pertama adalah melumpukan tangsi polisi di kota itu. Aksi ini berjalan lancar tanpa meletuskan satu peluru pun. Rupanya di dalam OPMP telah bergabung Polisi NICA berkebangsaan Indonesia yang telah memberitahukan keadaan dan suasana kantor kepolisian. Selain berhasil menyita 12 senapan karabin, semua anggota Polisi NICA berkebangsaan Indonesia lainnya yang merupakan eks-Kaigun Heiho akhirnya menyatakan menggabungkan diri dan turut serta dalam LMP. Keesokan harinya tanggal 11 November 1946 seluruh kantor-kantor strategis telah berhasil diduduki oleh LMP dan dikibarkan pula sang dwi warna bendera Merah Putih. Mulai hari itu OPMP dan LMP menyatakan Nanga Pinoh merupakan bagian dari Republik Indonesia.¹⁰

Sebagai Controleur atau Demang yang baru, maka diangkatlah Hasan Djafar yang sebelumnya adalah wakil dari Hermans Josef. Hasan Djafar sebenarnya cukup pro terhadap Republik Indonesia karena pada tanggal 9 November 1946 ia menyatakan setuju atas tindakan-tindakan LMP untuk merebut Nanga Pinoh. Akan tetapi LMP gagal menangkap sang Controleur L. Hermans Josef karena sudah sejak tanggal 8 November 1946 melaksanakan perjalanan dinas ke Nanga Serawai.

⁹ Syafaruddin Usman, *Untaian Kisah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat: Pada Zaman Pendudukan Jepang Hingga Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia*, Pustaka Dinosaurs (Koleksi Pribadi), Pontianak, tanpa tahun: hlm. 94

¹⁰ Ibid., hlm. 140

Baik OPMP maupun LMP akhirnya memutuskan untuk melakukan dua misi sekaligus sebagai tindak lanjut setelah keberhasilan merebut Nanga Pinoh. Misi pertama yakni untuk menangkap Hermans Josef ke Nanga Serawai yang dipimpin oleh Usman Cantik berikut sepuluh anggota laskar. Sedangkan misi kedua yakni dikirim utusan ke Sintang dipimpin Nawawi Hasan untuk mengadakan hubungan dengan pendiri OPMP, Ade Muhammad Djohan serta mematai gerak-gerik NICA di Sintang. Pada 14 November 1946 Hermans Josef dan pengawalnya berhasil dibekuk Usman Cantik dan segera dibawa ke Nanga Pinoh keesokan harinya, namun pimpinan OPMP dan LMP di kota tersebut memerintahkan L. Hermans Josef untuk ditawan di Kota Baru, Tanah Pinoh. Ia dititipkan di salah satu rumah warga disana dengan penjagaan para laskar.

Sementara itu di Sintang, rombongan Nawawi Hasan yang ditugaskan untuk menemui Ade Muhammad Djohan telah memutuskan untuk segera melakukan serangan ke Kota Sintang. Aksi penyerangan kota Sintang ini nantinya juga akan didukung oleh KNIL di Sintang yang ternyata banyak diisi oleh kaum bumiputera. Salah satunya Sersan Saman yang memegang kepercayaan sebagai kepala pergudangan yang berisi persenjataan dan amunisi. Ia berjanji apabila berhasil masuk Sintang maka semua senjata dan amunisi akan diserahkan pada LMP. Sedangkan Ade Muhammad Djohan dan Adam Amir akan membantu dibidang keuangan dan logistik LMP selama di Sintang.¹¹

- Secara bersamaan pula, pada tanggal 12 November 1946 Pemerintah NICA di Sintang pimpinan Asisten Residen W.R Beuwkes telah menyusun strategi untuk menumpas Pasukan OPMP-LMP bersama Controleur Sintang Lovis Cardozo. Setelah mendengar kabar dari informan yang langsung datang dari Nanga Pinoh sehari sebelumnya, sang Asisten Residen melaporkan hal itu kepada pimpinan NICA di Pontianak dan meminta tambahan pasukan. Sementara keadaan keamanan di Sintang juga semakin ditingkatkan mengantisipasi adanya aksi serupa di kota itu. Pada 15 November 1946 sekira pukul 11.00 siang telah datang dua utusan dari

¹¹ Aspar, op.cit. hlm. 147

Sintang atas nama Panembahan Sintang, Raden Syamsuddin. Kedua orang itu ialah A.M Jasin dan Amar, membawa surat yang langsung ditulis oleh Raden Syamsuddin yang kurang lebih berbunyi "Harap supaya laskar segera milir ke Sintang sebab kami sekarang sudah terjepit".¹²

Kebetulan sekali pasukan yang akan menyerang Sintang ini juga hendak berangkat pada sore hari menjelang gelap. Sebanyak 30 orang pasukan LMP yang dipimpin M. Samin dengan mengendarai tiga sampan berangkat untuk menyerang Sintang. Sementara itu dalam perjalanan menyusuri Sungai Melawi menuju Sintang, juga sedang milir tiga kapal motor yang berisi penuh Tentara NICA yang didatangkan langsung dari Pontianak atas permintaan Asisten Residen Sintang W.R Beuwkes. Pasukan yang seharusnya menyerang Sintang itu berpapasan dengan bala bantuan dari Pontianak pimpinan V.C Lemens hingga akhirnya terpaksa putar balik ke Nanga Pinoh. Sesampainya di Nanga Pinoh, kapal motor tersebut tidak langsung merapat melainkan melepaskan tembakan terlebih dahulu ke arah tepian.¹³

Begitu Pasukan NICA mendarat, pasukan LMP yang dipimpin Kapten Markasan segera melancarkan serangan balik. Pasukan LMP dengan sekuat tenaga memberikan perlawanan, namun karena pasukan NICA jauh lebih banyak dan lengkap senjatanya terpaksa melakukan gerak mundur ke hutan sambil memberikan perlawanan. Pada 16 November 1946 Nanga Pinoh kembali berhasil direbut NICA.¹⁴ Beberapa pasukan LMP gugur dalam peristiwa berdarah ini, yakni: 1) Unut bin Thalib, 2) Hasim bin Akhmad, 3) Usup bin Djalal, 4) Sulaiman bin Cegai, 5) Bakri bin Rasif, dan 6) Djapar bin Antol. Sementara yang terluka juga diamankan NICA untuk mendapatkan perawatan. Umar Tahir misalnya, ia menderita luka cukup parah di leher, badan dan pangkal paha. Sedangkan Mat Syarif menderita patah tulang lengan, serta Darma dan Djafar yang menderita kebutaan sebelah.¹⁵

¹² Ibid., hlm. 149-150

¹³ Syahzaman, *op.cit.* hlm. 154-155

¹⁴ R.M. Umar dkk, *Melacak Jejak Sejarah Kalimantan Barat*, C.V Derwati, Pontianak, 2017: hlm. 76

¹⁵ Aspar, *op.cit.* hlm. 157

Nasib tidak kalah tragis juga dialami mereka yang tertangkap, Haras misalnya, ia ditembak setelah lima hari bungkam dalam proses interogasi. Kemudian M. Saad Aim juga gugur setelah mengalami penyiksaan hebat saat di interogasi NICA di Penjara Sintang pada 18 November 1946. Sementara Mat Bantam yang sudah dipukuli dan di bawah tekanan akhirnya membocorkan lokasi disembunyikannya Controleur Hermans Josef. Besoknya Mat Bantam juga akhirnya ditembak NICA dan mayatnya ditemukan oleh masyarakat Nanga Pinoh mengapung di sungai. Beberapa hari kedepan Hermans Josef akhirnya bisa dibebaskan oleh NICA dibawah pimpinan Kapten Martin. Dibebaskannya Hermans Josef ini berkat penghianatan yang dilakukan Haji Ismail warga Sawah Liuk yang memberitahukan dan menyerahkan langsung sang Controleur ke tim pasukan Kapten Martin.¹⁶

Dampak dari direbutnya kembali Nanga Pinoh membuat sisa-sisa pasukan LMP menyingkir ke hutan untuk melakukan gerilya melawan NICA. Meskipun begitu operasi pembersihan Tentara NICA terhadap gerilyawan LMP tetap dilakukan hingga akhir tahun 1946. Dalam suatu pertempuran di dekat Bukit Durian, sisa-sisa pasukan LMP yang bergerilya di bawah pimpinan Kapten Markasan mengalami nasib buruk. Kapten Markasan tertangkap setelah ia berhenti menembak karena kehabisan peluru dan akhirnya dieksekusi. Juga T.K Liwoeh dan Bagindo Djalaludin Chatim yang terluka sehingga memudahkan untuk ditangkap. Tokoh LMP lain seperti Sulaiman Cegat, Djafar Anjol, M. Bakri Rasjid, dan Atot Ahmad gugur di dalam penjara karena disiksa habis-habisan saat proses interogasi diri mereka.¹⁷ Demikianlah perlawanan rakyat Nanga Pinoh dalam Revolusi Oktober yang berjuang demi jiwa raga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

¹⁶ Ibid., hlm. 161

¹⁷ Usman, op.cit. hlm. 99.

BAGIAN VII

REVOLUSI BELUM SELESAI:

PERJUANGAN KAUM REPUBLIKEN PASCA OKTOBER 1946 HINGGA 1949

A. Dari Revolusioner ke Parlementer

Tahun 1946 dilewati dengan cukup berat oleh sebagian besar kelompok-kelompok milisi republik dengan akhir yang kurang memuaskan. Revolusi itu telah dijalankan di beberapa kota penting di Kalimantan Barat seperti Bengkayang, Ngabang, Pontianak, dan Nanga Pinoh. Di Sambas rencana pemberontakan yang disiapkan GERINDOM belum sempat dilaksanakan karena pada bulan April 1946 tokoh-tokohnya telah ditangkap oleh NICA. Di Singkawang aksi pemberontakan dibatalkan karena ketatnya penjagaan tentara NICA. Sedangkan di Sintang juga bernasib serupa setelah pasukan yang sedianya bergerak dari Nanga Pinoh lebih dulu di cegat tentara NICA. Rentang waktunya pemberontakan pun berdekatan, antara bulan Oktober dan November 1946. Beberapa kota di atas berhasil diambil alih oleh milisi republik dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Meskipun berlandaskan berbagai motif, namun secara umum yang telah diulas sebelumnya pemberontakan ini bertujuan untuk mengambil-alih penguasaan kota dan mengintegrasikannya ke dalam Republik Indonesia. Jika tidak terlalu berlebihan, aksi-aksi revolusioner yang hampir serentak ini dapatlah kiranya disebut sebagai suatu pemberontakan umum.

Pemberontakan yang gagal tersebut mengakibatkan berbagai posisi yang tidak menguntungkan bagi perjuangan kaum republik selain daripada ratusan atau bahkan ribuan dari mereka gugur sebagai kusuma bangsa. Pasca Revolusi Oktober 1946, Pemerintah NICA melalui alat keamanannya semakin memperkuat penjagaan di setiap kota. Orang-orang yang dicurigai diawasi secara

ketat. Mimbar-mimbar umum yang membicarakan soal "Republik Indonesia" atau "Sukarno-Hatta" selalu dimata-matai oleh PID (Politieke Inlichtingen Dienst). Jika menurut mereka mengancam atau menjelek-jelekan Pemerintah NICA, mimbar tersebut dapat dibubarkan secara paksa bahkan bisa berujung aksi penangkapan. PID merekrut orang-orang lokal sebagai informan sehingga sulit sekali mendeteksi keberadaannya, bahkan bisa saja menyusup dalam organisasi kaum republikan itu sendiri.

Di Pontianak, pasca Oktober 1946 para kaum republikan memilih berjuang secara politik-parlementer, meskipun gerakan-gerakan bawah tanah sebenarnya juga tetap berlangsung. Pada 18 Desember 1946 berdiri Gabungan Persatuan Indonesia (GAPI) dengan susunan kepengurusan yakni¹:

- Ketua : dr. Mas Sudarso
- Ketua Muda : Muzani A. Rani
- Penulis I : Mohammad Ahmadsjah
- Penulis II : Rd. Wariban
- Bendahara : Marah Kesuma, Indra Mahyudin
- Pembantu : Y. Lumenta, R. Soekotjo Katim, R. Muthalib Rivai, Sabam Hendrik Marpaung, L.T Panjaitan, AS. Djampi, dan Sangijo

GAPI merupakan organisasi yang memiliki keanggotaan cukup fleksibel. Ia menghimpun berbagai pihak yang sadar politik secara individual maupun perkumpulan itu sendiri yang bergabung. Dengan tidak memandang latar belakang, asalkan sadar politik dan tentunya pro terhadap Republik Indonesia. GAPI beranggotakan berbagai perkumpulan seperti organisasi buruh, kepanduan, persatuan guru, kesenian, persatuan olahraga, persatuan industri, perdagangan, hingga para pendidik agama. GAPI berjuang menggunakan cara-cara yang soft, senjatanya hanya sebuah mosi kepada Pemerintah NICA yang diputuskan melalui

¹ Syafaruddin Usman, *Di Bawah Lambaian Sang Merah Putih: Kisah Revolusi Kalimantan Barat 1945-1950*, Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kalimantan Barat, Pontianak, 2018: hlm. 47

rapat-rapat atau konferensi anggota. Kadang juga melalui pengerahan demonstran, namun GAPI sendiri mempersilahkan setiap kegiatannya selalu terbuka diawasi oleh PID.

Pada 12 Mei 1947 Pemerintah NICA membentuk DIKB berdasarkan deklarasi 40 tokoh masyarakat di Kalimantan Barat melalui penandatanganan kesepakatan tertulis No. 20/L. Kesepakatan ini sebenarnya sudah ditandatangani pada 22 Oktober 1946 yang lebih dikenal dengan Deklarasi Dewan Kalimantan Barat. Keempat puluh tokoh yang menandatangani deklarasi itu antara lain 12 Rong, dan 3 kepala Neo-Swapraja, 5 orang tokoh Melayu, 8 orang tokoh Dayak, 8 orang tokoh Tionghoa, dan 4 orang Belanda. DIKB dipimpin oleh Sultan Hamid II dilengkan dengan Badan Pelaksana Harian (BPH) dan kabinet. Sehingga Pemerintah DIKB praktiknya mirip sebagai salah satu negara federasi yang dibentuk oleh Belanda Indonesia namun dikemas dalam sebuah Daerah Otonom.²

Pembentukan DIKB dikecam oleh GAPI, menurut mereka statuat Daerah Istimewa Kalimantan Barat merupakan sebuah perjanjian politik antara Sultan Hamid II dengan NICA. Dalam kecaman politiknya, GAPI juga mendapat dukungan dari Persatuan Buruh Indonesia (PBI) pimpinan Sabam Hendrik Marpaung, dan Partai Rakyat Indonesia (PRI) pimpinan Muzani A. Rani.³ Akan tetapi menurut Sultan Hamid II, konsep "daerah" yang lebih ia gunakan dalam pendirian DIKB ialah semata agar dapat mengurus sendiri urusan tertentu pemerintahannya layaknya suatu wilayah dalam negara berbentuk federasi. Untuk itulah digunakan kata "Istimewa", yang menandakan wilayah itu memiliki hak-hak otonom atau kewenangan lebih daripada daerah lainnya.⁴ Sementara di wilayah lain Belanda

² Aju, *Kalimantan Barat: Lintasan Sejarah dan Pembangunan dari Era Kolonial Belanda Tahun 2012*, Derwati Press, Pontianak, 2017: hlm. 47.

³ Dwi Putra Nugraha, *Partai Politik Lokal di Indonesia: Analisis Kedudukan dan Fungsi Partai Politik Lokal 1955-2011*, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. 2012: hlm. 127

⁴ PRI dibentuk pada 21 Juni 1947 dan AD/ART nya disahkan pada 6 Juli 1947. Lihat Usman, *Di bawah lambaian...* op.cit. hlm. 52

⁵ Weny Retnowati, *Kesultanan Pontianak Pada Masa Pemerintahan Syarif Hamid*

lebih senang mendirikan daerah berstatus negara bagian, yang oleh pihak republik disebut negara boneka.

Enam hari setelah DIKB didirikan, GAPI melaksanakan konferensi di Pontianak pada 18 Mei 1947 dengan mengeluarkan pernyataan antara lain:⁶

1. Menolak Borneo Statement yang diresmikan pada 12 Mei 1947
2. Kalimantan Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Mendesak supaya bendera Merah Putih boleh dikibarkan di seluruh pelosok Kalimantan Barat

Kecaman-kecaman GAPI mendorong Pemerintah NICA menangkap sejumlah tokohnya dengan tuduhan akan melakukan suatu pemberontakan. Penangkapan tersebut terjadi pada 22 Juli 1947, yang ditangkap antara lain Muzani A. Rani, Marah Kesuma, Indra Mahyudin, Sabam Hendrik Marpaung, Rd. Wariban, Mohammad Ahmadsyah, dan tentu saja sang ketua dr. Mas Sudarso. Penangkapan ini juga terjadi di wilayah lain yang dikenal cukup memiliki banyak kaum pergerakan seperti di Mempawah, Sambas, dan Singkawang. Syukurlah tokoh-tokoh tersebut ditahan tidak terlampau lama.⁷

Memasuki tahun 1948, GAPI menyatakan akan ikut mencalonkan orangnya dalam pemilihan anggota baru Dewan Kalimantan Barat (DKB). Sedangkan PRI yang menyatakan tetap anti kooperasi. PRI tidak akan mencalonkan kadernya untuk duduk dalam DKB yang dianggap sebagai lembaga bentukan Belanda. Pada 29 Februari

II Alkadri Tahun 1945-1950, Skripsi, Jurusan Pendidikan Sejarah, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak, Pontianak, 2013: hlm. 55

⁶ Tim Penyusun Naskah, *Naskah Sejarah Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat 1908-1950*, Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Pontianak, 1989: hlm. 255

⁷ Pasifikus Ahok, dkk, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 Daerah Kalimantan Barat*, Kanwil Depdikbud Kalimantan Barat, Pontianak, 1992: hlm. 81 dan 83

1948 GAPI berhasil membentuk pengurus untuk GAPI Pontianak secara independen. Sebelumnya kepengurusan GAPI Pontianak merangkap menjadi pengurus Ikatan GAPI untuk seluruh Kalimantan Barat. GAPI Pontianak diketuai oleh Radjikin dan wakilnya Masyhur Rifai. Akan tetapi di sela-sela rapat GAPI yang diselenggarakan marathion itu, NICA menangkap R. Soekotjo Katim pada 25 Februari 1948 dan dr. Mas Sudarso pada 29 Februari 1948.⁸ Tentu saja karena alasan yang sengaja dibuat-buat oleh mereka.

B. Api (Perlawanan) Belum Padam

Di luar Pontianak, suasana yang seakan tenang tanpa riak tersebut sebenarnya bukan tanpa gejolak. NICA telah menganggap hilangnya potensi-potensi pemberontakan di Kalimantan Barat oleh pejuang pro republik. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa para pemimpin pemberontak sudah "dibereskan" dan sebagian lain ditangkap. Padahal di beberapa tempat masih terjadi kontak senjata dalam skala kecil oleh milisi republiken. Pejuang-pejuang republik yang tergabung dalam badan kelaskaran pun juga tetap melakukan latihan-latihan di pedalaman dan pegunungan sebagai persiapan menghadapi tentara NICA.⁹

Di Mempawah, Barisan Pemberontak Republik Indonesia Antibar (BPRIA) yang masih satu komando dengan BPIKB di Singkawang terus melakukan aksi sabotase maupun penghadangan terhadap konvoi-konvoi Tentara NICA. Usaha-usaha sederhana namun menyulitkan ini membuat gerak maju Tentara NICA/KNIL terhambat.¹⁰ Akibatnya anggota BPRIA masuk dalam daftar hitam NICA yang

⁸ dr. Mas Sudarso dijatuhi vonis 6 tahun penjara karena tuduhan akan melawan Pemerintah NICA. Ia ditahan di Penjara Cipinang di Jakarta. Penangkapan ini menuai protes dari GAPI dan mengusahakan pembebasan beliau dengan membentuk Panitia Urusan dr. Sudarso. Lihat Usman, *Di Bawah Lambaian...* op.cit. hlm. 56-57.

⁹ Sarimin Minhad, Usman Amin, *Setetes Air di Padang Pasir: Sejarah Perjuangan Laskar BPIKB Afdeling Singkawang Tahun 1945-1949*, Penerbit Kalbar Indah, Singkawang, 2000: hlm. 52-53.

¹⁰ Keterangan Ilyas Suryani, eksponen BPRIA, dalam Tim Penyusun Sejarah Lisan, *Transkrip Wawancara Sejarah Lisan Tentang Pembakaran Jembatan Wilhelmina*

harus segera diciduk. Untuk menghilangkan jejak tersebut BPRIA membentuk sayap organisasi yang dinamakan Angkatan Pertanian Antibar (APA). Meskipun berkamufase sebagai sebuah organisasi buruh tani, diam-diam APA melakukan latihan kemiliteran di sekitar Gunung Sebukit, Mempawah. Kebetulan sebagian besar anggota APA adalah eks Heiho, juga telah mendapatkan kunjungan pejuang dari Jakarta, Dato' Rongo, yang diutus khusus oleh Divisi IV Kalimantan untuk mengintensifkan perjuangan di Mempawah. Gerah akan aksi-aksi Sabotase yang dilakukan BPRIA, memasuki tahun 1949 aparat KNIL berhasil menangkap sang ketua M. Zainal Abidin dan baru dibebaskan saat pengakuan kedaulatan RI, 27 Desember 1949.¹¹

Di Sambas H. Siradj Sood yang pernah memimpin PERBIS dan tertembak oleh tentara KNIL dalam Insiden Bendera 27 Oktober 1945. Kembali melakukan perjuangan dengan cara-cara baru yang lebih soft. Perjuangan itu direalisasikan dengan mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI) pada 11 November 1946. Sayangnya, organisasi yang lebih bermotif non politis itu juga dicurigai oleh NICA sebagai upaya perlawanan. Akibatnya H. Siradj Sood ditangkap oleh aparat NICA sekitar bulan Mei 1948, atas tuduhan mengadakan rancangan untuk merubuhkan kekuasaan pemerintah Belanda dengan aksi bersenjata.¹²

Tidak ketinggalan, desa-desa di sekitar Pontianak menjelma menjadi basis para kaum republiken setelah dirasa aktivitasnya di kota itu tidak aman bagi keberlangsungan organisasi. Barisan Kuntji Waja (BKW) memindahkan pusatnya ke Sungai Kakap pasca para anggotanya menjadi buruan aparat NICA di Pontianak. Di kemudian hari BKW juga kembali memindahkan aktivitasnya ke sekitar desa Kuala Dua. Dengan tetap melaksanakan latihan kemiliteran secara rutin, pada 17 Agustus 1947 BKW mengadakan upacara bendera memperingati kemerdekaan RI kedua. Pada 7 Januari 1948 aparat NICA berhasil menangkap Syarif Alwi AMS dan banyak

Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak, Badan Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Barat, Pontianak, 2003: hlm. 12

¹¹ Tim Penyusun Naskah, *op.cit.*, hlm. 232

¹² Usman, *op.cit.* hlm. 58

lagi petingginya. Mereka dijebloskan di Penjara Sungai Jawi, Pontianak.¹³ Tentu saja tanpa proses pengadilan.

Masih di sekitar Pontianak, desa-desa lain yang juga menjadi basis kaum republikan ialah Desa Kalimas. Di desa itu sekitar tahun 1947 dibentuk cabang Angkatan Pemuda Indonesia dipimpin Syarif Thaha Husein Almutahar. Dengan beranggotakan 52 personil, API Kalimas memusatkan aktivitasnya di sekitar desa Kalimas, Punggur Besar, dan Pal IX. API Kalimas mungkin tidak melakukan perjuangan bersenjata seperti organisasi/barisan kelaskaran lainnya, namun berkat pentas-pentas tonil (sandiwara) keliling yang dibawakan senimannya, API Kalimas berhasil menyadarkan rakyat yang akan pentingnya arti kemerdekaan Indonesia. Pentas-pentas Tonil ini membuat NICA kesal dan akhirnya dengan alasan akan melakukan pemberontakan atau menghasut rakyat untuk melawan pemerintah, sekitar bulan Agustus 1947 pimpinan API Kalimas ditangkap Politieke Inlichtingen Dienst (PID) saat pementasan di Pasar Punggur Besar. Seniman API Kalimas yang ditangkap PID atau Dinas Intelijen Belanda waktu itu antara lain Syarif Aidit, Syarif Abdullah, Ismail Lumak, dan M. Ali H. Usman. Penangkapan anggota API Kalimas kembali terjadi pada 16 Desember 1947, dan yang terbesar pada 19 Mei 1948. Penangkapan itu berhasil menangkap Syarif Yusuf Alkadri bersama 42 anggota API Kalimas, semuanya meringkuk di sel Penjara Sungai Jawi.¹⁴

Pasca Perjanjian Renville 17 Januari 1948 membuat posisi Belanda semakin di atas angin. Republik Indonesia yang diakui Belanda menurut perjanjian itu hanya wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. Hal ini tetap tidak menyurutkan para pemuda-pemuda pro republik untuk tetap setia berada di belakang Republik Indonesia dan memperjuangkannya dalam berbagai cara. Pada 28 Oktober 1948 di Pontianak diselenggarakan suatu kongres oleh Badan Penyelenggara Kongres Pemuda Indonesia (BPKPI) se-Kalimantan Barat yang diukuti oleh perwakilan-perwakilan organisasi kepemudaan yang ada. BPKPI adalah wadah

¹³ Tim Penyusun Naskah, *op.cit.* hlm. 234

¹⁴ Syafaruddin Usman, *Dari Kaubou ke Kubu Raya*, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pontianak, 2010: hlm. 31-32

organisasi kepemudaan di Kalimantan Barat yang pro terhadap Republik Indonesia, salah satu anggotanya adalah F.C Palaunsoeka sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Dayak Baru.¹⁵

Sementara itu di Sambas perlawanan bersenjata kembali terjadi. Organisasi perlawanan bawah tanah GERINDOM bergabung dalam BPIKB pimpinan Muhammad Ali Anyang. Pada subuh pukul 04.00 pagi 10 Januari 1949, BPIKB melakukan serangan mendadak ke tangsi Tentara NICA-Belanda di Sambas yang dipimpin oleh Ali Anyang sendiri. Aksi tembak menembak pun terjadi hingga pukul 05.30, karena fajar sudah mulai terbit pasukan BPIKB mengundurkan diri ke wilayah Sembuai Sejangkung. Dalam pertempuran itu gugur tiga pejuang BPIKB antara lain M. Sa'ad, Hasan Saleh, dan Zainuddin. Sementara dari pihak NICA-Belanda dilaporkan menderita sembilan tentara dan keluarga mereka juga berhasil ditewaskan.¹⁶ Demikianlah memang taktik gerilya yang dilancarkan BPIKB, memang tidak ditujukan untuk meraih kemenangan besar namun untuk melemahkan mental dan psikis musuh.

Keberhasilan penyerangan ke tangsi Tentara NICA (KNIL) ini tidak terlepas dari peranan organisasi Kesatuan Rakyat Indonesia Serawak (KRIS). Sesuai namanya, KRIS bermarkas di Kucing, Sarawak, yang kini bagian wilayah Kerajaan Malaysia. KRIS dipimpin oleh A. Latief yang menghimpun kaum republikan Indonesia baik yang memang tinggal di Sarawak atau yang melarikan diri dari Sambas untuk menghindari kejaran NICA. Meskipun tidak terlibat langsung dalam perjuangan fisik, peranan KRIS sangat besar dengan menyediakan supply senjata dari Sarawak yang kemudian diselundupkan ke pejuang republikan. KRIS juga memainkan perjuangan diplomasi luar negeri yang tidak tercatat dalam buku-buku sejarah di Indonesia. Misalnya, mengundang tokoh-tokoh masyarakat Malaysia dalam menghadiri peringatan proklamasi kemerdekaan RI di Kuching. Petinggi KRIS seperti A. Latief juga mengadakan kontak hingga ke Singapura yang juga terdapat banyak pihak

¹⁵ Aju, *Palaunsoeka: Tokoh Masyarakat Kalimantan Barat di Balik Integrasi Timor-Timor*, Derwati Press, Pontianak, 2017: hlm. 11

¹⁶ Minhad dan Amin, *op.cit.* hlm. 55

republikan dan warga lokal yang bersimpati pada perjuangan Indonesia.¹⁷

C. Pengakuan Kedaulatan

Pada 7 Mei 1949 seiring dengan kesepakatan Roem-Rowien untuk menghentikan tembakan menembak antara RI-NICA, diambil keputusan pula untuk membebaskan seluruh tahanan politik pro republik. Tokoh dr. Soedarso akhirnya juga akan menghirup udara bebas dari Penjara Cipinang, Jakarta, dan kembali ke Pontianak. Pada 18 Juni 1949, GAPI mulai meningkatkan perjuangannya dengan mengadakan rapat tahunan untuk merombak kepengurusan. Dalam rapat tahunan itu terpilih Mahsyur Rifai sebagai ketua GAPI yang baru. Nama-nama lain yang cukup familiar sebagai pemimpin tokoh republik di Pontianak seperti Muzani A. Rani, S.H. Marpaung, dan A.S Djampi juga tergabung dalam kepengurusan GAPI yang baru ini.¹⁸

Badan Pemerintahan DIKB pada 20 Oktober 1949 mengumumkan bahwa bendera merah putih sudah dapat dikibarkan tanpa syarat apapun (tidak perlu berdamping dengan bendera Belanda). Momentum ini tidak disia-siakan GAPI, dengan mengambil tempat di Lapangan Kebun Sayur maka pada 24 Oktober 1949 diadakan upacara pengibaran Sang Merah Putih yang dihadiri oleh berbagai elemen rakyat maupun organisasi politik dan kepemudaan. Juga hadir pada kesempatan itu organisasi-organisasi Tionghoa yang turut memeriahkan. Sehingga diperkirakan upacara itu tidak kurang dihadiri oleh 3000 masyarakat yang turut datang dengan membawa bendera Merah Putih.¹⁹ Aksi upacara ini menjadi ajang pembuktian kepada pemerintah DIKB maupun Belanda bahwa rakyat masih mendukung dan setia di belakang panji-panji kemerdekaan Indonesia.

Pada 2 November 1949 perundingan KMB usai dengan menghasilkan

¹⁷ Tim Penyusun Naskah, *op.cit.* hlm. 225

¹⁸ Ahok, dkk, *op.cit.*, hlm. 84

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 87

keputusan, salah satunya Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Berita pengakuan kedaulatan Indonesia disambut dengan berbagai ekspresi. Ada yang berbahagia, namun sebagian lain merasa kurang sreg karena bentuk Indonesia yang disepakati adalah negara federal bukan negara unitaris/kesatuan. Pada 26 November 1949, GAPI mengadakan rapat untuk membahas isi dari perundingan KMB. Secara umum GAPI menerima isi dari perundingan itu sebagai suatu realita perjuangan, namun dengan suatu catatan bahwa mereka akan tetap memperjuangkan negara kesatuan. GAPI juga menyatakan akan mengawal penyerahan kedaulatan Indonesia di Pontianak pada 27 Desember 1949. Untuk itulah dibentuk Komite Nasional Kalimantan Barat (KNKB) pada akhir bulan November 1949. Di dalamnya berhimpun anggota-anggota GAPI yang berhaluan keras dan anti-kooperatif dengan tujuan memperjuangkan Kalimantan Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia dan menjadi provinsi otonom. KNKB diketuai oleh Sabam Hendrik Marpaung dan Tan Husni Abdullah sebagai sekretarisnya.

Pada 25 Desember 1949 atas nama KNKB, Sabam Hendrik Marpaung pergi ke Jakarta untuk menjemput perwira TNI Letnan Kolonel Sukanda Bratamanggala dan Mayor Suharsono. Masuknya TNI ke Kalimantan Barat agar tidak terjadi kekosongan kekuatan pertahanan apabila KNIL nantinya dibubarkan setelah penyerahan kedaulatan. TNI akan masuk ke Kalimantan Barat sebagai unsur utama dalam APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat), dimana nantinya akan dibuka kesempatan bagi tentara bumiputera eks-KNIL maupun pejuang dari badan-badan perjuangan untuk masuk dalam APRIS. Tepat pada 27 Desember 1949 diadakanlah upacara penyerahan kedaulatan RIS dibekas rumah residen Kalimantan Barat.²⁰

Demikianlah kisah Revolusi Oktober 1946 di Kalimantan Barat dan perjalanan perjuangannya. NICA/Belanda terpaksa harus meninggalkan wilayah ini setelahnya termasuk tentara-tentara mereka hengkang ke negeri asalnya. Indonesia

²⁰ Ahok., op.cit. him. 87

merdeka, namun bagaimanapun juga negeri ini tetap harus berjuang mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu yang belum jua dinikmati sepenuhnya oleh segenap anak bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Penelitian

- Aan, 2014. *Peran Haji Siradj Sood Pada Peristiwa Pengibaran Bendera Merah Putih 27 Oktober 1945 di Sambas*, Skripsi, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak, Pontianak
- Aju, *Kalimantan Barat Lintasan Sejarah dan Pembangunan dari Era Kolonial Belanda – Tahun 2013*, Derwati Press, Pontianak, 2017
- , 2017. *Palaunsoeka: Tokoh Masyarakat Kalimantan Barat di Balik Integrasi Timor-Timor*, Derwati Press, Pontianak
- Aspar, 2005. *Sejarah Perjuangan: Rakyat Melawi, Sintang Kalimantan Barat*, Penerbit Fahrana Bahagia, Pontianak.
- Dwi Putra Nugraha, 2012. *Partai Politik Lokal di Indonesia: Analisis Kedudukan dan Fungsi Partai Politik Lokal 1955-2011*, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta
- Hassan Basry, 1961. *Kisah Gerilya Kalimantan*, Jajasan Lektur Lambung Mangkurat, Banjarmasin
- Herianto, Amanah Hijriah, 2017. *Sejarah Kerajaan Sanggau*, Balai Bahasa Kalimantan Barat, Pontianak
- M. Yanis, 1983. *Kapal Terbang Sembilan: Kisah Pendudukan Jepang di Kalimantan Barat*, Yayasan Perguruan Panca Bhakti, Pontianak
- Muzani A. Rani, 1979. *Nyala Sejarah di Bumi Kalimantan Barat*, Koleksi Pribadi, Pontianak

- Nawiyanto (Ed.), 2019. *Menegakkan Kedaulatan dan Ketahanan Ekonomi: Bank Indonesia Dalam Pusaran Sejarah Kalimantan Barat*, Bank Indonesia Institute, Jakarta
- Pasifikus Ahok, dkk, 1992. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 Daerah Kalimantan Barat*, Kanwil Depdikbud Kalimantan Barat, Pontianak
- R.M. Umar dkk, 2017. *Melacak Jejak Sejarah Kalimantan Barat*, C.V Derwati, Pontianak
- Rosihan Anwar, 2015. *Sejarah Kecil Indonesia: Kisah-kisah Zaman Revolusi Kemerdekaan*, Penerbit Kompas, Jakarta
- Ya' Ahmad dkk, 1984. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Barat*, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta
- Sarimin Minhad, 2000. Usman Amin, *Setetes Air di Padang Pasir: Sejarah Perjuangan Laskar BPIKB Afdeling Singkawang Tahun 1945-1949*, Penerbit Kalbar Indah, Singkawang
- Superman, 2017. *Peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan Barat Tahun 1967*, Jurnal Historia, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2017, Pontianak
- Syafaruddin Usman, Isnawati Din, 2009. *Peristiwa Mandor Berdarah: Eksekusi Massal 28 Juni 1944 oleh Jepang*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta
- , 2010. *Dari Koubou ke Kubu Raya*, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pontianak
- , 2010. *Sambas Merajut Kisah Menenun Sejarah*, Pemerintah Kabupaten Sambas, Sambas
- , 2018. *Di Bawah Lambaian Sang Merah Putih: Kisah Revolusi Kalimantan Barat 1945-1950*, Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Keuangan 45 Kalimantan Barat, Pontianak

Tentang Penulis



Muhammad Rizak Prabowo

Dilahirkan di Pontianak pada 14 April 1991. Menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Pontianak. Mempelajari sejarah di jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan melanjutkan di Pascasarjana Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) lulus tahun 2016.

History enthusiast dan sejak muda memang bercita-cita menjadi guru atau pendidik. Pernah mengajar di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta sepanjang tahun ajaran 2015/2016. Saat ini mengabdikan diri sebagai Guru Sejarah di SMA Negeri 10 Pontianak dan SMA Mujahidin Pontianak sejak Januari 2017. Bukan masalah, materi namun semata mengejar amal jariyah dalam pengabdian sebagai pendidik.

Telah menulis beberapa karya tulis seperti:

1. *Peristiwa Holodomor di Ukraina 1932-1933 (Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah UNY),*
2. *Sejarah Maritim Peradaban Islam, Kisah Pelaut Muslim Abad Pertengahan (Buku),*

3. *Yugoslavia: Disintegrasi dan Perang Suksesi (Buku),*
4. *Merefleksi Kembali Perjuangan Keumalahayati Dalam Menjaga Kesultanan Aceh (Essay, Direktorat Sejarah Kemendibud),*
5. *Eksistensi Partai Persatuan Dayak Pada Pemilu 1955 (Jurnal Swadesi Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Tanjungpura),*
6. *Peristiwa Mandor 28 Juni 1944 Di Kalimantan Barat: Suatu Pembunuhan Massal Di Masa Penduduk Jepang (Jurnal Bihari, Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi)*

Mengikuti kegiatan Internalisasi Nilai Kebangsaan oleh Di rektorat Sejarah Ditjen Kebudayaan Kemendikbud di Provinsi Aceh, mewakili Kalimantan Barat pada April 2018. Bergabung sebagai pengurus Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Pengurus Wilayah Kalimantan Barat. Aktivitas keseharian diisi dengan mengajar dan belajar. Tulisan-tulisan lain berupa artikel (terutama sejarah) bisa dinikmati di www.ilmupadi.org. Kanal korespondensi melalui rikaz.prabowo@gmail.com.